



PERANAN TNI AD

DALAM PENGAMANAN PERBATASAN NKRI

Dinas Sejarah Angkatan Darat
Bandung, 2012

PERANAN TNI AD

DALAM PENGAMANAN PERBATASAN NKRI

Penanggung jawab:

Brigadir Jenderal TNI Marsono, S.E.

Nara sumber:

Kolonel Cba Dr. Ir. Drs. Djoko Susilo, M.T.

Kolonel Caj Marwoto

Tim Penyusun:

Letkol Caj Drs. Hikmat Israr, M.M.

Letkol Caj Drs. Wardus Tamba

Letkol Caj Drs. Yusuf Ambari

Letkol Caj Drs. I Putu Sutrisna

Mayor Caj Drs. Amin Zuhri

Mayor Caj Drs. Jeni Akmal

Mayor Caj A. Malik

Kapten Inf Doddy Iswahyudiono

Lettu Caj Michael Titahena, S.S.

PNS Drs. Arief Lazuardi, dkk

Penyelaras Bahasa:

PNS Gilang Fajar Nugraha, S.S.

Diterbitkan Oleh:

DISJARAHAD

Jln. Belitung No. 6 Bandung

ISBN : 978-602-95551-4-1

Diterbitkan untuk lingkungan sendiri dan tidak diperjualbelikan

Dicetak Oleh : **CV. Cahya Kartika**

**Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Hak Cipta
Pasal 44**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja mengajarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

PANJI TNI ANGKATAN DARAT



"KARTIKA EKA PAKSI"

Semboyan "Kartika Eka Paksi", berarti :
Burung gagah perkasa tanpa tanding
menjunjung cita-cita tinggi. Maksudnya,
Angkatan Darat yang kuat senantiasa
menjunjung cita-cita tinggi yaitu keluhuran
nusa dan bangsa serta keprajuritan yang
sejati.





KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

SAMBUTAN PADA PENERBITAN BUKU PERANAN TNI AD DALAM PENGAMANAN PERBATASAN NKRI



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira dan bangga atas terbitnya buku "***Peranan TNI AD Dalam Pengamanan Perbatasan NKRI***" buah karya Dinas Sejarah Angkatan Darat.

Salah satu tugas pokok TNI AD adalah menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah daratan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara. Terkait dengan hal tersebut diantara tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang diemban TNI AD adalah mengamankan wilayah perbatasan darat Negara RI dengan Negara tetangga, yaitu perbatasan RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL serta Pulau-pulau kecil terluar.

Penugasan di wilayah perbatasan darat NKRI tersebut telah lama diemban oleh TNI AD, akan tetapi aktifitas dan

pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit khususnya Satgas Pentas TNI AD dalam mengamankan wilayah perbatasan tersebut belum banyak yang mengetahui, baik masyarakat umum maupun internal prajurit TNI AD sendiri. Oleh karena itu dengan keberadaan buku ini diharapkan segenap pembaca, terutama prajurit TNI AD dapat mengetahui dan memahami akan pentingnya aktifitas serta keberadaan TNI AD dalam pengamanan wilayah perbatasan NKRI.

Akhirnya kepada penulis yang telah menyusun dan menulis buku ini saya mengucapkan terima kasih dan selamat. Semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua, mudah-mudahan kita dapat melanjutkan pengabdian terbaik kepada Bangsa dan Negara. Amin.

Jakarta, Juni 2012

Kepala Staf Angkatan Darat



[Handwritten signature]

**Pramono Edhie Wibowo
Jenderal TNI**



KEPALA DINAS SEJARAH ANGKATAN DARAT

KATA PENGANTAR PADA PENERBITAN BUKU PERANAN TNI AD DALAM PENGAMANAN PERBATASAN NKRI



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kami dapat menyelesaikan penulisan dan menerbitkan buku ***“Peranan TNI AD Dalam Pengamanan Perbatasan NKRI”*** sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh penugasan prajurit TNI AD sebagai Satgas Pamantas di wilayah perbatasan RI dengan Negara tetangga sesuai yang diamanatkan dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa menjaga keamanan wilayah perbatasan adalah menjadi tugas TNI. Penulisan buku ini meliputi aktifitas yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di pos-pos perbatasan, juga untuk mengetahui betapa pentingnya arti keberadaan prajurit TNI AD di wilayah perbatasan terutama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah darat NKRI.

Disadari, bahwa meskipun telah didahului dengan kegiatan observasi guna memperoleh data yang valid, namun dalam penulisan buku ini belumlah sempurna, sehingga kritik yang membangun dari berbagai pihak guna kesempurnaan buku ini pada penerbitan yang akan datang sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan segenap prajurit TNI AD di manapun bertugas dan berada, serta khususnya bagi prajurit TNI AD yang akan bertugas di daerah perbatasan.

Bandung, Juni 2012

Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat



Marsono, S.E.
Brigadir Jenderal TNI

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul Buku	i
Tim Penyusun	ii
Panji TNI Angkatan Darat	iii
Sambutan Kasad	v
Kata Pengantar Kadisjarahad	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II LATAR BELAKANG	7
BAB III KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI PAPUA	15
A. Geografi	17
B. Demografi	20
C. Kondisi Sosial	23
D. Kerawanan-kerawanan	25
E. Satgas Pamtas	35
F. Tugas Pokok	37
G. Dislokasi	38
H. Kegiatan Yang Dilaksanakan	42
I. Hasil Yang Dicapai	55
BAB IV KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN	61
A. Geografi	64
B. Demografi	67
C. Kondisi Sosial	69
D. Kerawanan-kerawanan	73
E. Satgas Pamtas	75

F. Tugas Pokok.....	81
G. Dislokasi	83
H. Kegiatan Yang Dilaksanakan.....	86
I. Hasil Yang Dicapai	98
BAB V KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT	103
A. Geografi.....	105
B. Demografi.....	111
C. Kondisi Sosial.....	112
D. Kerawanan-kerawanan.....	115
E. Satgas Pamtas	124
F. Tugas Pokok.....	126
G. Dislokasi	127
H. Kegiatan Yang Dilaksanakan.....	134
I. Hasil Yang Dicapai	141
BAB VI PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR	145
1. Pamtas di Wilayah Kodam I/BB.....	154
2. Pamtas di Wilayah Kodam VI/Tpr.....	154
3. Pamtas di Wilayah Kodam VII/Wrb.....	156
4. Pamtas di Wilayah Kodam IX/Udy.....	157
5. Pamtas di Wilayah Kodam XVI/Ptm.....	158
6. Pamtas di Wilayah Kodam XVII/Cen	159
7. Kegiatan Yang Dilaksanakan	160
BAB VII PENUTUP	163
DAFTAR PUSTAKA.....	167
INDEKS	169
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	173
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	175



BAB I

Pendahuluan



Penulisan sejarah peristiwa merupakan salah satu tugas yang diemban oleh Disjarahad dibidang penulisan sejarah disamping penulisan sejarah satuan dan sejarah biografi. Terkait dengan penulisan sejarah peristiwa, baik peristiwa penugasan Operasi Militer Perang maupun peristiwa Operasi Militer Selain Perang yang telah dilaksanakan oleh prajurit TNI AD selama ini belum banyak yang dituliskan dan dibukukan, sehingga berbagai keberhasilan tugas TNI AD di lapangan di berbagai daerah penugasan belum banyak diketahui, baik oleh kalangan internal prajurit TNI AD itu sendiri maupun masyarakat umum.

Salah satu tugas yang diemban oleh TNI AD dalam Operasi Militer Selain Perang adalah mengamankan wilayah perbatasan dari kegiatan illegal dan pelanggaran hukum, di mana TNI AD menggelar kekuatan operasi pengamanan perbatasan darat yang dilaksanakan oleh Kodam VI/Tanjungpura¹⁾, Kodam XI/Udayana dan Kodam XVII/Cenderawasih dengan menempatkan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) pada titik yang dimungkinkan terdapat suatu ancaman dan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan.

Pelaksanaan Operasi Pengamanan Perbatasan mempunyai tujuan mencegah upaya perluasan wilayah darat Negara lain, kegiatan Infiltrasi dan seluruh kegiatan illegal di wilayah perbatasan darat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun daerah operasi pengamanan darat yaitu perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan, perbatasan Indonesia-

1) Sejak tanggal 2 Juli 2010 Kodam VI/Tanjungpura mengalami perubahan menjadi Kodam VI/Mulawarman dan Kodam XII/Tanjungpura.

Timor Leste di Pulau Timor, dan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea di Pulau Papua.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perbatasan oleh Satgas Pamtas TNI AD, baik di Kalimantan (Perbatasan RI-Malaysia), di Nusa Tenggara Timur (Perbatasan RI-Republik Demokratik Timor Leste), dan di Papua (Perbatasan RI-Papua New Guinea) serta, Pam pulau-pulau kecil terluar maka diperlukan adanya suatu informasi, antara lain dalam bentuk buku. Oleh karena itu guna mewujudkan buku yang dimaksud, maka Disjarahad menyusun dan mewujudkan keberadaan buku terkait dengan penugasan Pamtas TNI AD tersebut.

Terkait dengan penulisan buku yang menceritakan aktivitas prajurit TNI AD sebagai Satgas Pamtas tersebut, selanjutnya Kadisjarahad membentuk Kelompok Kerja Penulisan, dengan kegiatan antara lain melaksanakan pengumpulan data dan observasi lapangan ke Pos Satgas Pamtas TNI AD yang ada di Papua, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur. Dari pengumpulan data dan obsevasi tersebut kemudian ditulislah buku dengan judul **“Peranan TNI AD dalam Pengamanan Perbatasan NKRI”**.

Adapun bab yang menjadi bahasan penulisan buku ini terdiri dari :

- ❖ Bab I Pendahuluan, memuat pemikiran tentang alasan mengapa perlunya ditulis buku ini.
- ❖ Bab II Latar Belakang, yang berisi pertimbangan pemerintah dalam hal ini Mabes TNI menugaskan prajurit TNI AD sebagai Satgas Pamtas di wilayah perbatasan.
- ❖ Bab III Keadaan Wilayah dan Satgas Pamtas di Papua, yang mengemukakan keadaan geografi, demografi, kondisi

Bab 1

PENDAHULUAN

sosial dan berbagai kerawanan di wilayah perbatasan RI-PNG. Dalam bab ini juga dikemukakan Satgas Pamtas yang ditugaskan, tugas pokok dan dislokasi pasukan, kegiatan yang dilaksanakan selama Pamtas dan hasil yang dicapai.

- ❖ Bab IV Keadaan Wilayah dan Satgas Pamtas di Kalimantan, yang mengemukakan keadaan geografi, demografi, kondisi sosial dan berbagai kerawanan di wilayah perbatasan RI-Malaysia. Dalam bab ini juga dikemukakan Satgas Pamtas yang ditugaskan, tugas pokok dan dislokasi pasukan, kegiatan yang dilaksanakan selama Pamtas dan hasil yang dicapai.
- ❖ Bab V Keadaan Wilayah dan Satgas Pamtas di NTT, yang mengemukakan keadaan geografi, demografi, kondisi sosial dan berbagai kerawanan di wilayah perbatasan RI-RDTL. Dalam bab ini juga dikemukakan Satgas Pamtas yang ditugaskan, tugas pokok dan dislokasi pasukan, kegiatan yang dilaksanakan selama Pamtas dan hasil yang dicapai.
- ❖ Bab VI Pengamanan Pulau-pulau Terluar yang mengemukakan keadaan pulau-pulau terluar dan tanggung jawab pengamanannya dilaksanakan oleh prajurit TNI AD, yang terdapat di wilayah Kodam I/BB, Kodam VI/Tpr Kodam VII/Wrb, Kodam XI/Udy, Kodam XVI/Ptm, dan Kodam XVII/Cen. Kegiatan yang dilaksanakan selama Pamtas dan hasil yang dicapai.
- ❖ Bab VII Penutup

Semoga dengan uraian yang disajikan dalam buku ini, dapat memberikan pemahaman yang sama terhadap tugas yang diemban oleh prajurit TNI AD selaku Satgas pamtas di wilayah perbatasan. Sehingga kita lebih bijak dan arif dalam

Peranan TNI AD

dalam Pengamanan Perbatasan NKRI

memberikan penilaian terhadap pengabdian yang telah dilakukan oleh prajurit TNI AD selama ini di daerah penugasan.



BAB II

Latar Belakang



Bab 2

Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 17.504 pulau dan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km², serta panjang garis pantai yang mencapai 81.000 km² ²⁾. Dua pertiga dari wilayah Indonesia terdiri dari lautan, implikasinya, hanya ada tiga perbatasan darat dan sisanya adalah perbatasan laut.

Tiga perbatasan wilayah darat Indonesia dengan negara lain tersebut, meliputi perbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Sedangkan perbatasan wilayah laut berbatasan dengan sepuluh Negara, yang terdiri dari negara Malaysia, Singapore, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea. Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.

Wilayah perbatasan pada hakikatnya merupakan pijakan terdepan dalam memproyeksikan sebuah kekuatan pertahanan Negara. Dalam konteks ini, wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai batas fisik wilayah kedaulatan Negara (*sovereignty's boundary*) yang harus ditegakan, namun sebagai *frontier* atau garda terdepan untuk memperluas pengaruh (*sphere of influence*) dalam mengartikulasikan kepentingan nasional, termasuk kepentingan nasional yang berdimensi pertahanan.³⁾

2) Mabes TNI, *Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI tentang Operasi Pengamanan Perbatasan*, Mabes TNI, Jakarta, 2007, hal 1.

3) Syarifudin Tippe, " *Peran Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) melalui Center of Defence Boundary Research (CDBR) dalam pengkajian Pengelolaan Kawasan Perbatasan*". Makalah pada lokarya Nasional Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan di Jakarta tanggal 20 Juli 2011.

Luas dan panjangnya kawasan perbatasan Indonesia, idealnya dalam pengeloannya mencerminkan adanya sebuah kebijakan pengelolaan perbatasan yang efektif dan akuntabel, baik dari aspek sosial, ekonomi dan keamanan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sistem manajemen perbatasan Indonesia belumlah sebagaimana yang diharapkan, sehingga tindakan kejahatan di perbatasan (*border crime*) masih tetap terjadi. Seperti penyeludupan kayu, barang, obat-obat terlarang, perdagangan manusia, terorisme, serta penetrasi ideologi asing telah mengganggu kedaulatan serta stabilitas kemanan di perbatasan negara. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena selama ini kawasan perbatasan Indonesia hanya dianggap sebagai garis pertahanan terluar negara, oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam mengelola perbatasan lebih pada pendekatan keamanan (*security approach*). Padahal, di beberapa negara tetangga, misalnya Malaysia, telah menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan secara berdampingan pada pengembangan wilayah perbatasan.

Konsep Keamanan (*Security*) memandang kawasan perbatasan sebagai kawasan yang bersebelahan langsung dengan Negara lain sehingga perlu pengawasan terhadap keamanan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan keamanan akan melihat kawasan perbatasan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional sesuai dengan fungsinya dalam pertahanan dan keamanan negara termasuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Konsep struktur ruang pertahanan dan keamanan yang dikembangkan ialah membentuk sabuk komando perbatasan negara. Sabuk komando perbatasan negara ini berupa *buffer area* atau *security zone* sejauh lebih kurang 4 km dari garis perbatasan sebagai wilayah pengawasan. Pertimbangan tersebut juga memperhatikan batasan fisik, meliputi ketinggian topografi, kelerangan tanah, maupun keberadaan sungai. Salah satu bentuk

Bab 2

Latar Belakang

pengawasan ini berupa penyediaan pos-pos pengawas di sepanjang sabuk komando yang berfungsi memantau aset-aset sumber daya negara serta benteng pertahanan terdepan.

Pendekatan keamanan akan melihat kawasan perbatasan di Kalimantan, NTT, dan Papua sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional sesuai dengan fungsinya dalam pertahanan dan keamanan negara. Langkah-langkah yang diambil pemerintah RI untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dan perdagangan di perbatasan darat Kalimantan, NTT, dan Papua seperti pembangunan pos lintas batas lengkap dengan sarana pendukungnya disekitar garis perbatasan; Pengembangan pos-pos TNI di sekitar garis perbatasan sebagai wujud riil dari pengawasan keamanan guna keutuhan NKRI, serta peningkatan pos keamanan darat di Pos Gabungan (Indonesia dan Malaysia).

Ditugaskannya prajurit TNI AD dalam pengamanan perbatasan didasari Undang-Undang No.34 tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI) bahwa wewenang untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan adalah menjadi tugas TNI AD, yaitu salah satu tugas TNI AD dibidang Operasi Militer Selain Perang. Selanjutnya dalam pengamanan perbatasan wilayah darat dipercayakan kepada TNI AD. Hal ini mengacu pada tugas pokok dan tugas bantuan TNI AD yang antara lain bertugas menegakkan kedaulan negara di wilayah daratan dan menegakkan keutuhan wilayah negara di daratan. Oleh karena itu pimpinan TNI mengeluarkan Perpang /12/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang naskah buku petunjuk pelaksanaan TNI tentang Operasi Pengamanan Perbatasan, yang antara lain berisikan pembentukan Satgas Pamtas.

Untuk mengamankan wilayah perbatasan dari kegiatan illegal dan pelanggaran hukum, TNI AD menggelar kekuatan operasi pengamanan perbatasan darat yang dilaksanakan oleh Kodam VI/Tpr, Kodam IX/Udy, dan Kodam XVII/Cen dengan

menempatkan satuan-satuan pada titik-titik yang dimungkinkan terdapat suatu ancaman dan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan.⁴⁾

Satgas Pamtas TNI AD yang terdiri dari satuan setingkat Batalyon tersebut menempati pos-pos yang didirikan pada tempat-tempat yang dinilai rawan di sepanjang wilayah perbatasan. Menurut catatan Staf Umum Operasi Mabesad wilayah perbatasan RI-Malaysia panjangnya 2.005 Km, sehingga untuk mengawasinya idealnya dibutuhkan 203 pos, pamtas, namun yang tergelar saat ini baru 57 pos. Sedangkan wilayah perbatasan RI-RDTL panjangnya 267,8 Km, dibutuhkan sebanyak 40 pos pamtas. Ke 40 pos tersebut sudah terpenuhi kendati belum semuanya permanen. Adapun wilayah perbatasan RI-PNG panjangnya 820 Km, dengan kebutuhan ideal pos sebanyak 135, namun yang baru tergelar hingga saat ini 94 pos pamtas. Dari ke 94 pos tersebut baru 33 pos yang permanen, sedangkan 61 pos semi permanen, bahkan beberapa diantaranya masih bangunan darurat.

Disamping pengamanan perbatasan, TNI juga melakukan pengamanan pulau-pulau kecil terluar, dari 92 pulau terluar yang ada sesuai PP Nomor 78 tahun 2005 yang diamankan 12 pulau, pengamanannya dilaksanakan oleh satuan Kodam dan TNI AL (Marinir dengan status BKO Kodam), yaitu : Dibawah Kodam IM terdapat pulau Rondo yang diamankan oleh 34 prajurit Marinir, dibawah Kodam I/BB terdapat pulau Berhala yang diamankan 34 prajurit Marinir, pulau Sekatung yang diamankan 34 prajurit Yonif 134, dan pulau Nipah diamankan oleh 90 prajurit Marinir. Dibawah Kodam VII/Wrb terdapat pulau Miangas, Marore, dan Marampit yang masing-masingnya diamankan 34 prajurit Yonif 712. Dibawah Kodam IX/Udy terdapat pulau Dana (Kepulauan Rote)

⁴⁾ Mabessad, *Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat*, Mabessad, 2009, hal 6.

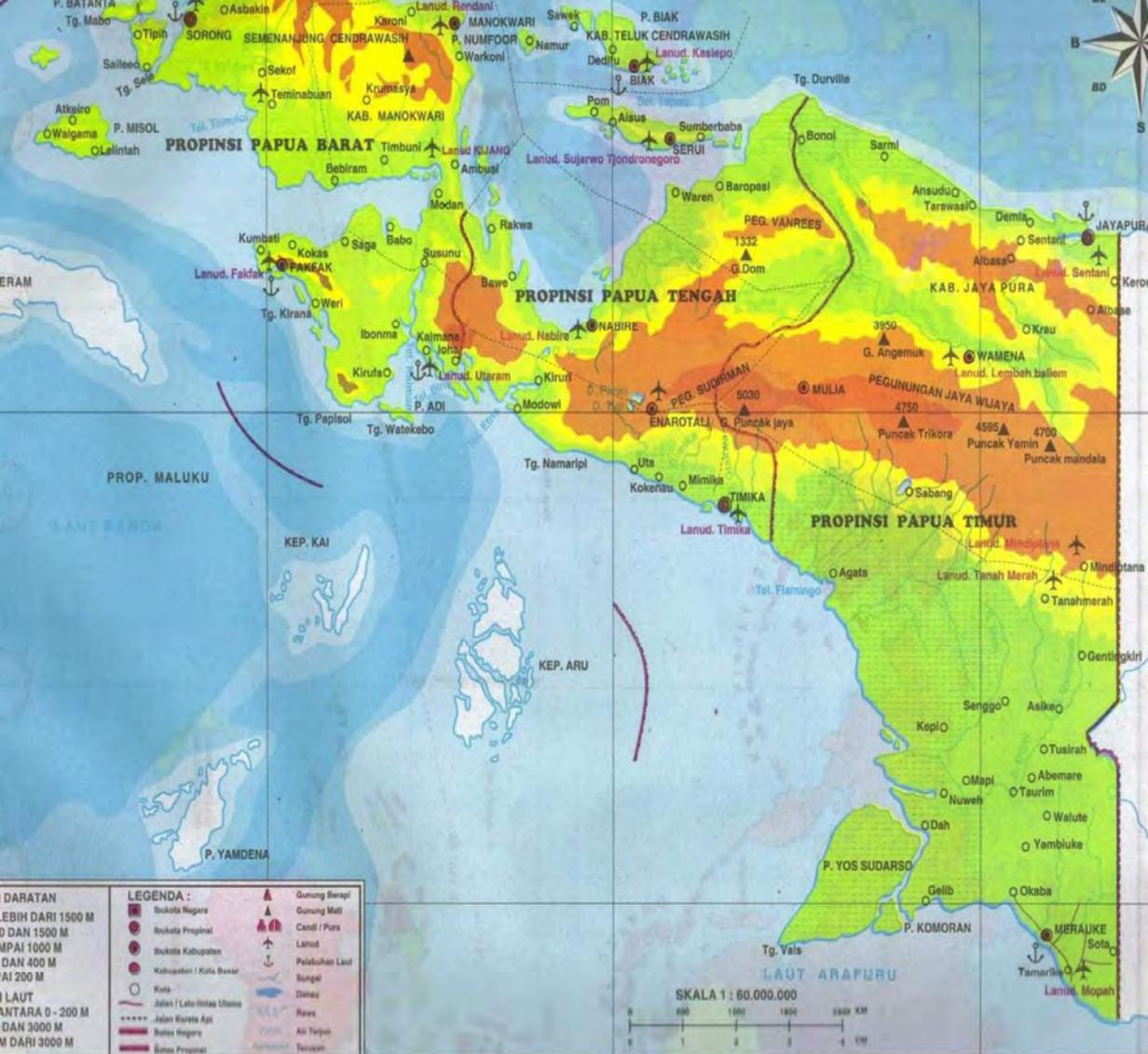
Bab 2

Latar Belakang

yang diamankan 34 prajurit Marinir dan pulau Batek yang diamankan 34 prajurit Yonif 744. Dibawah Kodam XVII/Cen terdapat pulau Fani, Brasi, dan Fanildo yang masing-masingnya diamankan oleh 34 prajurit Marinir.

Dalam melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan, secara garis besar ada lima tugas pokok yang diemban oleh Satgas Pamtas TNI AD, yaitu : pengamanan wilayah perbatasan darat, pengecekan patok batas negara, mencegah semua tindakan illegal yang melewati perbatasan, mengantisipasi/mengatasi infiltrasi GSP bersenjata, dan pemberdayaan wilayah pertahanan sepanjang perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya masing-masing wilayah perbatasan memiliki karakteristik persoalan yang berbeda-beda sehingga pada tiap-tiap wilayah perbatasan skala prioritas tugas yang dihadapi oleh Satgas Pamtas berbeda-beda pula. Seperti, di wilayah perbatasan RI-PNG kerawanan yang menonjol adalah bahaya separatis OPM, di wilayah perbatasan RI-Malaysia kerawanan yang menonjol adalah terjadinya pergeseran patok batas Negara, sedangkan di wilayah perbatasan RI-RDTL kerawanan yang menonjol adalah masalah pengungsian eks Timtim.



BAB III

Keadaan Wilayah dan Satgas Pemas di Papua



Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

A. Geografi

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau, salah satu pulau terbesar dari wilayah Indonesia adalah Papua, yang pernah dijuluki dengan sebutan Irian Barat serta Irian Jaya. Wilayah ini berbatasan dengan Negara tetangga Papua New Gunea (PNG).

Letak astronomis provinsi Papua berada pada garis meridian : sebelah utara $0^{\circ}19^{\circ}LS$ dan 10° Sembilan belas lintang Selatan, dan sepuluh derajat, empat puluh lima $45^{\circ}LS$ sebelah selatan, antara garis bujur: $130^{\circ}45^{\circ}BT$ sebelah barat dan $141^{\circ}48^{\circ}BT$ sebelah timur. Di sebelah utara berbatasan dengan laut Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan laut Arafuru, dan provinsi Maluku dan disebelah timur berbatasan dengan negara Papua New Gunea dan disebelah barat berbatasan dengan sebagian lautan Pasifik dan sebagian provinsi Maluku. Dengan demikian provinsi Papua membujur dari Barat ke Timur dengan selang 11° atau sejauh lebih kurang 120 km (dari kota Sorong sampai Jayapura), sedangkan lebarnya dari Utara ke Selatan sejauh lebih kurang 736 km (dari kota Jayapura ke Merauke).⁵⁾ Dengan demikian luas wilayah Papua secara keseluruhan kurang lebih 410.6002 km² persegi atau sering diibaratkan luas wilayah Papua hampir tiga kali luas pulau Jawa.

Bila dilihat di peta, kita terkesan dengan bentuk pulau ini, karena bentuknya menyerupai burung Cendrawasih atau burung Kasuari, dua jenis burung langka yang hidup dan dapat ditemui di hutan rimba pulau Papua.

⁵⁾ Jhon RG Djopari, *Pemberontakan OPM*, Grasindo, Jakarta, 1993, hal 23.



Peta : Wilayah Papua yang juga merupakan wilayah Kodam XVII/Cenderawasih
(Dokumen Disjarahad tahun 2011)

Diantara peneliti ada yang menyebut Papua dengan sebutan pulau emas, karena dari segi geologi pertambangan di pulau ini tanahnya banyak memiliki kandungan emas. Bahkan disamping kandungan emas, juga terdapat berbagai jenis sumber kekayaan alam lainnya, seperti tembaga, minyak, gas dan lain-lain. Salah satu perusahaan tambang besar yang terdapat di daerah ini sejak tahun 1967 adalah PT. Freeport dari Amerika.

Cuaca secara umum memiliki iklim yang tegas antara musim penghujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung antara bulan Desember sampai dengan awal bulan Mei, curah hujan rata-rata 1.200-1.500 mm/tahun dan rata-rata hujan 90 s.d. 120

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

hari per tahun. Musim kemarau berlangsung pada bulan Mei s.d. Nopember pada setiap tahunnya. Suhu rata-rata tiap tahun berkisar maksimal 30,75 C dan suhu udara minimal 22,3 C.



Danau Sentani dan landasan pacu bandara Sentani yang terlihat indah dari ketinggian benteng Mac Athur (Dokumen Disjarahad Tahun 2011)

Angin pada awal bulan April sampai dengan November bertiup dari Barat Laut sehingga mengakibatkan kemarau dan terkadang hujan yang tidak merata di berbagai daerah. Kecepatan angin hampir sama sepanjang tahun, di daerah pantai bertiup cukup kencang sekiranya 4 s.d. 5 m/det dan di pedalaman berkisar ± 2 m/det. Untuk cahaya, terbit fajar terjadi paling awal \pm pukul 05.45 WIT, sedangkan terang dimulai \pm pukul 06.30 WIT dan gelap \pm pukul 18.30 WIT. Pada musim kemarau kabut turun menyelimuti dataran berkisar 5 s.d. 10 meter dapat mengganggu penglihatan dan berlangsung pada tiap tahunnya.

Kondisi medan Papua merupakan perpaduan antara dataran tinggi dan dataran rendah, di sepanjang pantai banyak

terdapat hutan heterogen yang lebat, sedangkan daerah dataran tinggi bentuk tanahnya bervariasi mulai dari sungai, jurang dan pegunungan. Sebagian tanahnya berbatu dan sebagiannya merupakan tanah liat. Hal ini dipengaruhi oleh sebagian wilayahnya yang tertutup hutan tropis terutama pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau sebagian tanah sehingga sehingga menyebabkan debu tebal.

B. Demografi

Sebagai bangsa yang berbhineka tunggal ika, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai rumpun suku bangsa. Untuk wilayah Papua penduduk aslinya berasal dari rumpun suku Melanesia, yang berciri warna kulit agak hitam dan rambut keriting. Disamping penduduk asli, juga terdapat penduduk dari suku-suku lainnya yang berasal dari luar Papua, seperti suku Ambon, Jawa, Madura, Makassar, dan lain-lain yang sebagian besar mendominasi sektor perdagangan.



Sosok gambaran penduduk asli Papua dalam kostum budaya dan kesenian tradisional.
(Dokumen Republika, Agustus 2011)

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

Masyarakat asli Papua pada umumnya hidup berkelompok sesuai suku masing-masing dan bertempat tinggal di kampung/pedalaman/daerah terpencil sesuai dengan pekerjaan mereka yang umumnya nomaden (petani, berkebun dengan lahan berpindah), berburu maupun nelayan, kecuali masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri dan swasta tinggal di daerah distrik/perkotaan.



Masyarakat Papua di daerah pedalaman yang kesulitan air bersukacita memperoleh bantuan air layak minum dari pemerintah. (Sejarah Kodam XVII/Cen tahun 2010)

Masyarakat pendatang pada umumnya bekerja sebagai pegawai negeri, swasta, pedagang, wiraswasta, bertani, berkebun maupun nelayan. Mereka tinggal di pusat keramaian distrik atau perkampungan (transmigrasi) dan menyebar di seluruh wilayah, sehingga memberi kesan bahwa masyarakat pendatang jumlah komunitasnya lebih banyak dengan SDM yang lebih baik, sehingga sebagian besar telah mendominasi roda perekonomian, yang tanpa disadari dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan tidak jarang terjadi benturan fisik.

Secara tradisional, tipe pemukiman masyarakat Papua dapat dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok dimana setiap tipe

mempunyai corak kehidupan sosial-ekonomi dan budaya tersendiri, yaitu sebagai berikut :

Pertama. Penduduk pesisir pantai; penduduk ini mata pencaharian utama sebagai nelayan disamping berkebun dan meramu sagu yang disesuaikan dengan lingkungan pemukimannya itu. Komunikasi dengan kota dan masyarakat luar sudah tidak asing bagi mereka.

Kedua. Penduduk pedalaman yang mendiami dataran rendah; mereka termasuk peramu sagu, berkebun, menangkap ikan di sungai, berburu di hutan di sekeliling lingkungannya. Mereka senang mengembara dalam kelompok kecil. Mereka ada yang mendiami tanah kering dan ada yang mendiami rawa dan payau serta sepanjang aliran sungai. Adat istiadat mereka ketat dan selalu mencurigai pendatang baru.

Ketiga. Penduduk pegunungan yang mendiami lembah; mereka bercocok tanam, dan memelihara babi sebagai ternak utama, kadang kala mereka berburu dan memetik hasil hutan. Pola pemukimannya tetap secara berkelompok, dengan penampilan yang ramah bila dibandingkan dengan penduduk tipe 2. Adat istiadat dijalankan secara ketat dengan “pesta babi” sebagai simbolnya. Ketat dalam memegang dan menepati janji. Pembalasan dendam merupakan suatu tindakan heroik dalam mencari keseimbangan sosial melalui “perang suku” yang dapat diibaratkan sebagai pertandingan atau kompetisi sepak bola. Sifat curiga terhadap orang asing ada tetapi tidak seketat penduduk tipe 2.

Keempat. Penduduk pegunungan yang mendiami lereng-lereng gunung; melihat kepada tempat pemukiman yang tetap di lereng-lereng gunung, memberi kesan bahwa mereka menempati lokasi yang strategis terhadap jangkauan musuh di mana sedini mungkin selalu mendeteksi setiap makhluk hidup yang mendekati pemukimannya. Adat istiadat mereka sangat ketat, sebagian

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

masih “kanibal” hingga kini, dan bunuh diri merupakan tindakan terpuji bila melanggar adat karena akan menghindarkan bencana dari seluruh kelompok masyarakatnya. Perang suku merupakan aktivitas untuk mencari keseimbangan sosial, dan curiga pada orang asing cukup tinggi.⁶⁾

C. Kondisi Sosial

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat terutama di daerah pedalaman masih rendah, sehingga berpengaruh pada banyak hal, seperti labilnya kondisi mental masyarakat Papua menyebabkan mereka sangat rentan dan mudah terpengaruh dengan berbagai macam provokasi. Rendahnya pendidikan juga berdampak pada rendahnya kesadaran politik, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kekurang pedulian dengan politik tersebut dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memprovokasi masyarakat, seperti agar menentang kebijakan pemerintah, mendukung gerakan Papua merdeka, dll.



Murid SD
Papua di depan
kelas. (Sejarah
Kodam
XVII/Cen, 2010)

⁶⁾ Ibid, hal. 49,50.

Faktor geografi dan terbatasnya sarana prasarana transportasi, komunikasi dan infrastruktur, berakibat roda pemerintahan di tingkat desa dan distrik di daerah pedalaman belum mampu memberikan layanan sosial yang baik pada masyarakat, begitu juga dari segi pembangunan terutama di pedalaman masih tertinggal, sehingga kehidupan sosial masyarakat masih jauh dari sejahtera.

Sarana transportasi yang terbatas juga berdampak terhadap lajunya pertumbuhan ekonomi, dimana daerah pedalaman dengan sumber daya alamnya yang melimpah, namun kesulitan menyalurkan hasil buminya dengan lancar. Produksi mikro ekonomi yang dikembangkan rakyat sulit bersaing dengan produk dari daerah lain, karena tidak memiliki keunggulan kompetitif, sehingga dominasi ekonomi pada umumnya dipegang oleh suku pendatang. Hal ini berpotensi kerawanan terjadinya kecemburuan sosial antara masyarakat pribumi dan pendatang.



Masyarakat Papua tengah berjualan dari hasil kebunnya di salah satu pasar tradisional. (Dokumen Disjarahad Thn 2010).

Masyarakat Papua masih memegang kuat budaya lokal, setiap suku memiliki adat dan bahasa sendiri-sendiri yang membedakannya dengan suku lainnya. Diantara budaya yang

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

masih berlangsung seperti tradisi perang suku dan denda adat. Kadangkala kekuatan hukum adat lebih dominan dalam memutuskan suatu kasus dan permasalahan mengalahkan hukum positif yang mempunyai legalitas dan kekuatan hukum tetap. Potensi budaya daerah belum sepenuhnya dikembangkan secara profesional sehingga belum mampu mengangkat keunggulan wilayah.

Di samping itu, di tengah-tengah masyarakat masih terdapat segelintir penduduk yang merasa tidak puas atas penyerahan kedaulatan Papua oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia melalui UNTEA dan hasil Pepera yang dilaksanakan pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969 yang menghasilkan suara bulat masyarakat Papua tetap memilih bergabung dengan NKRI. Keputusan itu diterima negara-negara anggota PBB dalam sidang umum PBB ke 24 yang diikuti oleh 126 negara, di mana tak satupun negara yang hadir menyatakan menolak hasil pelaksanaan Pepera 1969 yang telah berlangsung dengan damai, terbuka dan dipantau langsung oleh utusan PBB, pengamat internasional dan para wartawan dalam dan luar negeri tersebut.

Segelintir kelompok masyarakat yang tidak puas atas hasil Pepera itu kemudian membentuk Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) sebagai front perlawanan rakyat bersenjata Papua terhadap pemerintah RI. Mereka melakukan pengacauan demi pengacauan untuk menarik simpati dunia internasional. Keberadaan kelompok tersebut selanjutnya disebut sebagai GPK (Gerakan Pengacau Keamanan).

D. Kerawanan-Kerawanan

Kondisi sosial budaya masyarakat Papua diantaranya berpotensi terhadap timbulnya kerawanan-kerawanan di bidang keamanan, seperti kegemaran minum minuman keras yang

sering membuat mabuk, sehingga mengganggu orang lain, tradisi perang suku dan denda adat yang masih berlaku hingga saat ini dapat menimbulkan potensi konflik yang mengarah pada munculnya konflik horizontal dan kerusuhan massa, demikian juga halnya dengan kecemburuan sosial yang diakibatkan oleh kemajuan yang dicapai suku-suku pendatang, berpotensi menimbulkan kerusuhan massa antar kelompok etnis sesama suku, antar suku maupun golongan.

Adanya etnosentrisme budaya dan pemahaman keagamaan yang sempit digunakan sebagai kontrol sosial terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan. Penghormatan terhadap paham keagamaan mengalahkan kondisi sosial dan potensi lainnya yang berseberangan dengan nilai-nilai kepercayaan, sehingga juga dapat menimbulkan kerawanan. Demikian juga persoalan hak ulayat atas tanah merupakan faktor lain yang bila tidak diperoleh jalan keluar yang baik akan berdampak pada kerawanan.

Di samping itu daerah perbatasan juga rawan terhadap penyeludupan senjata gelap, narkoba, pencurian kekayaan hasil bumi (illegal logging), perburuan liar, serta pelintas batas illegal. Hal ini dimungkinkan terjadi akibat lemahnya pengawasan baik dari aparat pemerintah setempat maupun aparat keamanan lainnya.

Kerawanan dibidang keamanan lainnya adalah akibat permasalahan konflik, terutama yang diakibatkan oleh masih adanya kelompok-kelompok yang berupaya untuk menjadikan Papua sebagai wilayah yang terpisah dari NKRI. Kelompok-kelompok ini tergabung dalam gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dalam perjuangannya terbagi menjadi tiga front, yaitu fron politik, front bersenjata dan gerakan bawah tanah yang disebut dengan jaringan klandestin, atau biasanya disebut dengan : 1) Gerakan Separatis Papua Politik (GSP/P). 2) Gerakan

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

Separatis Papua Bersenjata (GSP/B). dan 3) Gerakan Jaringan Klandestin.



Kelompok OPM dengan berbagai cara berupaya menunjukkan eksistensinya dengan mengadakan demo dan membawa bendera "Bintang Kejora"
(Dokumen Tempo 1 Desember 2000)

1) Gerakan Separatis Papua Politik (GSP/P)

Gerakan Separatis Papua Politik (GSP/P) Front ini lebih banyak bergerak di kota atau di daerah-daerah yang padat penduduknya, perjuangan dilakukan melalui jalur politik karena menyadari bahwa cita-cita mereka tidak akan tercapai apabila hanya menggunakan kekuatan bersenjata saja. Jalur politik yang dilakukan adalah dengan membentuk opini masyarakat dengan tujuan memperbesar massa pro kemerdekaan. Jaringan untuk merebut massa pendukung ini dibentuk dengan membangun jaringan lokal di Papua,

jaringan nasional bahkan lobi-lobi ke luar negeri dalam rangka mencari dukungan internasional.

Komposisi Gerakan Separatis Papua Politik di wilayah sepanjang perbatasan terdiri dari kelompok Dewan Adat Papua, kelompok LSM, bekas kelompok Satgas Papua, kelompok lembaga keagamaan dan kelompok kekuatan pendukung yang aktif tergabung dalam Satgas Papua. Simpatisan gerakan ini mengalami peningkatan dan penurunan sesuai suhu dan suasana politik, karena kebanyakan mereka memang hanya ikut-ikutan karena terpengaruh.



Masyarakat Papua tengah melaksanakan demo dengan memblokade jalan Jayapura-Sentani dalam rangka memperingati hari "kemerdekaan" Papua. (Dokumen Kompas 2 Desember 2005)

GSP/P ini tidak dipungkiri memiliki kemampuan dalam menggalang dan mempengaruhi massa, terutama melalui pendekatan etnis, ras dan agama. Berbagai momen mereka manfaatkan untuk menggerakkan massa melakukan unjuk rasa, seperti unjuk rasa menyoroti ketimpangan politik,

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

sosial, ekonomi dan budaya. Mereka juga melakukan publikasi internasional melalui lembaga swadaya masyarakat untuk meluruskan sejarah Papua menurut versi mereka. Mengangkat isu pelanggaran HAM dan pengakuan atas hak-hak dasar rakyat Papua, serta menghimpun dana dari hak sewa atas penggunaan tanah ulayat dengan mengedepankan lembaga adat untuk menekan perusahaan pengelola lahan.

Dalam berbagai kesempatan mereka juga menghembuskan keinginan Papua untuk merdeka, sambil melakukan tekanan-tekanan kepada massa. Tidak jarang mereka berupaya menduduki instansi pemerintah dan swasta dengan menggerakkan kelompok akademika dan tokoh politik. Bahkan berupaya mencari simpati dan dukungan internasional, baik dengan mengirim delegasi ke pertemuan HAM di Jenewa atau dengan mengunjungi badan-badan gereja, kementerian LN dan lembaga HAM di beberapa negara bagian Jerman untuk melaporkan pelanggaran HAM yang menurut mereka terjadi di Papua.

Selain itu, GSP/P juga mempersiapkan tokoh-tokoh dan simpatisannya menjadi kader-kader parpol yang bersimpati kepada perjuangan pro kemerdekaan agar dapat memenangkan Pemilu dengan tujuan menguasai legislatif. Beberapa tokoh GSP/P juga memiliki wadah organisasi LSM dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mayoritas bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi, sosial dan budaya serta HAM yang pada kenyataannya lebih banyak digunakan untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan atau pembentukan opini kepada masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan peluang kepada kepentingan asing yang berpotensi untuk merugikan Negara sendiri.

2) Gerakan Separatis Papua Bersenjata (GSP/B).

Bila Gerakan Separatis Papua Politik bergerak di kota, maka Gerakan Separatis Papua Bersenjata (GSP/B) lebih banyak bergerak di hutan. Terutama di daerah pedalaman di wilayah perbatasan antara RI-PNG, khususnya di daerah-daerah netral yang masih termasuk wilayah PNG.



Gerakan Separatis Papua Bersenjata (GSPB) lebih banyak bergerak di hutan. Terutama di daerah pedalaman di wilayah perbatasan antara RI-PNG (Sejarah Kodam XVII/Cen 2010)

Dipilihnya daerah perbatasan sebagai basis perjuangan GSP/B tersebut dapat dipahami, karena perbatasan RI-PNG mereka anggap sebagai zona aman untuk berlindung dan sangat sulit untuk dipantau apalagi diadakan pengejaran. Disamping itu wilayah PNG dapat

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

mereka memanfaatkan sebagai tempat pelarian dan penyelamatan dalam mencari suka bilamana terdesak oleh operasi yang dilaksanakan oleh aparat TNI/Polri.

Gerakan Separatis Papua Bersenjata tersebut, menyebut dirinya dengan istilah Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebagai organisasi ketentaraan mereka juga memiliki seksi, pleton, kompi, dan lain sebagainya. Namun pada umumnya anggota TNP/OPM tersebut melebur dengan masyarakat yang berada di sekitar basis mereka.

Sehingga jumlah kekuatan sesungguhnya sulit diketahui secara pasti. Begitu pula halnya dengan persenjataan yang mereka miliki terdiri dari senjata campuran dengan jumlah mencapai ratusan pucuk, baik merupakan peninggalan Belanda, senjata rakitan, serta beberapa pucuk senjata standard yang perolehan dengan cara illegal atau hasil rampasan dari TNI, namun ditengarai sebagian besarnya sudah rusak serta jumlah munisi yang sudah menipis.

Mereka bertahan hidup dengan bantuan masyarakat. Masyarakat dipengaruhi untuk menjadi simpatisan /pendukungnya baik melalui cara-cara lunak maupun teror dan menjadikan masyarakat sebagai tameng hidup bila mereka terdesak oleh TNI. Mereka mempunyai jaringan klandestin yang tersebar di berbagai strata sosial masyarakat dan di berbagai wilayah baik kota maupun pedalaman.

Dengan informasi yang diperoleh dan memahami situasi TNI mereka dapat menghindari tekanan-tekanan TNI disatu sisi, dan disisi lain mereka mengadakan pemunculan-pemunculan taktis dalam rangka memelihara

eksistensinya dan memonitor kegiatan pos-pos TNI di sepanjang perbatasan.

Namun dibandingkan dengan waktu-waktu yang lampau, kekuatan GSP/B ini banyak mengalami penurunan, disamping karena sudah terdesak oleh TNI, juga karena terjadinya krisis kepemimpinan dan rantai komando. Pada umumnya pemimpinnya sudah berusia lanjut.

Ketidak jelasan hasil perjuangan yang telah begitu lama juga mempengaruhi turunnya moril, apalagi banyak yang tidak mendukung apa yang mereka perjuangkan. Sementara di bawah NKRI pembangunan dan kemajuan semakin dirasakan oleh masyarakat, sehingga secara berkelompok kemudian mereka memilih kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Yang tinggal hanya kelompok-kelompok kecil yang masih berusaha bertahan.

3) Gerakan Jaringan Klandestin.

Aktivitas klandestin atau gerakan bawah tanah memiliki kemampuan membangun jaringan dalam berbagai strata masyarakat mulai pada tingkat *grass root* sampai pada tingkat elite. Melalui gerakan klandestin masyarakat dipengaruhi dan dimobilisir, terutama masyarakat di daerah perbatasan dengan menggunakan dalih rasa keadilan, perbedaan ras, dan sosial budaya.

Komunikasi secara klandestin dilakukan terhadap semua akses dan jaringan yang bersimpati terhadap Papua Merdeka, bahkan secara klandestin juga dilakukan upaya diplomasi dengan perwakilan yang berada di wilayah Papua maupun yang berada di kota-kota lain di Indonesia.

Gerakan klandestin mampu membentuk opini untuk mendeskreditkan pemerintah dan menyelenggarakan

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

kegiatan-kegiatan yang menunjukkan eksistensinya sebagai suatu organisasi separatis, bahkan mampu melakukan provokasi untuk menimbulkan kerusuhan di daerah-daerah. Disamping itu melalui kegiatan klandestin mereka juga menyiapkan dukungan logistik dan berbagai fasilitas lainnya dalam mendukung kegiatan Gerakan Separatis Papua.



Kelompok klandestin OPM berupaya melakukan kegiatan propokasi guna menimbulkan kerusuhan. (Dokumen Cahaya Chandra Kopassus 2005)

Disamping kerawanan-kerawanan sebagaimana yang dikemukakan di atas, perlu dikemukakan beberapa permasalahan terkait dengan perbatasan RI-PNG yang hingga saat ini masih menjadi masalah meskipun telah dilakukan koordinasi bersama oleh kedua Negara. Permasalahan tersebut adalah sbb. :

- ❖ Daerah Warsmol berada di wilayah kedaulatan RI pada koordinat 140°. 50'00 E sampai dengan 140°.58.00" E dan 4°.45' 12" S sampai dengan 4°.50' 4" S (Luas daerah pada peta +- 160 Km²), dimana penduduk PNG berdomisili di wilayah perbatasan Indonesia dengan pemanfaatan sungai Fly sebagai lalu lintas penduduk kedua Negara yang sering menimbulkan permasalahan dan berimplikasi terhadap keamanan di perbatasan.
- ❖ Penduduk PNG di daerah Warsmol merasa bagian dari kecamatan Teleformin, tidak mau dipindahkan ke tempat asalnya dan harus ada upaya pemindahan serta ada campur tangan pihak ketiga yang diakui secara internasional.
- ❖ Adanya kesamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan yang menyebabkan saling klaim terhadap hak tradisional sehingga berkembang menjadi masalah batas wilayah.
- ❖ Masih sering terjadinya pelanggaran pelintas batas illegal, penyelundupan, *illegal trafficking*, pencurian kekayaan alam, penyelundupan senjata, munisi dan bahan peledak serta digunakannya wilayah perbatasan sebagai basis OPM (Organisasi Papua Merdeka).
- ❖ Patok batas kedua Negara sulit dikontrol dikarenakan belum tersedianya jalan disepanjang perbatasan dan hutannya masih lebat.⁷⁾

⁷⁾ Ibid, hal 10

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

E. Satgas Pamtas

Guna mengatasi dan mengantisipasi penyimpangan dan berbagai tindakan yang melawan hukum dan mengganggu Kamtibmas serta merongrong integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia di sepanjang perbatasan RI-PNG, maka pemerintah menempatkan aparat gabungan, mulai dari TNI AD, Beacukai, Imigrasi dan Polri serta instansi terkait lainnya untuk secara bersama-sama melakukan pengendalian, pengawasan ketat dan memelihara serta menegakkan pertahanan keamanan di sepanjang perbatasan RI-PNG demi menjaga integritas NKRI di wilayah Papua.

Terkait dengan tugas pengamanan perbatasan tersebut, telah digelar satuan TNI AD dengan komposisi dan kekuatan berjumlah 4044 personel⁸⁾ Jumlah tersebut setiap tahunnya tidak persis sama, adakalanya mengalami perubahan sesuai tuntutan tugas dan kebutuhan. Perincian kekuatan Satgas Pamtas TNI AD di wilayah Papua tersebut sbb. :

Pasukan organik Kodam XVII/CEN sebanyak 1.734 orang, dengan rincian :

- ❖ Koops TNI Papua 150 orang
- ❖ Kolakopsrem 172/PWY 80 orang
- ❖ Kolakopsrem 174/ATW 80 orang
- ❖ Kodim 1701/Jayapura 119 orang
- ❖ Kodim 1702/Jayawijaya 65 orang
- ❖ Kodim 1707/Merauke 62 orang
- ❖ Kodim 1711/Boven Digul 61 orang
- ❖ Yonif 751/BS 196 orang
- ❖ Yonif 755/Yalet 196 orang
- ❖ Yonif 756/WMS 60 orang
- ❖ Satgas Intel 140 orang

⁸⁾ Kodam XVII/Cen, *Sejarah Kodam XVII/Cendrawasih 1963-2010*, Dam XVII/Cen, Jayapura, 2010, hal 267

Pasukan non organik 2.281 orang, dengan rincian :

- ❖ Satgas Yonif 650 orang
- ❖ Satgas Udara 40 orang
- ❖ Denpenerbad 25 orang
- ❖ 2 Densandha 216 orang

Khusus untuk Satgas Yonif yang ditugaskan sebagai Pamtas RI-PNG dilaksanakan pergiliran batalyon, yaitu dari batalyon infanteri Kostrad dan batalyon infanteri dari berbagai Kodam di jajaran TNI AD. Demikian juga halnya dengan Satgas-satgas lainnya mengalami pergiliran tugas dengan rentang waktu penugasan berkisar 9 hingga 12 bulan.

Adapun nama-nama batalyon Satgas Pamtas RI-PNG sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tahun 2007 terdiri dari 4 Yonif, yaitu :

- ❖ Yonif 713/Satyatama, Dam VII/Wirabuana
- ❖ Yonif 406/Candra Kusuma, Dam IV/Diponegoro
- ❖ Yonif 509/Balawara Yudha, Div 2 Kostrad.
- ❖ Yonif 512/Quratama Yudha, Dam V/Brawijaya.

Tahun 2008 terdiri dari 4 Yonif, yaitu :

- ❖ Yonif 725/Woroagi, Dam VII/Wirabuana.
- ❖ Yonif 408/Subrata, Dam IV/Diponegoro.
- ❖ Yonif 321/Galuh Taruna, Div 1 Kostrad.
- ❖ Yonif 320/Badak Putih, Dam III/Siliwangi.

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

Tahun 2009 terdiri dari 4 Yonif, yaitu :

- ❖ Yonif 713/Satyatama, Dam VII/Wirabuana.
- ❖ Yonif 527/Baladibya Yudha, Dam V/Brawijaya.
- ❖ Yonif 303/Setia Sampai Mati, Div 1 Kostrad.
- ❖ Yonif 752/Wira Yudha Sakti, Dam XVII/Cendrawasih.

Tahun 2010 terdiri dari 4 Yonif, yaitu :

- ❖ Yonif 407/Padma Kusuma, Dam IV/Diponegoro
- ❖ Yonif 516/Bahasta Yudha, Dam V/Brawijaya
- ❖ Yonif Linud 433/Julu Siri, Div 1 Kostrad
- ❖ Yonif 753/Arga Wiratama, Dam XVII/Cendrawasih.

Tahun 2011 terdiri dari 4 Yonif, yaitu :

- ❖ Yonif Linud 330/Tri Dharma, Div 1 Kostrad
- ❖ Yonif 141/Aneka Yudha, Dam II/Sriwijaya.
- ❖ Yonif 405/Surya Kusuma, Dam IV/Diponegoro.
- ❖ Yonif 132/Bima Sakti, Dam I/Bukit Barisan.

Untuk Satgas Pamtas tahun 2012, direncanakan sbb. :

- ❖ Yonif Linud 431/Satria Setya Perkasa, Div 1 Kostrad.
- ❖ Yonif 122/Tombak Sakti, Dam I/Bukit Barisan.
- ❖ Yonif 521/Dadaha Yudha, Dam V/Brawijaya.
- ❖ Yonif 142/Kesatria Jaya, Dam II/Sriwijaya.

F. Tugas Pokok

Titik berat operasi pengamanan perbatasan RI-PNG adalah melaksanakan pengamanan terhadap pelanggaran batas wilayah infiltrasi, dan kegiatan illegal lainnya, serta mencegah daerah perbatasan digunakan sebagai basis OPM.

Terkait dengan penugasan pengamanan perbatasan RI-PNG yang dilaksanakan oleh Satgas Pamtas TNI AD tersebut, maka ada lima tugas pokok yang diemban oleh Satgas Pamtas TNI AD di wilayah perbatasan RI-PNG, yaitu :

- ❖ *Pertama*, melaksanakan Operasi Pamtas darat RI-PNG,
- ❖ *Kedua*, melakukan pengecekan dan mencegah pergeseran patok batas Negara (Meridian Monument),
- ❖ *Ketiga*, mencegah semua tindakan illegal,
- ❖ *Keempat*, mengantisipasi/mengatasi infiltrasi dan penyerangan GSP bersenjata, dan
- ❖ *Kelima*, pemberdayaan wilayah pertahanan sepanjang perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

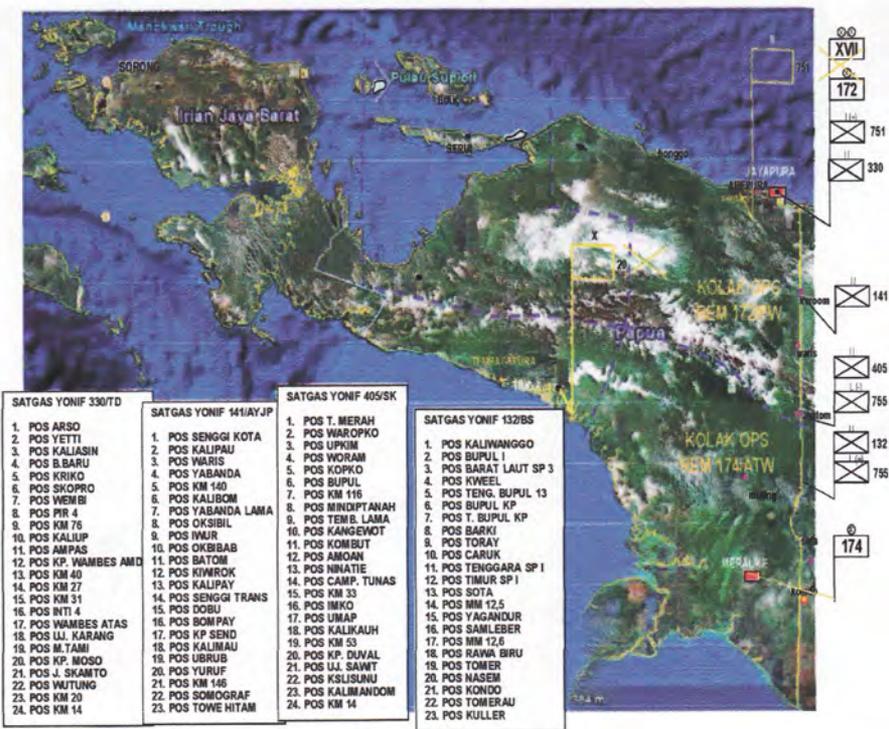
G. Dislokasi

Pamtas di wilayah perbatasan RI-PNG dibagi dalam dua sektor, wilayah utara dan wilayah selatan. Untuk wilayah utara dibawah kendali operasi Kolakops Rem 172/Pwy Kodam XVII/Cen yang berkedudukan di Jayapura, sedangkan untuk wilayah selatan dibawah kendali operasi Kolaksops Rem 174/Atw Kodam XVII/Cen yang berkedudukan di Merauke.

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

PETA OPERASI PAMTAS DARAT RI - PNG



Penugasan Pamtas tahun 2011

Dislokasi Satgas Pamtas TNI AD di wilayah perbatasan RI-PNG yang terdiri dari 4 Satgas Yonif (2 Yonif di utara dan 2 Yonif di selatan) tersebut tersebar pada 94 pos Pamtas, yaitu : 24 pos di wilayah Kabupaten Jayapura, 24 pos di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, 19 pos di wilayah Bovendigul, dan 24 pos di wilayah Kabupaten Merauke. Secara rinci dislokasi pos Pamtas TNI AD di sepanjang RI-PNG tersebut sebagai berikut :



Makolakops Rem 172/Pwy
(Buku Sejarah Korem 172/Pwy periode 2010 hal.ii)

Pos Pamtas di wilayah Kolakops Rem 172/Pwy, terdiri dari 46 Pos yaitu: Pos Arso (Kotis), Pos Yetti, Pos Kaliasin, Pos Bewan Baru, Pos Kampung Kriko, Pos Skopro, Pos Wembi, Pos Pir 4, Pos KM 76, Pos Kaliup, Pos Ampas, Pos Kampung Wambes AMD, KM 40, Pos KM 27,. Pos KM 31, Pos Inti 4, Pos Wambes Atas, Pos Ujung Karang, Pos Muara Tami, Pos Kampung Moso, Pos Jembatan Skamto, Pos Wutung, Pos KM 20, Pos KM 14, Senggi Kota (Kotis Pos Kalipau, Pos Waris, Pos Yabanda, Pos Kalibom, Pos Yabanda Lama, Pos Oksibil, Pos Iwur, Pos Okbibab, Pos Batom, Pos Kiwirok, Pos Kalipay, Pos Senggi Trans, Pos Dobu, Pos Bompay, Pos Kampung Send, Pos Kalimau, Pos Ubrub, Pos Yuruf, Pos KM 146, Pos Somograf, Pos Towe Hitam.

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua



Makolakops Rem 174/ATW
(Sejarah Korem 104 Atw, 2010)

Pos Pamtas di wilayah Kolakops Rem 174/ATW, terdiri dari 56 Pos yaitu: Pos Tanah Merah (Kotis), Pos Waropko, Pos Upkim, Pos Woram, Pos Kopko, Pos Bupul, Pos KM 116, Pos Mindiptana, Pos Tembutka Lama, Pos Kanggewot, Pos Kombut, Pos Amoan, Pos Ninati, Pos Camp Tunas, Pos KM 33, Pos Imko, Pos Umap, Pos Klikou, Pos KM 53, Pos Kampung Duval, Pos Ujung Sawit, Pos Kalisunu, Pos Kalimandom, Pos KM 14, Pos Kaliwanggo (Kotis), Pos Bapul 1, Pos Barat Laut SP 3, Pos Kweel, Pos Tgr Bupul 13, Pos Bupul KP, Pos TMR Bupul 12, Pos Brki, Pos Toray, Pos Duun Caruk, Pos Tenggara SP 1, Pos Timur SP 1, Pos Sota, Pos Wamp, Pos Yanggandur, Pos Samleber, Pos KM 12,6, Pos Rawa Biru, Pos Tomer, Pos Nasem, Pos Kondo, Pos Tomerau, Pos Kuler.

Kondisi geografi setiap pos Satgas Pamtas tidak sama satu dengan yang lain, ada yang terdapat di dataran tinggi dan ada

juga di dataran rendah. Tidak semua pos dapat dilalui dengan jalan darat, terutama pada saat melakukan dorongan logistik sehingga pada pos-pos tertentu ada yang melalui jalur laut atau sungai, dan ada yang melalui udara dengan menggunakan helikopter.

Pada pos-pos tertentu Satgas Pamtas kesulitan untuk memperoleh air bersih, sehingga setetes air bersih bagitu berharga bagi prajurit pada pos tersebut. Ada juga pos yang tidak memiliki sinyal jaringan komunikasi, baik alat komunikasi dinas maupun komunikasi menggunakan HP, sehingga prajurit terisolir, dan untuk memperoleh informasi harus pergi ke tempat tertentu yang ada sinyalnya.

Daerah Papua juga terkenal dengan nyamuk malarianya yang ganas dan dapat mematikan. Beberapa prajurit yang betugas diperbatasan tidak luput terjangkit malaria, pada saat tim observasi dari Disjarahad mengunjungi Satgas Pamtas Yonif Linud 330/Kostrad, tim memperoleh laporan Dansatgas bahwa salah seorang prajurit Yonif Linud 330 terjangkit malaria, dan nyawanya tidak terselamatkan.

H. Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Melaksanakan Operasi Pamtas Darat RI-PNG.

Sebagai wilayah perbatasan darat negara antara RI-PNG maka wilayah Papua sangat rentan disusupi oleh pihak asing, karena wilayah perbatasan menjadi lintasan masyarakat, terutama oleh penduduk yang berdomisili di sekitar daerah perbatasan, sehingga ke luar dan masuk Negara sering mereka lakukan, baik untuk keperluan bercocok tanam, pergi ke pasar ke negara tetangga, untuk menghadiri pesta karena sering terjadi kawin mawin antar negara, atau sekedar ingin berkunjung ke saudaranya

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

yang kebetulan berlainan negara. Di daerah tertentu ada penduduk yang memiliki tanah ulayat peninggalan orang tua mereka yang posisi tanah tersebut sebagian berada di wilayah RI dan sebagian lagi berada di wilayah PNG. Inilah fenomena perbatasan di Papua, sehingga sulit untuk menghalangi penduduk keluar masuk wilayah RI atau PNG.

Luas batas wilayah perbatasan RI-PNG yang mencapai 820 Km tersebut, hanya memiliki beberapa gerbang resmi perbatasan (Kab. Keerom : Wembi, Waris, Senggi dan Yuruf. Kota Jayapura : Skouw. Kab. Pengunungan Bintang : Batom, Okyop dan Iwur. Kab. Boven Digoel : Waropko dan Mindiptana. Kab. Merauke : Bupul, Bupul, Erambu dan Sota), sementara yang lebih banyak dilewati pelintas batas adalah melalui jalan-jalan setapak yang tidak resmi yang mungkin dapat disebut sebagai jalan setapak. Oleh karena itu wilayah perbatasan menjadi rawan manakala dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah Daerah sebagai Badan Pengelola Kawasan Perbatasan mengeluarkan buku tentang Pokok-Pokok Pengaturan Lintas Batas Tradisional RI-PNG, yang berisikan ketentuan-ketentuan pokok dalam pengaturan khusus lintas batas tradisional dan kebiasaan, antara lain mengatur tentang kartu lintas batas, pelaksanaan lintas batas, larangan dan pembatasan, penolakan atau larangan masuk, barang-barang yang boleh dibawa, perdagangan, *border area dan corresponding areas*, serta pengaturan lainnya. Buku ini juga menjadi salah satu pedoman bagi personel pos Pamtas di perbatasan RI-PNG.



Anggota Satgas Pamtas Yonif Linud 330/Kostrad di perbatasan RI-PNG tengah siaga di pos penjagaan. (Dokumen Disjarahad Thn 2011)

Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka di sepanjang wilayah perbatasan RI-PNG ditempatkan pos-pos Pamtas TNI AD dengan tugas untuk memonitor keamanan wilayah perbatasan. Terkait dengan hal tersebut maka personel TNI AD yang ditempatkan di pos tersebut melaksanakan tugas-tugas pengamanan, yaitu:

- a. Melaksanakan patroli keamanan dan patroli lepas di sektor wilayah tanggung jawab pos masing-masing untuk meyakinkan bahwa kondisi wilayah perbatasan selalu dalam keadaan aman.
- b. Melaksanakan pengendapan di daerah yang dianggap rawan, seperti di daerah ketinggian, pemukiman penduduk di pedalaman, daerah yang

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

memungkinkan sebagai akses jalan pelintasan, tower, akses jalan setapak menuju PNG, dll

c. Melaksanakan pengamanan jalan raya atau rute perjalanan umum di sektor wilayah tanggung jawab pos masing-masing, baik pada saat pengiriman logistik maupun pada saat pelintasan kunjungan para pejabat, dll.



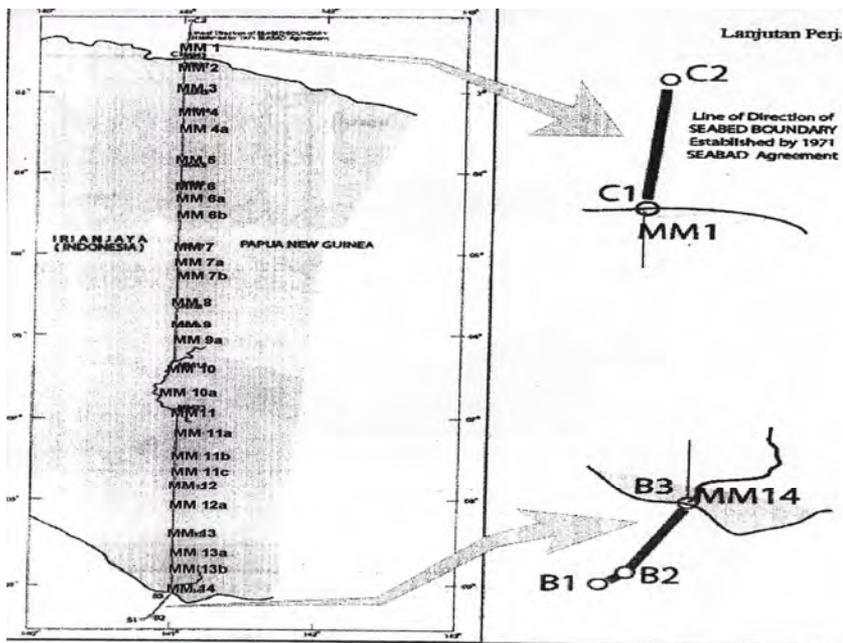
Anggota Satgas Pamtas TNI AD di perbatasan RI-PNG tengah siaga di pos penjagaan. (Dokumen Disjarahad Thn 2011)

d. Melaksanakan sweeping bersama-sama dengan aparat Polri dalam kondisi tertentu yang menuntut diperlukannya kegiatan sweping.

e. Melaksanakan pendataan dan monitoring terhadap aktivitas pelintas batas tradisional penduduk keluar masuk RI-PNG.

2. Melakukan pengecekan patok batas negara (Meridian Monument).

Patok batas negara yang terdapat di sepanjang wilayah perbatasan RI-PNG jumlah keseluruhannya adalah 52 patok, namun yang masih ada saat ini hanya 51 patok, karena satu patok telah hilang akibat abrasi air laut di wilayah pantai selatan Papua.



Patok negara Meridian Monument RI-PNG
(Dokumen Disjarahad Thn 2011)

Yang menjadi dasar hukum perbatasan wilayah RI-PNG ada tiga hal, yaitu : *Pertama*, Deklarasi Raja Persia tanggal 22 Mei 1885 tentang perbatasan Jerman- Belanda- Inggris di Papua. *Kedua*, Konvensi antara Inggris-Belanda tanggal 16 Mei 1895, tentang penentuan garis batas antara

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

Papua dan PNG. *Ketiga*, Persetujuan antara observasi dan fraverse antara RI-Australia, tanggal 19 Agustus 1964. Namun yang menjadi permasalahan PNG tidak join survey di lapangan tetapi *counter check* setelah Indonesia mengerjakan.



Satgas Pamtas Yonif 132/BS tengah melaksanakan pengecekan pengamanan patok batas RI-PNG.
(Dokumen Disjarahad Thn 2011)

Agar posisi patok negara (Meridian Monument) tetap aman berada di tempatnya, tidak dicuri ataupun bergeser tempatnya, serta terpelihara dengan baik, maka personel pos Pamtas TNI AD yang terdapat di wilayah mana patok tersebut berada mempunyai tugas untuk mengecek dan mengamankannya.



Satgas Pamtas Yonif 141/AY tengah melaksanakan pengecekan pengamanan patok batas RI-PNG. (Dokumen Disjarahad Thn 2011)

Letak patok tersebut ada yang dekat dengan pos Pamtas, sehingga mudah dan tidak sulit untuk mengeceknya, namun ada beberapa patok yang letaknya jauh dari pos karena posisinya di tengah-tengah hutan, sehingga untuk mengeceknya prajurit harus masuk hutan dan naik turun gunung bahkan bermalam di hutan belantara karena untuk mencapai lokasi patok tersebut membutuhkan dua sampai tiga hari perjalanan kaki pulang pergi.

3. Mencegah semua tindakan ilegal.

Tindakan ilegal logging berupa pembalakan hutan liar kerap terjadi di wilayah pedalaman Papua yang mendatangkan kerugian Negara. Disamping perusakan

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

hutan, selama ini juga terjadi perburuan liar yang menyebabkan binatang langka penghuni alam Papua berkurang drastis sehingga dikhawatirkan suatu saat bisa punah, seperti burung cendrawasih, nuri, kakaktua, kasuari, buaya, penyu, rusa, dan berbagai binatang khas yang hidup di Papua lainnya.



Satgas Pamtas Pos
Sukow Tengah
Membantu Polri
Mengamankan Seorang
Pelintas Batas yang
membawa dan
Menyelundupkan
Narkoba.
(Foto Dokumen
Disjarahad Thn 2011)

Tindakan ilegal lainnya adalah dalam bentuk penyelundupan barang-barang ilegal, seperti narkoba dan senjata. Sehingga dengan keberadaan Satgas Pamtas di daerah Papua diharapkan tindakan-tindakan ilegal tersebut dapat dikurangi.

4. Mengantisipasi/mengatasi infiltrasi dan penyerangan GSP bersenjata.

Sejak penyerahan Irian Barat dari kolonialisme Belanda ke Indonesia (1963) dan sejak dilakukannya Pepera (1969), kondisi wilayah Papua tidaklah sepenuhnya

Peranan TNI AD

dalam Pengamanan Perbatasan NKRI

aman, karena masih terdapatnya segelintir penduduk Papua yang menginginkan Papua menjadi Negara berdiri sendiri terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok tersebut dikenal dengan sebutan Tentara Pembela Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), atau disebut juga dengan istilah Gerakan Separatis Papua (GSP) yang meliputi gerakan politik (GSP/P) dan gerakan bersenjata (GSP/B).



Tim Observe
Disjarahad di
Pos Kotis
Yonif Linud
330
(Foto
Dokumen
Disjarahad
Tahun 2011)

Dalam rangka memperjuangkan keinginan separatis terlepas dari NKRI tersebut maka berbagai bentuk gangguan keamanan mereka lakukan, baik dalam bentuk penghadangan, penyerangan kampung dan penyerangan pos aparat untuk memperoleh senjata, maupun dalam rangka menarik perhatian massa di dalam dan di luar negeri untuk menyampaikan pesan secara tidak langsung bahwa keberadaan mereka masih eksis.

Pada tahun 1991 OPM atau GPSP/B tersebut pernah melakukan penyerangan di wilayah perbatasan Sota, di samping melakukan kekacauan juga melakukan

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

penyerangan terhadap pos Polisi, menyebabkan jatuh korban. Keamanan mulai reda ketika prajurit TNI AD diturunkan mengatasinya.

Guna mencegah penyerangan GSP/B tersebut, maka Satgas Pamtas TNI AD melaksanakan patroli keamanan maupun patroli lepas secara rutin dan terus menerus, di samping mengadakan patroli mobil pada hari-hari yang dianggap rawan. Untuk mengantisipasi penyerangan pos maka dilakukan perkuatan pos dengan memperketat penjagaan dan memperkuat bok-bok pertahanan. Di samping itu Satgas juga melakukan pendekatan kepada penduduk sekitar, terutama dalam rangka mengumpulkan keterangan berkaitan dengan GSP/B.

5. Pemberdayaan Wilayah.

Jauh dan sulitnya ditempuh pemukiman penduduk di wilayah perbatasan, menyebabkan berbagai sarana dan prasarana sangat minim, sehingga dalam banyak hal penduduk wilayah perbatasan jauh tertinggal dari saudara-saudaranya yang berada di kota. Misalkan saja dari segi pendidikan, karena terbatasnya sekolah dan guru, anak-anak terlambat bersekolah. Murid-murid SD terdiri dari anak-anak yang berusia belasan tahun bahkan 20 tahun. Sehingga untuk menamatkan SMP diusia diatas 20 tahun. Mengecap pendidikan SMA begitu sulit, karena mereka harus ke kota, sementara tempat tinggal dan biaya di kota tidak mereka miliki. Pada umumnya penduduk wilayah perbatasan tersebut terhenti pendidikannya hingga SMP. Dapat dibayangkan bagaimana nasib mereka akan berubah dengan pendidikan sedemikian itu?

Peranan TNI AD dalam Pengamanan Perbatasan NKRI

Seorang Prajurit
Satgas Pamtas
TNI AD Menjadi
Guru Bantu
(Dokumen
Disjarahad
Tahun 2011)



Anggota Satgas
Pamtas TNI AD tengah
melaksanakan
kegiatan pengobatan
massal. (Dokumen
Disjarahad Thn. 2011)

Dari segi kesehatan, meskipun terdapat Puskesmas, tetapi dokternya jarang ditempat, sehingga penduduk kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan, tidak mengherankan banyak penduduk yang penyakitan, kekurangan gizi dan kurus. Dari segi pertanian, industri dan perekonomian mereka jauh tertinggal.

Kondisi masyarakat yang sedemikian itu, dengan keberadaan satgas Pamtas TNI AD dapat diberdayakan. Seperti prajurit menjadi guru di sekolah-sekolah yang

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

kekurangan guru, mengajari penduduk berbagai keterampilan, sehingga ilmu dan pengetahuan mereka bertambah. Dari segi kesehatan, pos-pos Pamtas yang berada dekat pemukiman penduduk tidak jarang menjadi tempat minta obat dan berobat. Bahkan penduduk mempercayai bahwa obat yang diberikan oleh Satgas Pamtas lebih mujarab dan membuat mereka cepat sembuh. Tidak jarang Satgas Pamtas mengadakan pengobatan massal gratis bagi masyarakat.



Prajurit Satgas Pamtas Yonif 132/BS tengah gotong royong membuat pagar jalan dari bambu bersama dengan masyarakat (Dokumen Disjarahad Thn 2011)

Bersama masyarakat anggota Pamtas juga secara rutin melaksanakan karya bakti bersama, terutama memperbaiki dan membersihkan fasilitas-fasilitas umum dan tempat ibadah. Di samping itu untuk menjaga kesehatan prajurit juga melaksanakan olah raga bersama masyarakat, dan tidak lupa pula memberikan bantuan pada masyarakat, baik dalam bentuk pakaian, makanan dan lain-lain.

Peranan TNI AD dalam Pengamanan Perbatasan NKRI



Seorang Prajurit Satgas Pamtas TNI AD Tengah Olah Raga Bersama Dengan Masyarakat (Dokumen Disjarahad Thn 2011)

Untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta bela Negara personel Satgas Pamtas memberikan penyuluhan pada masyarakat. Penyuluhan juga diberikan dalam rangka menumbuhkan kesadaran wajib lapor serta kesadaran untuk melaksanakan pengamanan swakarsa di lingkungan masyarakat, agar daerah mereka aman dari hal-hal yang tidak diinginkan.



Seorang Prajurit Satgas Pamtas TNI AD tengah memetik hasil kebun (Dokumen Disjarahad Thn 2011).

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua



Seorang Prajurit Satgas Pamtas TNI AD tengah memberikan penyuluhan tentang kesadaran bela negara dan rasa nasionalisme kepada penduduk papua di daerah perbatasan RI - PNG
(Dokumen Disjarahad Thn 2011)

Dalam rangka pemberdayaan tersebut Satgas Pamtas tidak lupa melakukan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintahan, sipil dan aparat terkait, sehingga semua aktifitas dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan.

I. Hasil Yang Dicapai

a. Di bidang Ops Pamtas Darat RI-PNG

Berkaitan dengan pengaturan mengenai keimigrasian, disebutkan bahwa setiap orang yang akan melakukan kegiatan lintas batas, harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan, antara lain paspor dan visa. Namun kondisi di wilayah perbatasan RI-PNG dengan banyaknya pelintas batas tradisional dan sulitnya pengurusan paspor dan visa, maka untuk mengatasinya pemerintah daerah

sebagai Badan Pengelola Kawasan Perbatasan membuat kesepakatan mengenai Pengaturan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea yang kemudian diaplikasikan dalam Pengaturan Khusus Lintas Batas Tradisional dan Kebiasaan, dimana masyarakat yang melaksanakan lintas batas cukup dengan menggunakan Kartu Lintas Batas atau surat jalan antar perbatasan Negara yang berseberangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah kepada penduduk perbatasan.⁹⁾

Dengan keberadaan pos Satgas Pamantas Darat RI-PNG, keluar masuk masyarakat dari kedua Negara dapat terpantau dengan baik. Berbagai ketentuan dalam aturan lintas batas tradisional dapat diamankan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan Kartu Lintas Batas untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga dengan barang-barang bawaan, hanya diperbolehkan sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak terjadi penyusupan barang diluar ketentuan yang dapat berdampak negatife bagi kedua Negara bertetangga.

Di gerbang pos perbatasan Satgas Pamantas telah memberikan bantuan terhadap pihak imigrasi maupun Polri, terutama dalam pengecekan masyarakat kedua negara yang saling menyeberang untuk berbagai kepentingan. Masuknya barang-barang illegal seperti senjata dan narkoba dengan keberadaan Satgas Pampas dapat dihindari.

Dengan kata lain keberadaan Satgas Pamantas di daerah perbatasan RI-PNG telah dapat menciptakan stabilitas keamanan di sepanjang wilayah perbatasan darat RI-PNG di Papua.

⁹⁾ Lebih lengkap lihat Pokok-Pokok Pengaturan Lintas Batas Tradisional RI-PNG, Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pemkab Keerom, 2009

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

b. Di bidang Pencegahan Pergeseran Patok Batas

Dengan kegiatan patroli secara rutin yang diadakan oleh personel Satgas Pamtas di sekitar pos, antara lain ke lokasi patok batas Negara (Meridian Monument) yang terdapat di dekat pos, maka kemungkinan terjadinya pergeseran patok oleh tangan-tangan jahil dan tidak bertanggung jawab dapat dihindari, sehingga patok tetap berada dalam keadaan aman di tempatnya.

Di antara patok, karena letaknya jauh di pedalaman hutan rimba, untuk melakukan pengecekan tidaklah mudah. Akan tetapi Satgas Pamtas tetap berupaya melakukan pengecekan Meridian Monument tersebut kendati harus ditempuh dengan berjalan kaki selama dua hari dua malam dengan melewati medan yang berat dan rawan. Setidaknya pengecekan Meridian Monument yang jauh di pedalaman tersebut dilakukan satu kali dalam setahun.

Patok batas Negara (Meridian Monument) RI-PNG yang saat ini terdapat 52 buah patok, berdasarkan pengecekan yang dilakukan patroli Satgas Pamtas, dapat dikatakan tidak ada permasalahan, tidak ada terjadi pergeseran. Hanya saja yang terdapat di pinggir laut, hilang akibat abrasi air laut, bukan oleh pergeseran tangan manusia, sehingga perlu diupayakan adanya pergantian patok dalam bentuk lain.

c. Di bidang Pencegahan Kegiatan illegal

Di hutan rimba wilayah perbatasan, ada daerah-daerah tertentu yang diperbolehkan bagi masyarakat untuk berburu dan ada daerah-daerah yang terlarang. Terkait dengan hal tersebut Satgas Pamtas turut membantu menghalangi agar tidak terjadinya perburuan illegal di wilayah perbatasan. Demikian juga halnya melakukan penjagaan agar tidak terjadinya penebangan hutan secara illegal. Meskipun dalam

hal ini fungsi Satgas Pamtas lebih pada tugas monitor dan melaporkan ke komando atas bila ditemukan adanya illegal logging.

Kegiatan illegal lainnya yang rawan di daerah perbatasan adalah peredaran Narkoba. Di mana dengan berbagai cara dari wilayah PNG Narkoba disusupkan ke wilayah RI. Dalam hal ini telah beberapa kali Satgas Pamtas merinkus pengedar Narkoba, terutama dalam rangka membantu pihak Polisi.

d. Di bidang Pencegahan Penyerang GSP/B

Penyerangan yang dilakukan oleh Gerakan Separatis Papua Bersenjata, dapat dikatakan hampir setiap tahun selalu saja ada dan menimbulkan korban harta dan jiwa. Penyerangan yang dilakukan tidak hanya tertuju pada pos Satgas Pamtas yang dianggap lemah dalam upaya mendapatkan senjata, beberapa kali diantaranya juga ditujukan ke pos Polisi dengan maksud yang sama, dan yang lebih sering lagi dengan menyerang perkampungan masyarakat sipil yang terisolir diperbatasan RI-PNG dalam upaya menimbulkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat dan sekaligus menunjukkan eksistensi diri bahwa mereka tetap ada dan akan selalu berjuang agar terlepasnya Papua dari wilayah NKRI.

Seringnya penyerangan GSP/B di wilayah perbatasan tersebut, dari segi taktis cukup menguntungkan mereka, karena seusai penyerangan mereka dapat melarikan diri ke wilayah PNG dimana prajurit TNI tidak memungkinkan untuk mengejanya sebab mereka sudah bukan di wilayah RI.

Dengan keberadaan Satgas Pamtas TNI AD di perbatasan RI-PNG eskalasi penyerangan yang dilakukan oleh GSP/B meskipun masih tetap ada namun sudah jauh berkurang. Disamping GSP/B tersebut kewalahan dalam

Bab 3

Keadaan Wilayah Dan Satgas Pamtas Di Papua

menghadapi Satgas Pamtas, sejumlah senjata dari tangan GSP/B berhasil di rebut, dan posisi mereka semakin tersudut.

Namun seiring dengan kesuksesan Satgas Pamtas TNI AD meminimalisir kekuatan GSP/B, strategi perlawanan mereka mulai berubah, setelah kalah dan kewalahan melakukan perlawanan dengan menggunakan kekuatan bersenjata di wilayah perbatasan dan pedalaman, mereka melakukan perlawanan melalui jalur politik, membikin berbagai kerusuhan dan demo di kota-kota untuk menarik perhatian dunia internasional, sehingga penyerangan bersenjata yang dilakukan cenderung dalam rangka politis, agar aktifitas yang dilakukan diekspos media massa.

e. Di bidang Pemberdayaan Wilayah Perbatasan

Meskipun kebanyakan pos Satgas Pamtas TNI AD jauh dari pemukiman penduduk, namun beberapa diantara pos tersebut ada juga yang letaknya dekat dengan pemukiman penduduk. Bagi anggota Satgas Pamtas yang posnya berdekatan dengan penduduk atau bahkan berada di tengah-tengah pemukiman penduduk, disamping melaksanakan tugas pengamanan, mereka memiliki tugas-tugas tambahan lainnya dalam rangka turut membantu pemerintah dalam upaya pemberdayaan penduduk di wilayah perbatasan. Seperti turut membantu pemberdayaan di bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, olah raga, kesenian dan pembangunan sarana prasarana lainnya yang diperlukan oleh masyarakat di wilayah perbatasan.

Meskipun Satgas Pamtas bukanlah penyuluh pertanian, namun dalam rangka mengisi waktu kosong, disela-sela tugas prajurit menyempatkan diri berkebun di sekitar pos. Karena sedikit banyaknya diantara prajurit ada yang memiliki pengetahuan tentang bertani, maka kebun yang diusahakan

prajurit pada umumnya tumbuh subur dan buahnya lebat. Hal ini menarik bagi masyarakat sekitar pos untuk mengikuti pola dan cara yang diterapkan prajurit, sehingga secara tidak langsung prajurit telah memberlakukan pemberdayaan masyarakat petani di sekitar pos Satgas Pamtas.

Karena terbatasnya tenaga kesehatan dan obat-obatan di Puskesmas, atau jauhnya letak uskesmas dari tempat tinggal penduduk, tidak jarang masyarakat kemudian berobat pada pos Satgas Pamtas. Disamping memberikan bantuan obat, tenaga kesehatan yang terdapat pada Satuan yang bertugas Pamtas juga melakukan penyuluhan kesehatan pada masyarakat, sehingga kesehatan masyarakat semakin membaik.

Keterbatasan guru di wilayah perbatasan, juga turut dibantu oleh Satgas Pamtas, dimana beberapa prajurit kemudian turut mengajar sebagai guru tidak tetap. Keberadaan prajurit yang turut andil dalam pembelajaran tersebut dengan sendirinya telah membantu pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan.

Di bidang olah raga dan kesenian, personel Satgas Pamtas juga membantu kedua aktifitas tersebut. Seperti dengan membuat sarana olah raga volley, mengajak para pemuda ikut berlatih, mengadakan pertandingan, sehingga bibit olahragawan yang ada di daerah tersebut dapat dikembangkan.

Disamping itu secara bergotongroyong dengan masyarakat, Satgas Pamtas juga melakukan perbaikan dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana, seperti perbaikan rumah ibadah, perbaikan jembatan yang rusak, membuat saluran air, pembuatan pagar, dll. Sehingga kondisi pemukiman masyarakat semakin hari semakin membaik.



BAB IV

Keadaan Wilayah dan Satgas Pemas di Kalimantan



Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN

Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan kedaulatannya baik secara *de facto* maupun *de jure*. Secara geopolitik Indonesia mempunyai batas kontinen dan hubungan bilateral dengan negara tetangga di antaranya negara Malaysia. Batas kontinen negara Indonesia dengan negara Malaysia dalam lingkup daratan berada di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Barat yang terbentang sepanjang 966 kilometer.

Perlu diketahui bersama bahwa continental wilayah Kalimantan Barat berbatasan dengan Sarawak, sedangkan Kalimantan Timur berbatasan dengan Sarawak dan Sabah. Secara geografis Pulau Kalimantan terdapat delapan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu lima kabupaten terletak di Kalimantan Barat dan tiga kabupaten terletak di Kalimantan Timur. Kabupaten tersebut adalah Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu di Kalimantan Barat serta Kutai Barat, Malinau dan Nunukan di Kalimantan Timur.



Peta Pamtas Kodam XII/TJP Kalimantan Barat berbatasan dengan Pamtas Kodam VI/Mulawarman (Sumber Dokumen, Bakosurtanal, *Atlas Tematis Provinsi Kalimantan Barat*, Jakarta, 2006)

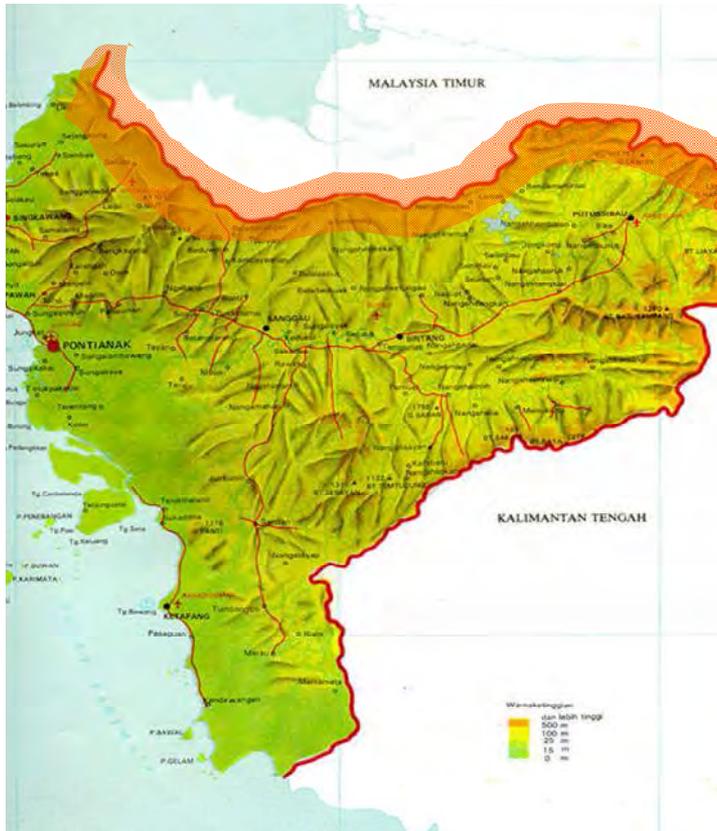
A. Geografi

Secara geografis (topografis), terdapat perbedaan menyolok antara kawasan perbatasan di Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur. Wilayah perbatasan Kalimantan Barat sebagian besar terdiri atas dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut (dpl). Hanya sebagian kecil saja yang terdapat dataran tinggi, yakni di sekitar gunung Niut di Bengkayang dan gunung Lawit di Kapuas Hulu. Keadaan sebaliknya terjadi di wilayah Kalimantan Timur yang sebagian besar kawasan perbatasan terdiri atas dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 1000 meter dpl. Seluruh perbatasan yang melalui Kutai Barat dan sebagian Malinau, yang panjangnya sekitar 70 persen dari semua perbatasan di Kalimantan Timur, merupakan rangkaian pegunungan Iban. Pegunungan ini membujur dari barat daya sampai timur laut yang menghubungkan secara berturut-turut perbukitan Pacungapang, gunung Liang Pran, perbukitan Batu Iban, gunung Latuk dan gunung Kaba. Selanjutnya, ditarik lebih jauh lagi ke arah Timur, sebagian Malinau dan sebagian Nunukan merupakan kawasan perbatasan dataran rendah, dengan ketinggian 100 sampai 200 meter dpl. Sebagian perbatasan lagi di Nunukan adalah perbatasan laut. Bahkan terdapat perbatasan yang melalui sebuah pulau kecil, yakni pulau Sebatik. Bagian utara pulau ini merupakan wilayah Malaysia dan bagian selatan merupakan wilayah Indonesia.

Panjang garis perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak sekitar 847,3 kilometer. Perbatasan tersebut melintasi 98 desa dalam 14 kecamatan di 6 kabupaten. Sekitar 55 desa diantaranya sudah terhubung dengan kampung-kampung di Sarawak melalui lebih kurang 50 jalur setapak (tidak resmi) dan beberapa pos lintas batas resmi di Entikong, Jagoi Babang dan Badau.

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN



Peta Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. (Bappeda Kalbar, 2010)

Dengan anggapan bahwa lebar kawasan perbatasan adalah 20 kilometer, maka luas kawasan perbatasan Kalimantan Barat adalah 16.940 kilometer persegi atau 1.694.000 hektar, sedangkan luas seluruh kecamatan yang dilintasi garis perbatasan adalah 20.351 kilometer persegi. Jumlah penduduk seluruh kecamatan tersebut pada tahun 2000 adalah 159.661 jiwa, sehingga kepadatan penduduk per kilometer persegi wilayah kecamatan di perbatasan adalah 8 orang.



Transportasi darat yang rusak berat, menuntut Satgas Pamantas menggunakan transportasi sungai dalam melaksanakan tugasnya (Sumber Dokumen Disjarahad Thn 2011)

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang mendapat julukan Provinsi "Seribu Sungai". Julukan ini sesuai dengan kondisi geografisnya yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil. Beberapa sungai besar saat sekarang masih dijadikan jalur utama untuk angkutan darat daerah perbatasan, yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Daerah Kalimantan Barat terdiri dari daerah perairan pantai dan sungai, daerah dataran rendah yang dialiri sungai dan hutan yang rapat serta daerah dataran dengan hutan yang luas dan lebat.¹⁰⁾ Sedangkan jalan darat wilayah Kalbar sebagian kecil masih menggunakan jalan tanah yang sulit dilewati oleh kendaraan.

¹⁰⁾ Zeni Dam XII/Tanjungpura, *Tanjung pura Berjuang* Zidam XII/Tpr, Pontianak, 1970, hal 10

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN



Kondisi jalan perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia (Sumber Dokumen, Yonif 641/Beruang Dam XII/Tpr, 2011)

B. Demografi

Kondisi geografis wilayah Kalbar sebagaimana disebutkan di atas, berpengaruh terhadap persebaran penduduk dan kegiatannya di kawasan perbatasan Kalimantan. Persebaran penduduk di kawasan perbatasan lebih banyak terdapat di Kalimantan Barat dibandingkan Kalimantan Timur. Kepadatan penduduk di kawasan perbatasan Kalimantan Barat adalah delapan orang per kilometer persegi, sedangkan di Kalimantan Timur dua orang per kilometer persegi.

Prasarana jalan di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat dengan Negara Bagian Sabah sebagai jalan tikus rawan penyelundupan sembako, illegal logging maupun TKI illegal (Dokumen Disjarahad Thn 2011)



Peranan TNI AD

dalam Pengamanan Perbatasan NKRI

Bila dibandingkan dengan Kaltim, kegiatan lintas batas tradisional melalui jalur darat lebih banyak terjadi di Kalimantan Barat baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, selain pintu lintas batas resmi, di Kalimantan Barat juga terdapat banyak pintu lintas batas tidak resmi, sedangkan di Kalimantan Timur, selain melalui jalur darat, kegiatan lintas batas banyak dilakukan melalui laut, dimana jalur Nunukan-Tawao merupakan jalur lintas batas laut yang paling banyak dilalui. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai kawasan perbatasan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat Sarawak, Tahun 2000

No	Kec	Ibukota	Jumlah desa	Kab	Luas (Ha)	Jumlah penduduk
1	Paloh	Liku	6	Sambas	114.884	21.884
2	Sajingan	Sajingan	5	Sambas	139.120	7.215
3	Besar	Jagoi	5	Bengkayang	121.830	13.956
4	Jagoi	Babang	6	Bengkayang	50.650	12.479
5	Babang	Seluas	10	Sanggau	84.101	23.654
6	Seluas	Balai	5	Sanggau	50.689	11.128
7	Sekayam	Karangan	9	Sintang	213.820	8.105
8	Entikong	Entikong	13	Sintang	218.240	23.213
9	Ketungau	Senaning	5	Kapuas Hulu	35.725	2.737
10	Hulu	Nanga	8	Kapuas Hulu	412.200	7.445
11	Ketungau	Merakai	6	Kapuas Hulu	70.000	4.331
12	Tengah	Nanga	7	Kapuas Hulu	133.290	4.560
13	Empanang	Kantuk	8	Kapuas Hulu	345.760	14.489
14	Putussibau	Putussibau	5	Kapuas Hulu	44.855	4.565
	Badau	Nanga				
	Batang	Badau				
	Lupar	Lanjak				
	Embaloh	Benua				
	Hulu	Martinus				
	Puring Kencana					
			98		2.035.164	159.661

(Sumber Dokumen, Bappeda Parovinsi Kalimantan Barat, data tahun 1988, Pemda Kalbar, 2010)

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN

Secara demografis masyarakat Kalimantan Barat sangat heterogen. Disamping suku dayak yang hidup di daerah aliran sungai dan ditengah hutan belantara, juga dihuni oleh suku Malayu, China, Madura, Jawa, Bugis dan Makassar. Bahkan Kab Singkawang terkenal sebagai salah satu pemukiman orang China di Pulau Kalimantan. Orang-orang pada mulanya bermata pencarian industri kecil, pertanian/ladang berpindah tersebar dari pantai ke pedalaman.

C. Kondisi Sosial

Heterogenitas masyarakat yang tidak diikuti dengan tingkat pendidikan yang baik, ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap proses interaksi, komunikasi dan integrasi sosial ditengah-tengah masyarakat demikian juga halnya terhadap upaya peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme masyarakat lokal. Sistem perekonomian yang terlalu tergantung pada Negara tetangga ternyata mempengaruhi interaksi, komunikasi dan sosialisasi masyarakat lokal.

Kegiatan ekonomi masyarakat perbatasan lebih banyak terkonsentrasi pada sektor pertanian. Sekitar 40 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten-kabupaten perbatasan disumbang oleh sektor pertanian. Sektor pertanian ini meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

Mayoritas mata pencarian masyarakat bertumpu pada sektor pertanian. Di Wilayah pesisir pantai dan tepian sungai banyak warga jadi nelayan. Disamping itu, ada diantaranya yang melakukan kegiatan pengolahan kayu. Hal ini disebabkan karena wilayah Kalimantan Barat memiliki banyak komoditas hutan yang bernilai ekonomis seperti ulin, meranti, ramin, belian (kayu besi), dammar dan rotan. Saat bersamaan industri pengolahan kayu muncul di berbagai daerah pinggir sungai, seperti Pontianak, Sambas, Sanggau, Kapuas Hulu dan

Sintang. Kondisi ini mengakibatkan maraknya kegiatan ilegal logging di masyarakat perbatasan.



Masyarakat pedalaman Kalimantan Barat sangat antusias dalam pelayanan sosial dan kesehatan dari satuan Pamtas TNI AD (Sumber Dokumen, Yonif 641/Beruang Dam XII/Tpr, 2011)

Kegiatan pertanian yang dominan adalah menggarap sawah. Kegiatan perkebunan yang paling banyak digarap masyarakat perbatasan adalah perkebunan karet, kelapa sawit, kakao (coklat) dan lada. Sedangkan perkebunan kopi baru dikembangkan masyarakat di beberapa kecamatan seperti Paloh, Sekayam, Entikong, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Perkebunan sawit baru berkembang di Ketungau Tengah, Ketungau Hulu dan Badau, sedangkan kegiatan peternakan hampir merata di semua kecamatan, terutama untuk peternakan sapi, kambing, babi, ayam dan itik.

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN



Pemerintah Provinsi Kaltim Tengah Menggalakan Penanaman Kelapa Sawit di Kawasan yang dianggap Memiliki Potensi, Para Petani Telah Menerima Bibit Kelapa Sawit.
(Foto Majalah Tanjungpura Edisi 2010)

Sarana transportasi darat yang menghubungkan daerah-daerah di wilayah perbatasan terdapat lebih kurang sepanjang 520 kilometer. Dilihat dari kondisinya, maka jalan tersebut terdiri dari sekitar 290 kilometer jalan aspal, 30 kilometer jalan batu dan 200 kilometer jalan tanah. Arah jalan pada umumnya vertikal terhadap perbatasan, berbeda dengan jalan di Sarawak yang horizontal terhadap perbatasan. Jumlah kendaraan yang melakukan perjalanan keluar-masuk perbatasan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.



Kondisi jalan transportasi darat wilayah Malaysia (arah Kuching-Sabah) dekat perbatasan dengan RI di Kalimantan Barat (Sumber Dokumen, Yonif 641/Beruang Dam XII/Tpr, 2011)

Fasilitas penunjang yang tersedia saat ini sekitar 50 persen penduduk sudah mendapatkan pelayanan listrik. Hal ini menunjukkan besarnya perbedaan kesejahteraan masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dengan masyarakat perbatasan di Sarawak, yang hampir seluruhnya telah mendapatkan pelayanan listrik. Kondisi tersebut ternyata terjadi pula pada fasilitas air bersih yang hanya mampu melayani 50 persen penduduk di kawasan Kalimantan Barat, sedangkan penduduk perbatasan di Sarawak telah terpenuhi 100 persen fasilitas air bersihnya.

Di samping dipenuhi hutan belantara, Kalimantan Barat juga memiliki potensi SDA seperti barang tambang. Kandungan Bauksit terdapat di pesisir Barat Daya dan Tayan sebelah Timur Pontianak. Kegiatan penambangan emas di Sambas sudah

dilakukan sejak zaman Belanda, sedangkan cadangan minyak bumi terdapat di Melawi.

D. Kerawanan-kerawanan

Hingga saat ini, pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan masih tertinggal bila dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lainnya. Jika dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia, kesenjangan terlihat dengan jelas pada berbagai aspek kehidupan, baik aspek infratraktur, sosial, maupun ekonomi. Ditinjau dari aspek keamanan (*security*) kondisi ini sangatlah rawan, karena wilayah perbatasan Kalimantan merupakan wilayah strategis yang mudah terinfiltrasi secara langsung maupun tidak langsung oleh negara lain, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun kultural. Secara jelas isu dan permasalahan yang terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan dijelaskan sebagai berikut :

- Tingginya harga kebutuhan pokok di kawasan perbatasan Kalimantan yang menyebabkan tingginya tingkat kesenjangan wilayah bila dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga (Sabah dan Serawak di Malaysia).
- Terbatasnya sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan telekomunikasi di kawasan perbatasan Kalimantan yang menyebabkan wilayah ini memiliki aksesibilitas yang rendah dan terisolasi dari wilayah sekitarnya.
- Pemekaran wilayah yang tidak diikuti dengan kesiapan aparat dan sumber daya manusianya.
- Degradasi sumberdaya alam yang berdampak pada kerusakan ekosistem alam dan hilangnya keanekaragaman hayati.

- Lunturnya rasa nasionalisme dan rendahnya kesadaran politik masyarakat perbatasan Kalimantan akibat sulitnya jangkauan pembinaan dan adanya peluang ekonomi di Malaysia.
- Terancam dan berkurangnya batas wilayah RI di kawasan perbatasan Kalimantan akibat pergeseran patok oleh pribumi yang di iming-imingi modal.
- Rendahnya tingkat kesadaran hukum dan terbatasnya pos-pos perbatasan menyebabkan pelanggaran lintas batas dan tindakan kriminal lainnya (*illegal logging*).



Satgas Pamtas
Tengah
Mengamankan
Hasil Tangkapan
Illegal logging,
(Majalah
Tanjungpura,
Edisi 2010)

- Globalisasi Ekonomi dan perdagangan bebas menyebabkan produk-produk kawasan perbatasan Kalimantan tidak mampu bersaing dengan produk-produk wilayah tetangga, sehingga masyarakat perbatasan mayoritas menggunakan produk Malaysia guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Tingkat kesehatan, pendidikan dan ketrampilan penduduk di kawasan perbatasan Kalimantan umumnya masih rendah.

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN

Potensi sumber daya alam dan kekayaan laut yang dimiliki Kalimantan Barat yang berbatasan dengan wilayah Malaysia Timur (Serawak) pada hakikatnya menimbulkan berbagai macam kerawanan, Masyarakat wilayah Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia pada hakikatnya sangat rawan dengan penyeberangan tapal batas, penyelundupan, pencurian kekayaan alam (hutan dan sungai) serta tindakan provokasi lainnya. Perbedaan kondisi sosial ekonomi yang demikian sangat menyolok antara masyarakat Kalimantan Barat dengan kegiatan provokasi, intervensi dan agitasi yang merugikan kedaulatan negara dan bangsa sendiri.

Kerawanan selanjutnya berkenaan dengan tidak seimbangnya antara jumlah personel yang dilibatkan dalam kegiatan perbatasan dengan panjangnya wilayah perbatasan yang ± 966 kilometer.¹¹⁾ Kerawanan tersebut diakibatkan juga oleh adanya arus pelintas batas antara RI dan Malaysia. Dari data yang diperoleh sepanjang bulan September 2010 sebagai berikut : Dari Indonesia ke Malaysia, kendaraan : 24 Unit. Penumpang 721 Orang, TKI Nihil. Data pelintas batas Via TPI Entikong WNI 612 Orang Lk : 200 Orang. 412 Orang. WNA 32 Orang. Lk 20 Orang. Pr 12 Orang. Sedangkan dari Malaysia ke Indonesia. Kendaraan 17 Unit Penumpang 419 Orang. TKI Nihil dan Data pelintas batas Via TPI Entikong WNI 857 Orang 546 Orang Pr 310 Orang, WNA 54 Orang Lk 30 Orang Pr 24 Orang¹²⁾.

E. Satgas Pamtas

Kawasan perbatasan Kalimantan dapat dipandang berbentuk kerucut dengan ujung barat daya dan timur laut yang bersentuhan dengan lautan sebagai kakinya dan puncaknya berada diantara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur.

¹¹⁾ Lihat Republika, "TNI Evaluasi Pos Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia", Sabtu 26 Februari 2011.

¹²⁾ Puskodal, *Laporan Puskodalops Kodam XII/TPR Nomor : R/12/X/2010*.

Kebijakan pengembangan fungsi pertahanan keamanan pada kawasan perbatasan ini bukan semata-mata diarahkan pada kebijakan strategis militer seperti pengamanan wilayah NKRI, namun lebih bersifat kepada kebijakan strategis yang terkait dengan pengamanan dan penjagaan batas-batas wilayah RI secara konsisten. Penguatan fungsi pertahanan lebih diarahkan untuk penetapan patok-patok perbatasan dan penyelesaian kepemilikan pulau-pulau yang menjadi sengketa, untuk tetap mempertahankan batas wilayah RI.

Menetapkan batas wilayah perbatasan RI secara tegas dan jelas melalui penetapan kembali patok-patok perbatasan dan pembicaraan secara intensif dengan pemerintah Negara Malaysia mengenai kepemilikan pulau-pulau yang masih menjadi sengketa.

Penegasan patok-patok perbatasan wilayah negara harus dilakukan bersama-sama dengan pemerintah Malaysia. Peletakan patok batas dengan sistem koordinat bumi merupakan salah satu pendekatan yang menjamin batas suatu negara dan tidak bergantung pada patok batas secara fisik (tidak terpengaruh oleh pergeseran patok batas secara fisik).

Berdasarkan ketentuan, pengembangan batas negara dengan sistem koordinat bumi ini harus disepakati oleh kedua negara, dan harus disosialisasikan kepada masyarakat kedua belah pihak. Ketegasan patok batas negara ini berhubungan erat dengan jaminan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan. Ketegasan patok batas berarti kejelasan wilayah hukum negara, sehingga kegiatan pembangunan yang ada akan mendapatkan kejelasan rujukan hukum yang harus dipatuhinya. Pemindahan patok-patok perbatasan dan pengambilalihan pulau-pulau kecil oleh negara tetangga. Oleh karena itu menetapkan batas wilayah perbatasan RI secara tegas dan jelas melalui penetapan kembali patok-patok perbatasan dan pembicaraan secara intensif dengan pemerintah

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN

Negara Malaysia mengenai kepemilikan pulau-pulau yang masih sengketa menjadi strategi dalam pengelolaan perbatasan Kalimantan ini.

TNI AD memiliki tugas menjaga kedaulatan daratan yang dilakukan selain dengan operasi militer untuk perang juga dengan operasi militer selain perang, yang meliputi 14 tugas yang diemban salah satunya yaitu mengamankan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga Malaysia kurang lebih memiliki 55 pos perbatasan dan 32 pos perbatasan di antaranya berada di Kalimantan Barat.

Sebanyak 32 pos-pos perbatasan Kalimantan Barat, merupakan wilayah Kodam XII/Tanjungpura, di antaranya pos-pos tersebut berada di wilayah Korem 121/Abm, Kodim 1205/Sintang, Kodim 1206/Putussibau, Kodim 1202/Singkawang dan Kodim 1204/Sanggau, Koramil 21/Entikong meliputi 2 pos perbatasan dan Koramil 02/Balai Karanganyang meliputi 3 pos perbatasan.

Secara geografis, wilayah Kalimantan berbatasan darat dengan wilayah Malaysia, namun tidak semua wilayah Kalimantan berbatasan dengan wilayah Malaysia. Wilayah Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia Timur adalah wilayah Kalimantan Barat dan Kaltim. Wilayah Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia adalah khususnya Kab. Sambas, Kab Sanggau, Kab Kapuas hulu, Kab Sintang, Kab Sekadan dan Kab Bangka, sedangkan wilayah Kalimantan yang berbatasan darat dengan Malaysia adalah Kab Araliku dan Amalukan yang berbatasan dengan negara Sabah dan Serawak.

Peranan TNI AD
dalam Pengamanan Perbatasan NKRI



Patroli Patok batas negara dilakukan salah satunya via jalan sungai
(Sumber Dokumen, Yonif 641/Br Dam XII/Tpr 2010).

Hal yang mendasari dilaksanakannya pengamanan perbatasan mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2010-2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN

Perbatasan. Renyudha TNI Tahun 2011. Perpang TNI Nomor Perpang/12/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Ops Pamtas.



Pasukan Pamtas TNI AD tengah memeriksa patok batas wilayah RI dan Malaysia. (Sumber Dokumen, Yonif 641/Beruang Dam XII/Tpr, 2011)

Selain itu juga berdasarkan kepada Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/365/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang perintah melaksanakan Pratugas Pamtas RI - Malaysia. Telegram Panglima TNI Nomor TR/430/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang perintah memberangkatkan Satgas Ops Pamtas Yonif 641/Bru dan purna tugas Satgas Ops Pamtas Yonif 642/Kps. Surat Perintah Panglima TNI Nomor : Sprin/2628/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang perintah merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan operasi pengamanan perbatasan wilayah darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat Tahun 2011. Rencana Tindakan Kodam XII/Tpr menghadapi Kontinjensi Tahun 2011.

Sejak tahun 2005 satuan-satuan TNI AD yang melaksanakan pengamanan perbatasan adalah sebagai berikut : Tahun 2005-2006, Yonif 642/Kps dipimpin oleh Letkol Inf Basri. Tahun 2006-2007, Yonif 621/Mtg dipimpin oleh Letkol Inf Wim Mulyadi Purba. Tahun 2007-2008, Yonif 641/Bru dipimpin oleh Letkol Inf Chanlan Adilanen Tahun 2008-2009, Yonif 643/Wns dipimpin oleh Letkol Inf Makmur. Tahun 2009-2010, Yonif 642/Kps dipimpin oleh Letkol Inf Gausudin Amin. Tahun 2010-2011 (sekarang) Yonif 641/Bru dipimpin oleh Letkol Inf Tri Saktiono.

Pada tahun 2010 TMT 31 Agustus Pamtas Kalimantan Barat di kerahkan satuan Batalyon Infanteri 641/Beruang Dam XII/Tanjungpura, berdasarkan Surat Perintah Pangdam XII/Tanjungpura Nomor 141 Bulan Agustus 2010 untuk melaksanakan pengamanan perbatasan RI - Malaysia selama 365 hari.

Menurut Dansatgas perbatasan sekaligus Danyon 641/BRU Letkol Inf Tri Sakti, gelar pasukan yang dilakukan terdiri dari 33 pos dari ujung Barat s.d ujung Timur yang meliputi 5 Kab dengan jarak 966 km. Dari 966 km wilayah perbatasan Kalimantan Barat 200 km merupakan daerah blank spot.¹³⁾

Lebih 966 kilometer (km), yakni mulai dari Tanjung Datuk di Kabupaten Sambas hingga Gunung Cemeru di Kabupaten Kapuas Hulu. Panjang perbatasan tersebut mencakup sekitar 70,58% dari 1.200 km garis perbatasan kedua negara di Pulau Kalimantan.

Dari 966 km panjang perbatasan darat itu, masih terdapat sekitar 200 km yang tanpa penjagaan aparat keamanan Indonesia. Oleh karena itu, Markas Besar (Mabes) TNI merencanakan

¹³⁾ Daerah blank spot, adalah daerah yang sulit dijangkau karena kondisi wilayahnya penuh hutan lebat dan tidak ada jalan. Ini sesuai dengan paparan Dansatgas Pamtas, tanggal 27 Mei 2011 di Mako Satgas Pamtas Entikong.

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN

penambahan sejumlah pos pengamanan di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat tersebut.



Kesiapan pasukan Pamtas dalam menghadapi situasi kritis diperbatasan (Dokumen Pussen TNI, 2010)

F. Tugas Pokok

Satgas Pamtas.

- Menciptakan stabilitas keamanan di sepanjang perbatasan wilayah darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan.
- Menjamin keutuhan wilayah di perbatasan dengan tidak terjadi pergeseran/hilangnya patok batas, mewujudkan wilayah yang bebas dari pelanggaran pelintas batas, penebangan kayu illegal dan penyelundupan.
- Mencegah terjadinya penyelundupan bahan peledak dari Malaysia ke Indonesia.

Satgas Ter.

- Mencegah, mengamankan, menindak setiap usaha pererusakan dan pergeseran serta penghilangan patok-patok disepanjang perbatasan.

- Mencegah dan menindak setiap usaha pengrusakan dan pencurian kekayaan sumber daya alam nasional disepanjang perbatasan.
- Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan lintas batas kedua negara dan menindak setiap pelaku pelanggaran di daerah perbatasan.
- Melaksanakan kegiatan Binter kepada masyarakat perbatasan, melaksanakan kegiatan Intelijen/Monitoring di daerah perbatasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran perbatasan.



Salah satu Pos Pamtas Permanen, Entikong (Sumber Dokumen, Yonif 641/Beruang Dam XII/Tpr, 2011)

Satgas Intel.

- Memonitor pelaksanaan operasi di sepanjang wilayah darat perbatasan darat RI dengan Malaysia di Kalimantan Barat.
- Memberikan informasi tentang upaya-upaya pelanggaran batas dan kegiatan illegal di daerah batas kepada satuan pelaksana operasi.
- Memonitor kondisi stabilitas keamanan di daerah perbatasan RI-Malaysia.

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN

- Melaksanakan penggalangan terhadap masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.

Tim Penerbad (BKO).

- Melaksanakan tugas penerbangan sebagai berikut: Kodal Pangdam XII/Tpr, patroli udara, pergeseran pasukan dan evakuasi udara serta pemeliharaan sarana dan kapal penerbad.

G. Dislokasi

Adapun gelar pasukan Pamtas diwilayah Kalimantan Barat Didislokasikan pada 33 pos Pamtas, 31 Pos diwilayah RI dan 2 Pos diwilayah Malaysia.

Peta Dislokasi
Pamtas
Satuan TNI AD
2011
(Sumber
dokumen,
Yonif
641/Beruang
Dam XII/Tpr,
2011)



**Dislokasi Pos Pamtas Yonif 641/Beruang
Tahun 2010-2011**

NO	NAMA POS	KUAT	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	POS GAB		
1	Entikong (Kotis)	57	
2	Balai Karang (Kout)	40	
	KOMPI A		
3	Nanga Badau	25	
4	Pos Gabma Lubuk Antu	10	
5	Merakai Panjang	18	
6	Klawik	18	
7	Langau	19	
8	Ensanak	15	
9	Seriang	15	
10	Guntul	15	
11	Kantuk Asam	18	
	KOMPI B		
12	Sajingan Besar	24	
13	Temajuk	19	
14	Jagoi Babang	20	
15	Pos Gabma Biawak	10	
16	Siding	15	
17	Kumba Semunying	15	
18	Sei Bening	13	
19	Sei Tengah	13	
20	Berjongkong	14	
21	Seluas	13	
	KOMPI C		
22	Sei Daun	25	
23	Segumun	16	

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN

24	Sei Tekam	18	
25	Sei Beruang	24	
26	Gutembawang	18	
	KOMPI D		
27	Nanga Bayan	27	
28	Enteli	25	
29	Kampung Jasa	23	
30	Semareh	23	
31	Nanga Seran	25	
32	Senaning		

H. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan satuan pengamanan perbatasan Kodam XII/Tpr di wilayah Kalimantan Barat salah satunya adalah menjaga patok-patok batas negara RI dan Malaysia. Banyak patok batas Negara yang hilang, rusak dan bergeser ke dalam wilayah RI, yang tentunya sangat merugikan kedaulatan Negara kesatuan RI.



Patok-patok batas negara RI dan Malaysia yang rusak berat
(Sumber Dokumen, Yonif 641/Beruang Dam XII/Tpr, 2011)

Kegiatan Satgas Pamtas lainnya yaitu melaksanakan pengamanan penyelundupan barang-barang ilegal. Sebagaimana kita ketahui bersama, dari data Pamtas bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 dilaksanakan penyerahan senjata api rakitan oleh Sdr. Eko alamat Ds. Lubuk Pantantak Kec. Ketungau Hulu kepada Dankipan D Satgas Pamtas Yonif 642/Kps di Pos Nanga Bayan.

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN



Barang bukti hasil operasi Pasukan Pamtas di wilayah Kalimantan Barat
(Sumber Dokumen, Yonif 641/Beruang Dam XII/Tpr, 2011).

Kegiatan lainnya pada tanggal 6 September 2010 pukul 13.00 WIB telah ditemukan 1 unit mobil merah merk Kembara dengan Nopol QMD 3923 No. Mesin 05300 dan No. Rangka 214020 05857 03-08828 dengan posisi sedang diparkir tersembunyi di semak-semak, setelah diadakan pemeriksaan dapat diambil kesimpulan bahwa mobil tersebut adalah hasil kegiatan illegal. Barang bukti yang didapatkan Satgas Pamtas selanjutnya diserahkan dan diamankan di Mapolsek Jagoi Babang.

Peranan TNI AD
dalam Pengamanan Perbatasan NKRI



Kendaraan bermotor hasil operasi Pamtas TNI AD di wilayah Kalimantan Barat
(Sumber Dokumen, Yonif 641/Beruang Dam XII/Tpr, 2011)

Pada tanggal 13 September 2010 pukul 12.00 WIB 2 orang WNI yang bernama Sdr. Petrus Tamek, umur 38 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Kec. Galing Kab. Sambas Kalbar dan Sdr. Antonius Herry, umur 25 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Dsn. Sawah Ds. Sawah Kec. Sajingan Kab. Sambas Kalbar ditahan oleh pihak Polis Malaysia sekembalinya dari Biawak dari kunjungan keluarga karena ditemukan minuman beralkohol jenis Stella sebanyak 12 kotak, Kingway 4 kotak paket per 1 Kg dan 1 karung 50 kg gula bersubsidi didalam kendaraan yang mereka gunakan yaitu 1 unit mobil Daihatsu Xenia Nopol KB 1221 P dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol KB 5285 P. Untuk kedua WNI tersebut masih ditahan di Balai Polis Lundu Malaysia sedangkan mobil dan sepeda motor milik WNI tersebut telah diserahkan kepada keluarganya.

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN

Pada tanggal 19 September 2010 pukul 17.00 waktu Malaysia telah ditahan 5 (lima) orang masyarakat Desa Kantuk Asam Kalbar di daerah Kampung Nanga San pada saat berbelanja ke Lubuk Antu Malaysia oleh patroli gabungan TDM dan PDRM yang dipimpin oleh Kapten Azrul karena pada saat diperiksa tidak memiliki PLB (Pas Pelintas Batas), kelima WNI tersebut bernama Sdr. Syahudin umur 42 tahun, Sdri. Nurhayati umur 38 tahun, Sdr. Iwan umur 8 tahun, Sdr. Marius umur 19 tahun dan Sdr. Pantan umur 19 tahun dimana semuanya merupakan warga Desa Kantuk Asam. Pada tanggal 21 September 2010 Pukul 16.00 WIB, kelima WNI yang ditahan pihak imigrasi Malaysia telah dikembalikan kepada keluarganya.



Kendaraan hasil operasi Pamtas TNI AD di wilayah Kalimantan Barat
(Sumber Dokumen, Yonif 641/Beruang Dam XII/Tpr, 2011)

Pada tanggal 20 September 2010 pukul 12.00 waktu Malaysia 2 orang WNI yang bernama Sdr. Menesei, umur 49

tahun, pekerjaan Swasta, warga Desa Sei Utik Kalbar Indonesia dan Sdr. Lasan AK, umur 25 tahun, pekerjaan Swasta, warga Desa Sei Utik Kalbar Indonesia ditahan oleh Pos PJL (Polisi Malaysia) Lubuk Antu pimpinan Letnan Agom saat kembali dari Malaysia menuju Indonesia karena membawa munisi senjata lantak (bomen) sebanyak 13 kotak yang dibeli di Enkelili Malaysia dengan harga RM 200 perkotaknya.

Pada tanggal 9 Oktober 2010 pukul 16.00 WIB sepuluh anggota Polres Bengkayang DPP Kasat Reskrim Akp Dagia dan 5 (lima) orang anggota Pos Libas Jagoi Babang Satgas Pamtas Yonif 641/Bru DPP Letda Inf Alfian Erwin. SK NRP 11070066430486 Danpos Jagoi Babang Satgas Pamtas Yonif 641/Bru melaksanakan Patroli Gabungan dan menemukan dua unit mobil silver dengan merk Kembara dengan Plat Nomor QAP 5174 dan QAC 2420 dan satu unit merk Katana hitam tanpa Plat Nomor dengan posisi sedang di sembunyikan di semak-semak serta terdapat tersangka yang diduga sebagai pengguna atau pengedar Narkoba An. Jon (warga Serikin Malaysia) umur 28 tahun dan Nurmayanti atau Ji'a (warga Jagoi Babang) umur 22 tahun, pelaku dan barang bukti ditahan di Polres Bengkayang.

Pada tanggal 9 September 2010 pukul 22.00 WIB anggota Pos Dalduk Kout Yonif 641/Bru Kec. Kenaman DPP Sertu Kardiman beserta enam orang anggota menghentikan 1 unit Mobil Avanza mencurigakan dengan No. Pol KB 1566 HK yang melintas di depan Pos Dalduk Kout dan menemukan 2 buah senjata tajam (parang), 1 pucuk pistol revolver rakitan, 2 munisi pistol, dan tujuh orang yang dicurigai sebagai komplotan perampok, pelaku diserahkan ke Polsek Sekayam.

Pada tanggal 31 Oktober 2010 pukul 13.45 WIB anggota Pos Klawik Satgas Pamtas Yonif 641/Bru DPP Sertu Teguh Wahyono dengan kekuatan delapan orang melaksanakan patroli gabungan dengan anggota Koramil lanjak, Polsek Lanjak dan

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN

Polhut Lanjak ke daerah Pulau Majang dengan Co.1068-0004 dan menemukan jenis kayu ukuran 2 X 18 Cm sebanyak 200 batang, jenis kayu ukuran 2 X 20 Cm sebanyak 200 batang, kayu gelondong/bulat diameter 8,40 Cm sebanyak 20 batang di amankan di TKP Pulau Majang di Co. 1068-0004 dan barang bukti berupa alat gergaji mesin jenis Senzo sebanyak 5 buah, jerigen miyak 20 liter sebanyak 2 buah, Gancu sebanyak 1 buah, penggaris siku 2 buah, tersangka penebangan liar dan barang bukti ditahan di Polhut Lanjak.



Barang-barang smokel yang berhasil di sita pasukan
Pamtas wilayah di Kalimantan Barat
(Sumber Dokumen, Yonif 641/Beruang Dam XII/Tpr, 2011)

Pada tanggal 10 November 2010 pukul 23.00 WIB personel Pos Seluas melaksanakan Swepping setelah mendapat informasi adanya imigran gelap yang lolos dari Pos

Jagoi Babang dengan menggunakan Mobil Avanza Warna Silver Putih No Pol KB 1376 CL, setelah sampai di Pos Seluas Mobil tersebut ditahan oleh anggota Pos namun mobil tersebut melaju kencang sehingga mobil tersebut lolos, dengan demikian anggota pos Seluas melaksanakan pengejaran namun tidak tertangkap.

Selanjutnya Pos Seluas menghubungi anggota Polres Bengkayang untuk melakukan pengecekan mobil tersebut, dan pada pukul 01.15 WIB anggota Polres Bengkayang berhasil menangkap dan menahan Mobil tersebut setelah diinterogasi ternyata yang menumpang mobil tersebut adalah imigran gelap berjumlah 6 (enam) orang mobil tersebut dikendarai oleh Sdr Firman Sembiring (pecatan Polisi) dan Sdr Alek Dwika (Pecatan TNI). Adapun ke 6 (Enam) orang Imigran gelap tersebut adalah: Sdr. Ahmad Abdulrahman Husen Mubarrok, Lahir di Baqdad, 09 Juli 1988, jenis kelamin laki - laki, agama Islam, WN Irak. Sdr. Ali umur 27 Thn jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, WN Irak. Sdr. Mohamed Umur 24 Thn, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, WN Irak. Sdri. Dalyah Umur 24 Thn jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, WN Irak. Lyath Umur 4 Thn jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, WN Irak. Baqir Umur 3 Thn jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, WN Irak. Dan 2 (dua) orang WNI yang membawa Imigran tersebut atas nama : yaitu Firman Sembiring (Pecatan Polisi) Warga Senakin Kec. Senakin Kab. Landak dan Alek Dwika (pecatan TNI) warga Senakin RT 003 Ds. Senakin Kec. Sengah Temila Kab. Landak.

Pada tanggal 27 November 2010 pukul 10.00 WIB patroli gabungan TNI dan TDM melaksanakan patroli gabungan dengan kekuatan 4 orang DPP Serda Sugianto menangkap WN Malaysia An. Chew Choe Kiong No IC 750301-13-5981 alamat pasar Lubuk Antu Serawak beserta 4 orang karyawan yang sedang mengantar barang pesanan menggunakan Truk Malaysia berupa Gas elpiji 11 buah, Semen 50 Sak, Bensin 45 Ken @ 25 liter dan

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN

Solar 31 Ken @ 25 liter. Barang tersebut merupakan pesanan warga Badau yang akan diperjualbelikan di wilayah Badau. Barang bukti beserta 1 unit Truk Malaysia diamankan di Pos Lubuk Antu dan untuk WN Malaysia di pulangkan ke Lubuk Antu Malaysia.



Penyelundupan sapi dan orang-orang asing yang berhasil digagalkan satuan Pamtas di wilayah Kalimantan Barat
(Sumber Dokumen, Yonif 641/Beruang Dam XII/Tpr, 2011)

Pada tanggal 2 Desember 2010 Pos Siding melaksanakan patroli wilayah dan menemukan penebangan liar dengan hasil sebagai berikut : 10 keping papan jenis pelanjau ukuran 3 x 22 dengan panjang 2,5 meter. 5 batang kayu balok jenis pelanjau ukuran 3 x 22 meter dengan panjang 2,5 meter. 39 batang jenis belian dengan ukuran 6 x 6 meter dengan panjang 3 meter. 15

keping kayu papan ukuran 3 x 22 meter dengan panjang 2,5 meter.

Pada tanggal 15 Desember 2010 dilaksanakan upacara Hari Juang Kartika di perbatasan Malindo bertempat di BLK Entikong dengan Irup Pangdam XII/Tpr dilanjutkan kunjungan ke Pos Gabma Entikong. Kegiatan sosial dan pengobatan massal berupa : Pemberian bantuan hewan ternak. Pemberian bantuan sembako Melaksanakan donor darah. Melaksanakan sunatan massal.

Pada tanggal 17 s.d 21 Desember 2010 dilaksanakan Patroli Terkoordinasi antara TNI AD (Satgas Pamtas Yonif 641/Bru) dan TDM di wilayah perbatasan Kantuk Asam.

Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 pukul 10.00 WIB, anggota jaga Dalduk Pos Nanga Badau menghentikan 1 unit mobil mencurigakan merek Kancil berwarna biru yang melintasi Pos Dalduk simpang empat Badau, setelah dilaksanakan pemeriksaan dan pengecekan diketahui bahwa mobil yang dikendarai oleh Sdr. Ramin tersebut merupakan mobil illegal yang berasal dari Malaysia serta dan tidak dilengkapi dengan surat menyurat maupun dokumen yang lengkap. Pemilik mobil tersebut adalah Sdr. Yulius warga Setanggang dimana yang bersangkutan mengaku membelinya dari orang Malaysia yang tidak diketahui identitasnya pada tanggal 22 Desember 2010, seharga Rp 8.000.000,-, Dankipan A Satgas Pamtas Pamtas Yonif 641/Bru melaksanakan koordinasi dengan pihak Polsek Badau dengan menyerahkan mobil sebagai barang bukti beserta pengendaranya guna proses lebih lanjut.

Pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 pukul 13.00 WIB, anggota pos Jagoi Babang Satgas Pamtas Yonif 641/Bru dengan kekuatan 5 orang Dpp. Lettu Inf Dedi Harnoto melaksanakan patroli wilayah di Kv. 8548 yang merupakan jalur

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN

penyelundupan kendaraan illegal dari Malaysia dan berhasil menangkap A.n. Faisal umur 25 tahun alamat Jl. Bangum Kec. Seluas Kab. Bengkayang dan 1 unit sepeda motor jenis Wave 100 R warna kuning tanpa plat nomor dan surat - surat yang diselundupkan dari Malaysia di Co. 8524 – 4816. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa sepeda motor tersebut diambil di perbatasan dari warga Malaysia A.n. Asiang, umur 35 tahun alamat Serikin Malaysia pekerjaan tidak diketahui, rencananya kendaraan tersebut akan dijual kembali oleh tersangka di Kecamatan Seluas. Barang bukti beserta tersangka selanjutnya diserahkan ke Polsek Jagoi Babang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2011 pukul 10.00 WIB, rombongan Tim Komisi A Provinsi Kalbar Pimpinan Bapak Retno beserta 6 orang lainnya tiba di Kantor Kec. Entikong, Ketua Tim Komisi A melaksanakan pembahasan tentang perpindahan masyarakat Entikong ke Malaysia, informasi tentang penyelundupan dari Malaysia ke Indonesia dan pemekaran Kabupaten baru yang bernama Kab. Sekayam Raya, kegiatan berlangsung dengan aman dan tertib.

Pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 pukul 16.00 WIB, anggota Pos Pamtas Nanga Badau Satgas Pamtas Yonif 641/Bru dengan kekuatan 2 orang Dpp. Kopda Ratmin melaksanakan pengendapan di wilayah Sebindang yang merupakan jalur penyelundupan kendaraan illegal dari Malaysia. Pengendapan berhasil menggagalkan penyelundupan 2 unit sepeda motor illegal jenis Wave 100 R warna hitam dengan plat nomor QAP 5848 dan QAK 124 warna hitam silver tanpa surat-surat yang lengkap. Barang bukti beserta tersangka selanjutnya diserahkan ke Polsek Nanga Badau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2011 pukul 01.20 WIB, anggota Pos Pamtas Jagoi Babang A.n. Praka Alex dan Praka

Dirham ikut serta dengan Kapolres Bengkayang yang melaksanakan kegiatan penangkapan 2 orang WN Malaysia di wilayah Jagoi Take Kec. Jagoi Babang di Co.8347-4640 A.n. Lim Ham Ming (laki-laki) umur 39 tahun agama Budha suku Tionghoa alamat Kuching Sarawak dan Sharley Ak Asen (perempuan) umur 23 tahun agama Budha suku Dayak alamat Serikin Sarawak, adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 2 unit mobil jenis Mitsubishi Pajero dan Mitsubishi Ceriot, 2 unit SPM jenis RX King KB 2796 C dan Jupiter MX KB 5147 PQ serta narkoba jenis sabu- sabu seberat 1,5 gram. Barang bukti dan tersangka langsung diamankan di Polres Bengkayang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2011 pukul 16.00 WIB, Danpos Merakai Panjang Letda Kav Miftahurohman NRP 11080118730886 menahan kendaraan jenis mobil Hilux warna silver dengan plat no QKN 4787 yang akan masuk ke wilayah Indonesia milik Kades Merakai Panjang A.n. Sdr. Rupinus Remong. Kendaraan mobil jenis Hilux warna silver dengan plat No. QKN 4787 tersebut ketika melewati pemeriksaan Pos Pamtas Merakai Panjang tidak dilengkapi administrasi dan melintas melalui jalan yang tidak resmi serta tidak dilengkapi surat dari bea cukai maka oleh anggota pos merakai panjang mobil tersebut ditahan tetapi keesokan harinya pemilik mobil Hilux warna silver dengan plat no QKN 4787 membawa dan menunjukkan surat-surat kendaraannya. Barang bukti mobil jenis Hilux warna silver dengan plat no QKN 4787 diserahkan ke Polsek Puring Kencana dengan "berita acara serah terima" Barbuk selanjutnya dikembalikan ke pemiliknya setelah membuat pernyataan untuk digunakan keperluan pribadi.

Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 pukul 12.35 WIB telah melintas sebuah Hellycopter warna biru putih milik Polis Diraja Malaysia (PDRM) di wilayah udara Indonesia tepatnya di Dsn. Aruk Ds. Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas.

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN

Helicopter berputar 2 kali di wilayah udara Indonesia kemudian kembali ke wilayah Malaysia.

Selain itu juga dilaksanakan Gerakan Patroli. Patroli jarak dekat dilaksanakan secara rutin dengan kekuatan 5 orang s.d. 1 regu. Jarak yang ditempuh antara 5-10 km disepanjang garis perbatasan sekitar pos pengamanan perbatasan masing-masing. Waktu yang dibutuhkan 6-8 jam. Adapun yang menjadi sasaran adalah pengecekan patok-patok perbatasan. Mendeteksi penyelundupan barang, orang, kayu dan kegiatan-kegiatan illegal lainnya.

Sedangkan kegiatan Patroli jarak jauh. Dilaksanakan 1 atau 2 kali dalam seminggu dengan kekuatan 1 regu. Jarak yang ditempuh antara 10 s.d. 25 km di sepanjang garis perbatasan sekitar pos pengamanan perbatasan masing-masing. Waktu yang dibutuhkan 1 s.d. 3 hari. Sasaran : Pengecekan patok-patok perbatasan. Mendeteksi penyelundupan barang, kayu dan kegiatan-kegiatan illegal lainnya. Patroli gabungan TNI AD dan TDM. Dilaksanakan 1 kali dalam seminggu oleh personel pengamanan dari anggota TNI AD dan TDM dalam pos Gabma dengan kekuatan 1 regu. Jarak yang ditempuh antara 5 s.d. 6 km disekitar garis perbatasan RI - Malaysia. Waktu yang dibutuhkan 6 s.d. 8 jam. Sasaran : Pengecekan patok-patok perbatasan. Mendeteksi penyelundupan barang, kayu dan kegiatan-kegiatan illegal lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan perbatasan terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dan satuan terkait untuk mengatasainya sebagai berikut : Hambatan. Radio komunikasi SSB sering mengalami gangguan karena faktor cuaca dan kondisi accu sudah drop. Infrastruktur jalan di wilayah perbatasan masih menjadi kendala untuk melaksanakan dorlog ke beberapa pos (pos-pos yg berada di sektor Kab. Sintang, pos Guntembawang dan pos Temajuk).

Kendaraan yang menjadi inventaris pos Pamtas rata-rata sudah mengalami kerusakan. Sedangkan upaya Mengatasinya adalah menggunakan handphone dan pengadaan accu serta genset dengan swadaya satuan. Menyewa kendaraan motor air (speed/perahu) milik masyarakat dan memanfaatkan kuli panggul. Menggunakan kendaraan satuan untuk operasional pasukan dan melakukan perbaikan kendaraan inventaris pos dengan swadaya satuan.

I. Hasil yang dicapai

Dibeberapa Pos pengamanan anggota TNI AD Yonif 641/Brw yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan perbatasan di wilayah Sambas sedang melakukan kegiatan patroli. Dalam keadaan siaga, bola matanya yang liar mengikuti arah laras M-16 yang digenggamnya, Prada Juniarto berjalan perlahan menelusuri pinggir pantai sungai Kapuas. Saat yang bersamaan kita menyaksikan Pratu Jamaludin berjalan bolak-balik menelusuri hutan belantara yang menjadi tanggung jawabnya dia tidak peduli dengan beberapa ekor nyamuk yang hinggap di pelipis matanya. Bahkan rintik-rintik hujan yang mulai mengguyur badannya dibiarkan dalam rangka mengamankan wilayah perbatasan Sambas dengan Serawak ini.

Jelang malam sebagian personel mulai melakukan kegiatan memasak nasi. Saat itu hanya beberapa potong ikan asin dan telur ayam buras dan mie goreng yang kami lihat. Tidak ada disini kompor untuk memasak sehingga sebelum memasak mereka harus mencari ranting kayu, tidak banyak bumbu masakan yang tersedia, sehingga masakannya terasa hambar dan tidak memiliki rasa sama sekali.

Ketika malam mulai tiba, semuanya jadi gelap gulita satu dengan lainnya saling canda ditengah cahaya bintang kejora. Suasananya jadi sepi karena tidak ada televisi sebagai pengantar

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN

istirahat malam. Paling-paling sebagai media penghibur rindu dengan anak istri, kampung halaman dan karib kerabat hanyalah sebuah gitar kayu "murahan". Gitar ini mereka dapatkan dari seniornya saat serah terima satgas perbatasan ini, walaupun mereka punya HP satu dengan yang lainnya saling rebutan untuk mencari baterai HPnya. Itulah sekelumit pemandangan regu pamtas di Sungai Buah wilayah Sanggau.

Menurut Dansatgas Pamtas sekaligus Danyon 641/BRU Letkol Inf Tri Sakti, gelar pasukan yang dilakukan terdiri dari 33 pos dari ujung Barat s.d ujung Timur yang meliputi 5 Kab dengan jarak 966 km. Dari 966 km wilayah perbatasan Kalimantan Barat 200 km merupakan daerah blank spot.¹⁴⁾

Pengamanan perbatasan wilayah Kalimantan Barat dengan Malaysia, 2 pos diantaranya merupakan pos pengamanan bersama antara anggota TNI dengan tentara Diraja Malaysia. Dikala patroli pengamanan Pamtas dilakukan mereka secara bersama-sama meninjau patok. Hal yang sama juga kami lihat saat pengamanan gerbang batas dua Negara dilakukan.

Tepat pada jam 05.00 hari Sabtu 28 Mei 201 1 Satgas Pamtas tak membuka pintu gerbang Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan oleh anggota tentara Diraja Malaysia yang membuka gerbang mereka. Pada saat bersamaan warga Indonesia yang mau ke Malaysia turun dari kendaraannya untuk mengurus kelengkapan administrasi di Imigrasi masing-masing Negara. Di seberang sana mereka yang mau ke Indonesia dari Malaysia melakukan kegiatan yang sama kendaraan yang mereka tumpangi mulai bergerak ke batas masing-masing Negara yang akan mereka tuju dengan didahului pemeriksaan oleh anggota Pamtas.

¹⁴⁾ Daerah blank spot, adalah daerah yang sulit dijangkau karena kondisi wilayahnya penuh hutan lebat dan tidak ada jalan. Ini sesuai dengan paparan Dansatgas Pamtas, tanggal 27 Mei 2011 di Mako Satgas Pamtas Entikong.

"Patroli gabungan yang semula rutin dilaksanakan setiap dua kali dalam setahun akan ditambah frekuensinya menjadi tiga kali setahun," kata Komandan Komando Resor Militer (Korem) 121/Alam Bhana Wanawai Pontianak Kolonel Toto Rinanto. Ia mengatakan, peningkatan frekuensi patroli bersama itu untuk meminimalisasi potensi gangguan keamanan di sepanjang perbatasan kedua negara. Selain itu, juga untuk meningkatkan jalinan komunikasi dan saling pengertian antara sesama personel yang bertugas. "Paling tidak, akan memperkuat ikatan emosional antara kedua pasukan (Indonesia dan Malaysia) yang sedang bertugas. Jadi, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran perbatasan bisa langsung diselesaikan di lapangan. Kecuali, hal-hal prinsip harus dilaporkan ke pimpinan masing-masing," jelas Danrem.

Panjang perbatasan tersebut mencakup sekitar 70,58% dari 1.200 km garis perbatasan kedua negara di Pulau Kalimantan. Dari 966 km panjang perbatasan darat itu, masih terdapat sekitar 200 km yang tanpa penjagaan aparat keamanan Indonesia. Oleh karena itu,

Markas Besar (Mabes) TNI merencanakan penambahan sejumlah pos pengamanan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar tersebut. "Kami akan membangun pos gabma (gabungan bersama Indonesia-Malaysia) di Desa Sajingan Besar (Sambas) dan Nangabadau (Kapuas Hulu). Pembangunannya masih dalam tahap persiapan fisik dan penyediaan bahan material¹⁵⁾.

Guna membantu kelancaran setiap orang melakukan kegiatan keluar masuk negara Indonesia, di pintu gerbang masing-masing sudah disediakan *Money Changer* yang memperjualbelikan ringgit dan rupiah. Menurut M-Botek anggota money changer di Entikong berjumlah 80 orang dan mereka

¹⁵⁾ Pendam XII/Tanjungpura, 2010.

Bab 4

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI KALIMANTAN

hanya memperoleh keuntungan antara 50-75 ribu rupiah satu hari.¹⁶⁾



Jalan Tikus, jalur transportasi penyelundupan barang-barang ilegal dari Malaysia ke wilayah Indonesia (Sumber Dokumen Disjarahad 2011)

Harus kita akui bahwa fasilitas pendukung kegiatan pengamanan perbatasan antara Indonesia dengan Diraja Malaysia sangat jauh berbeda. Disamping perbatasan Sarawak kita saksikan bahwa jalan rayanya sudah hotmik sehingga wajar patok batas Malaysia hanya berjumlah 6 patok. Sebalik kondisi perbatasan kita penuh dengan medan yang sulit, hutan belantara

¹⁶⁾ Wawancara dengan anggota money changer Entikong, M-Botek tanggal 27 Mei 2011 di Pintu Gerbang Par Entikong Pukul 07.00 Wib.

dan semak belukar, sehingga butuh yang lama untuk melakukan patroli pengamanan. Untuk itu perlu adanya kerja sama yang sinergis antara Departemen Pertahanan dan Departemen Kehutanan dalam membangun wilayah perbatasan.

Kekurangan fasilitas pendidikan, tidak lancarnya transportasi menuju wilayah Provinsi serta Kabupaten/Kota, perbedaan warga yang menyolok, ternyata mengakibatkan masyarakat perbatasan sering kali pulang pergi Malaysia-Indonesia. Namun demikian, hal ini ternyata tidak membuat rasa nasionalisme masyarakat perbatasan menjadi ternoda. Kalaupun ada diantara sebagian mereka yang keluar masuk Malaysia lewat jalan tikus ternyata lebih dimotivasi oleh sulitnya akses transportasi dari daerah mereka menuju gerbang perbatasan.



BAB V

Keadaan Wilayah dan Satgas Pemtas di NTT



A. Geografi

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan ibu kota Kupang, berada di ujung tenggara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-batasan dengan dua negara, yaitu Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Australia. Dalam sejarah wilayah perbatasan, wilayah NTT terbilang memiliki sejarah yang lebih baru bila dibandingkan dengan wilayah lainnya, karena wilayah tersebut pernah menjadi wilayah Timor Portugis dan Provinsi ke 27 saat berintegrasi dengan RI. Perbatasan RI dengan RDTL berupa wilayah darat dan laut, sedangkan perbatasan RI dengan teritorial Australia berupa laut atau samudra.

Letak dan kedudukan geografi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat strategis sebagai daerah penyanggah. Wilayah NTT memiliki sekitar 676 pulau besar dan kecil, serta memiliki pantai yang luas dan panjang. Keadaan medannya terdiri dari pengunungan dan perbukitan serta daratan rendah dengan struktur tanah yang berbeda, terutama Flores, Sumbawa dan Timor merupakan daerah rawan gempa tektonik, sering terjadi gelombang pasang, angin puyuh, serta rawan terjadinya kebakaran hutan dan tanah longsor.



Peta Dislokasi Pamtas , Dokumen Kodam IX/Udy Tahun 2009

Berdasarkan Undang-Undang No. 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), maka daerah Swatantra Tingkat I NTT dibagi menjadi 12 Daerah Swatantra Tingkat II. Adapun daerah Swatantra Tingkat II yang ada tersebut adalah Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Ngada, Sikka, Flores Timur, Alor, Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), dan Belu. Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daswantra I NTT, maka mulai tanggal 1 Juli 1962 swapraja-swapraja dihapuskan. Sedangkan mulai tanggal 1 September 1965 dengan berlakunya Undang-Undang No.18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, pada saat itu juga sebutan Daerah Swatantra Tingkat I NTT dirubah menjadi Provinsi NTT, sedangkan Daerah Swatantra Tingkat II dirubah menjadi Kabupaten.

Pada tahun 2003 wilayah Provinsi NTT terdiri dari 16 Kabupaten dan 1 Kota. Kabupaten-kabupaten dan Kota tersebut adalah Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Rote Ndao, dan Kota Kupang. Pada perkembangan pemerintahan daerah selanjutnya, wilayah NTT memiliki 19 Kabupaten dan Kota, yaitu Kabupaten Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sikka, Sumba Barat Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, TTS, TTU, dan Kota Kupang. Dari wilayah administratif tersebut meliputi 285 kecamatan dan 2.836 desa/kelurahan.¹⁷⁾

Gambaran secara umum, wilayah geografis NTT terletak di posisi 8⁰-12⁰ Lintang Selatan (LS) dan 118⁰-125⁰ Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah ± 47.349,9 km² daratan dan ± 200.000 km² lautan di luar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

¹⁷⁾ Bakosurtanal, *Atlas Tematik Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Bogor: CV. Regina, 2008, hal. 32.

Bab 5

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT

(ZEEI). NTT memiliki pulau besar dan kecil sebanyak 566. Pulau besar yang ada di wilayah NTT antara lain adalah pulau Flores, Sumba, dan Timor. Dari pulau-pulau sebanyak itu 246 pulau yang sudah bernama dan 43 pulau yang berpenghuni. Adapun iklim di wilayah NTT, sepanjang 8 bulan merupakan musim kemarau/kering dan 4 bulan merupakan musim hujan/basah. Sebagian wilayah NTT, terutama di wilayah perbatasan, merupakan daerah berbantuan sehingga musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan dengan musim penghujan menyebabkan sebagian besar merupakan wilayah yang tandus.¹⁸⁾

Adapun batas-batas wilayah NTT adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores, Sebelah Selatan dengan Samudra Hindia, Sebelah Timur dengan RDRTL, Sebelah Barat dengan Nusa Tenggara Barat (NTB).¹⁹⁾

Demarkasi wilayah darat dan wilayah perairan NTT yang berbatasan langsung dengan RDRTL dan Australia dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.²⁰⁾

No	Kabupaten	Panjang Perbatasan Darat (km)	Pulau Kecil/ Pulau Terluar	Garis Perbatasan Pantai (km)	Desa Batas Darat/Pantai	Ket
1	Belu	149,1	-	54	34 Ds / 4 Ds	RDRTL/ Aust
2	TTU	104,5	-	-	19 Ds / 1 Ds	RDRTL
3	TTS	-	-	86	- Ds / 21 Ds	Aust

¹⁸⁾ L. Michael Riwu Kaho, dkk., "*Optimalisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan sebagai Beranda Depan NKRI di NTT*", hal. 2. Makalah pada Lokakarya Nasional Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Jakarta tanggal 20 Juli 2011.

¹⁹⁾ *Ibid.*, hal. 33.

²⁰⁾ L. Michael Riwu Kaho, dkk., *op. cit.*, hal. 5.

Peranan TNI AD
dalam Pengamanan Perbatasan NKRI

4	Kupang	15,2	Batek-Dana Sabu	32	2 Ds / 12 Ds	RDTL/ Aust
5	Alor	-	Alor	63	- Ds / 6 Ds	RDTL
6	Rote Ndao	-	Ndana	55	- Ds/ 10 Ds	Aust
7	Sumba Timur	-	Manggu du	55	54 Ds / - Ds	Samudra Aust
Jumlah		268,8	5 pulau	288	163	

Pulau-pulau kecil terdepan yang ada di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur memiliki nilai strategis bagi penentuan garis pangkal perairan, Zone Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen Indonesia sehingga perlu dilaksanakan operasi pengamanan terhadap pulau tersebut. Adapun profil dari pulau-pulau terluar yang ada di perairan NTT, yang berbatasan langsung dengan negara RDTL dan Australia adalah sebagai berikut:

Pulau Alor.

Pulau ini terletak pada posisi $08^{\circ} 13' 50''$ LS, $125^{\circ} 07' 55''$ BT dengan luas wilayah luas 2.073,4 KM². Keadaan tanah adalah berpegunungan dengan tinggi 600 m s.d 1700 m. Wilayah Kabupaten Alor yang letaknya berbatasan langsung dengan wilayah perairan RDTL dengan jarak ke wilayah RDTL \pm 40 km dan terletak di jalur ALKI III. Sekarang ini di Pulau Alor terdapat 1 Kabupaten (Kab. Alor), 9 Kecamatan, 158 Desa dan 17 Kelurahan.

Bab 5

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT

Pulau Batek.

Letak pulau ini pada posisi $09^{\circ} 15' 33''$ LS - $123^{\circ} 59' 15''$ BT dengan luas wilayahnya ± 1 Km² (4000 m²). Keadaan tanah berupa tanah putih dan batu karang serta tidak terdapat sumber air dan bercuaca panas dan berangin kencang. Apabila air pasang dapat mencapai ketinggian 18 meter dari bibir pantai dan air surut setinggi 15 meter dari bibir pantai. Pelabuhan penyeberangan merupakan pelabuhan alam. Sumber air tidak ada sehingga pasukan yang melaksanakan pengamanan mencari air ke desa terdekat. Jarak terdekat dari pantai territorial negara RI sekitar 3-4 km, sedangkan ke wilayah RDTL sejauh 8-9 km. Desa terdekat ke wilayah RI adalah Ds. Netemnanu, Kec. Amfoang utara, Kab. Kupang. Sedangkan desa terdekat wilayah RDTL adalah Ds. Natpuka dan Ds. Citrana, Distric Oecussi. Fasilitas aparat keamanan yang ada pada saat ini untuk pengamanan wilayah berupa 3 buah rumah jaga karyawan Dinas Navigasi Laut, 1 buah pos TNI dan 1 buah *speedboot* milik TNI.

Pulau Ndana (Kep. Rote).

Letak pulau ini pada posisi $11^{\circ} 00' 36''$ LS- $122^{\circ} 52' 37''$ BT, dengan luas wilayahnya ± 16 Km². Tidak terdapat penduduk yang mendiami pulau tersebut dan hanya digunakan sebagai transito bagi nelayan tradisional dalam mencari ikan disekitar perairan tersebut. Keadaan tanah merah bercampur pasir dan tidak terdapat sumber air dengan Keadaan pantai yang berpasir dan sedikit berbatu. Adapun jarak terdekat dari Pulau Rote adalah sejauh ± 64 mil dan fasilitas yang ada yaitu 1 mercusuar, 1 buah pos TNI, 1 buah *speedboot*, 4 buah tangki penampungan air tawar.

Pulau Dana (Kep. Sabu).

Letak pulau ini adalah diposisi $10^{\circ} 50'00''$ LS- $121^{\circ}16' 57''$ BT dengan luas wilayah $\pm 0,63$ Km². Keadaan tanah pulau Dana berupa tanah datar, berpasir dan berkarang dengan keadaan pantai berpasir dan berbatu. Tidak terdapat penduduk yang mendiami pulau tersebut dan hanya digunakan tempat transit bagi nelayan tradisional dalam mencari ikan dan kayu. Jarak terdekat dari P. Sabu sejauh 172 mil dan berbatasan langsung dengan negara Australia dan fasilitas yang ada hanya 1 mercusuar. Saat ini belum ada pasukan yang ditempatkan di pulau Dana Sabu karena bila air pasang pulau tersebut akan terendam air.

Pulau Mangudu.

Pulau ini terletak pada posisi $10^{\circ} 20' 08''$ LS - $120^{\circ} 05' 56''$ BT dengan luas wilayah sebagian besar berupa tanah pasir ± 313 Ha dan panjang pantainya ± 5 Km dan lebar ± 2 km. Jarak terdekat adalah Pulau Sumba yang berjarak ± 100 mil. Air pasang pada bulan Desember s.d. Maret dapat mencapai ketinggian $\pm 4,5$ meter dengan gelombang laut ± 5 s.d. 6 meter. Air surut sejauh rata-rata $\pm 1,5$ s.d 3 meter. Pelabuhan penyeberangan yang ada adalah Pelabuhan Jeti yang baru selesai dibangun untuk digunakan sebagai tempat penyeberangan, baik datang maupun pergi dari Pulau Manggudu. Fasilitas yang ada di pulau ini berupa 1 buah pelabuhan penyeberangan (Pelabuhan Jeti), 1 buah mercusuar, 1 buah sumur gali, 7 *homestay*, 2 buah bak penampungan air hujan, 1 buah kantor, 1 buah dapur dan 1 buah gudang genset. Pada saat ini Tidak terdapat pasukan yang menjaga pulau tersebut, namun pulau tersebut dalam pemantauan aparat Kodim 1601/Sumba Timur.²¹⁾

²¹⁾ Dokumen Penerangan Kodam IX/Udy.

Bab 5

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT

Belu adalah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Setelah bekas wilayah Provinsi Timtim tersebut lepas dari Indonesia dan menjadi Negara berdiri sendiri, Belu merupakan daerah yang sangat strategis untuk kepentingan perdagangan maupun tujuan wisata. Kabupaten yang terletak antara 124 00'-126 00' LS dan 124 00'-125 00' BT ini, sekarang menjadi gerbang perbatasan RI-RDTL, yang dapat dilalui lewat jalur darat.



Salah satu gerbang perbatasan RI-RDTL.
(Photo Praja Raksaka, edisi khusus 53 Kodam IX, 2010)

Ada tiga pintu masuk resmi ke Indonesia maupun ke Timor Leste yang sekaligus yang merupakan gerbang perbatasan kedua Negara, yaitu di Kecamatan Tasifero Timur, Raihat, dan Kofalima.

B. Demografi

Penduduk yang mendiami seluruh wilayah NTT terdiri dari berbagai suku bangsa, diantaranya adalah Timor, Rote, Sabu, Sumba, Helong, Flores, Alor dan lain sebagainya. Setiap suku memiliki corak budaya yang khas dan unik. Misalnya tarian,

bahasa, pakaian, dan peraturan adat. Keragaman ini menjadi suatu keunikan yang membentuk karakteristik masyarakat NTT. Salah satu tarian adat yang cukup menarik adalah tarian Pado'a dan tarian Caci, sedangkan alat musik yang terkenal adalah Sasando yang terbuat dari daun lontar.



Salah satu sudut rumah penduduk di perbatasan yang terkesan sangat sederhana. (Dokumen Disjarahad Tahun 2011)

Kehidupan di NTT pada umumnya masih dalam situasi menuju perubahan, peran supra struktur dan infra struktur politik masih perlu ditingkatkan, di samping masih kurangnya kesadaran berpolitik masyarakat akibat tingkat pendidikannya yang rendah, kepentingan golongan/partai lebih mengemuka dari kepentingan nasional, menjadikan kehidupan politik di daerah NTT sangat rawan terhadap berbagai isu yang menyesatkan dan dapat menjurus timbulnya konflik social.

C. Kondisi Sosial

Wilayah NTT yang sebagian besar terdiri dari padang rumput dengan curah hujan yang cukup rendah merupakan tempat yang sangat cocok untuk mengembangkan sektor peternakan dan perkebunan lahan kering, yang terbukti pernah sangat berhasil, misalnya sapi, kopi dan kayu cendana. Namun

Bab 5

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT

khusus komoditi kayu cendana, pada masa lalu merupakan komoditi yang sangat terkenal dari wilayah NTT, khususnya di pulau Timor. Namun pada saat sekarang ini kayu cendana sudah sangat sulit untuk ditemukan lagi di wilayah tersebut.



Pasar Tradisional di wilayah perbatasan RI-RDTL.

(Dokumen Praja Raksaka, edisi khusus 53 Kodam IX/Udy, 2010)

Sebagian besar penduduk yang berada di daerah perbatasan bermatapencaharian sebagai petani dengan luas yang relatif kecil. Disamping sebagai petani mereka menjadi peternak, namun karena terisolirnya wilayah perbatasan dengan pusat-pusat desa atau kecamatan membuat kehidupan mereka sangat memprihatinkan.

Mayoritas penduduk yang bermukim di wilayah perbatasan RI-RDTL berasal dari para pengungsi Timtim (Timor Leste saat ini) yang memilih tetap menjadi warga NKRI setelah terlepasnya Timtim dari Indonesia seusai jejak pendapat dan berdirinya Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) pada tanggal 20 Mei 2002.



Potret Keindahan wista alam dan pemukiman sebuah perkampungan di pinggir pantai wilayah NTT. (Dokumen Disjarahad Thn 2011)

Keberadaan pengungsi Timor Leste di NTT dengan waktu yang cukup lama, menyebabkan kondisinya sangat memperhatikan, terutama karena belum terpenuhinya pemukiman yang layak bagi mereka, tanah tempat untuk bercocok taman dan sumber penghidupan lainnya, sehingga berpotensi timbulnya berbagai masalah yang menjurus terjadinya konflik antara pengungsi sesamanya maupun dengan penduduk asli setempat.

Wilayah NTT sangat kaya akan objek wisata. Banyak yang masih asli. Salah satunya adalah terumbu karang. Di samping ada pantai Nembrala yang sangat cocok untuk berselancar karena mempunyai ombak yang bersekala internasional. Objek wisata lainnya adalah air terjun 3 tingkat (70m) di Oenesu.

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial bagi NTT. Daerah NTT mempunyai objek pariwisata yang beragam,

Bab 5

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT

baik wisata alam dengan kondisi alamnya yang bergunung-gunung berikut pantainya yang memanjang, wisata bahari, agrowisata, maupun wisata budaya, termasuk wisata sejarah yang banyak dimiliki oleh daerah NTT terus dilakukan tentunya dengan sarana pendukung lainnya.

D. Kerawanan-Kerawanan

Berdirinya Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) pada tanggal 20 Mei 2002 menimbulkan sejumlah permasalahan di perbatasan RI-RDTL antara lain : masalah pengungsi, sengketa garis batas, imigrasi, pasar gelap, penyelundupan BBM dan sembako.

Diantara banyaknya persoalan yang berpotensi terjadinya kerawanan-kerawanan di daerah perbatasan RI-RDTL dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Masalah Pengungsi

Masalah pengungsi menjadi hal yang paling menonjol di sepanjang garis perbatasan, mengingat keberadaan mereka tersebar di 67 Barak (camp) pengungsi yang terdiri dari 57 barak di Kabupaten Belu dan 10 barak di Kabupaten Kefamenanu.



Penduduk eks Tim-Tim yang mengungsi ke wilayah RI sering melaksanakan kegiatan lintas batas RI-RDTL (Dokumen Kodim TTU 2011)

Para pengunjung dan pelintas batas ini seringkali tidak mematuhi prosedur dan ketentuan RI-RDTL yang berlaku, padahal kedua negara telah menentukan titik pelintasan resmi dengan ketentuan dari prosedur pemeriksaan surat-surat serta barang bawaan pelintas oleh petugas di pos perbatasan. Para pengunjung tersebut berbaur dengan kelompok orang yang tidak puas dengan hasil jejak pendapat yang disinyalir telah membentuk kekuatan baru dan menjadikan Timor Barat sebagai bisnis kegiatan. Demikian pula keberadaan eks pejuang pro integrasi (PPI) yang mengungsi ke Timor Barat yang saat ini tinggal di perbatasan, masih berharap berjuang melalui front politik untuk mempersatukan Timor Leste ke dalam NKRI dan membentuk wadah UNTAS sebagai penyalur aspirasinya. Kelompok ini menjadikan wilayah Timor Barat sebagai basis pelatihan secara tersembunyi, sehingga seringkali menimbulkan bentrokan dengan masyarakat setempat.

Untuk mengatasi masalah tersebut sebenarnya telah ditanda tangani kesepakatan antara pemerintah RI dan RDTL tentang paslintas batas. Pemerintah Indonesia telah siap melakukan kesepakatan itu namun RDTL belum siap dengan alasan tidak memiliki anggaran.

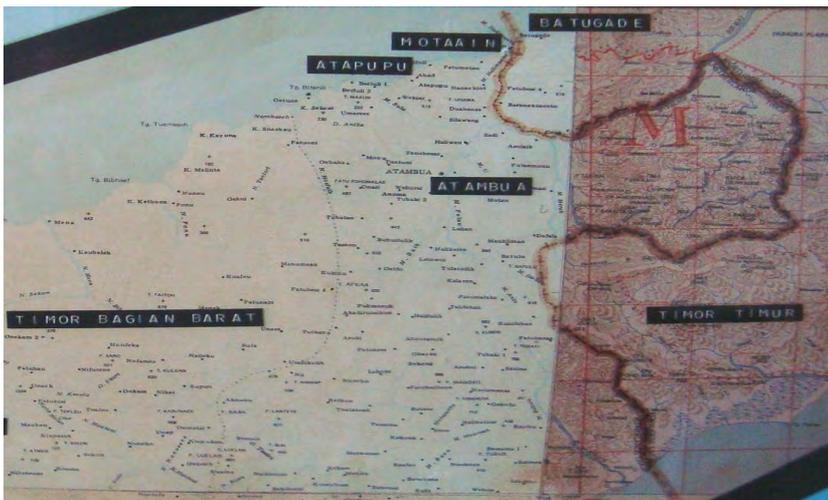
2. Sengketa Garis Batas

Dari daerah-daerah perbatasan antara negara RI dengan Australia tidak ada permasalahan karena berbatasan dengan laut atau samudra luas. Namun dengan negara RDTL ada beberapa daerah yang berupa darat atau pulau yang masih menjadi sengketa kedua Negara tersebut. Daerah bersengketa tersebut dibagi menjadi 2 permasalahan, yaitu *Unresolved Segmen* dan *Unsurveyed Segmen*. *Unresolved Segmen* adalah daerah yang belum mendapatkan penyelesaian anatara RI-RDTL antara lain

Bab 5

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT

ada di 3 kabupaten, yaitu Kab. Belu (Delomil/Memo), Kab. TTU (Bijaël Sunan-Oben Manusasi), dan Kab. Kupang (Noel Besi/Citrana. Sedangkan yang *Unsurveyed Segmen* yaitu daerah yang belum disurvei oleh RI-RDTL hanya meliputi Kab. TTU di daerah Subina, Pistana, Tubu Banat, dan Haumeniana.



Pergeseran wilayah perbatasan terjadi di Batugade. Sebelum Timtim masuk wilayah RI, tahun 1975 Batugade adalah wilayah RI tetapi setelah berpisah dengan Indonesia masuk menjadi wilayah RDTL. Wilayah tersebut dengan perbatasan Motaain sekarang ini berjarak sekitar 5-6 km.

Sumber: Peta (LN 1912) di Ruang kerja Kasdam IX/Udy dan Wawancara dengan Kasdam Brigjen TNI Endar Priyanto di Makodam Denpasar Bali pada tanggal 6 Juni 2011.

Peranan TNI AD dalam Pengamanan Perbatasan NKRI



Pihak TNI dan PNTA serta Militeray Training Advicers dan Police Training Advicers (PBB) tengah meninjau salah satu pos perbatasan RI-RDTL.
(Dokumen Kodim 1618/TTU Tahun 2000)



Contoh batas Negara RI-RDTL yang terdiri dari bangunan berbentuk pilar batas dan Border Sign Post (BSP).
(Dokumen Satgas Pamtas 743/Psy Tahun 2011)

Bab 5

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT



Kolonel Cba Ir. Drs. Djoko Susilo, M.T. sedang meninjau tanda batas negara di Napan Bawah Kec. Bikomi Utara, Kab. TTU yang berbatasan dengan Oesilo, Distric Oecusse RDTL (Dokumen Disjarahad tahun 2011)

Belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh, baik itu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Batas Laut Teritorial (BLT), dan Batas Landas Kontingen (BLK). Walaupun sudah ada perjanjian tentang perbatasan antara negara RI dengan RDTL, tetapi masih saja ada permasalahan perbatasan yang belum dapat diselesaikan secara hukum (lihat lampiran). Disamping itu banyak sekali tanda-tanda batas negara yang hilang karena tergerus oleh arus sungai pada waktu banjir maupun hilang dirusak atau dicuri.

3. Bidang Ekonomi dan Sosbud

Paradigma kawasan perbatasan sebagai “halaman belakang” harus segera dirubah secepatnya karena pemikiran itu adalah pemikiran yang keliru, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun sampai tingkat daerah. Pintu masuk negara sudah tidak lagi di

pusat-pusat perekonomian seperti bandara atau pelabuhan-pelabuhan besar tetapi pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga. Di negara RDTL sudah merubah imej tersebut dan menjadikan wilayah perbatasannya dengan negara Indonesia merupakan beranda depan. Mereka sudah melakukan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup memadai. Disamping itu mereka juga membangun pusat-pusat perdagangan atau ekonomi guna meramaikan aktivitas ekonomi masyarakat diperbatasan agar mereka tidak membeli kebutuhan hidup di Indonesia. Hal ini dapat dilihat di wilayah perbatasan Napan dan Motaain.

Wilayah perbatasan NKRI yang masih kelihatan belum teratur dan mencerminkan kemiskinan. Minimnya sarana dan prasarana infrastruktur membuat terisolirnya wilayah perbatasan dengan negara RDTL. Sebagian besar penduduk yang berada di daerah perbatasan bermatapencarian sebagai petani dengan luas yang relatif kecil. Disamping itu sebagai petani mereka menjadi peternak, namun karena terisolirnya wilayah perbatasan dengan pusat-pusat desa atau kecamatan membuat kehidupan mereka sangat memprihatinkan.

Sarana perhubungan yang ada di daerah perbatasan kurang terpelihara dan sangat terbatas. Sarana jalan sepanjang menuju ke wilayah perbatasan banyak yang rusak, jembatan yang ada banyak yang rusak dan hampir putus sehingga membahayakan pengguna jalan dan membuat transportasi umum enggan masuk ke wilayah terpencil sehingga mobilitas penduduk untuk menuju ke dan dari wilayah perbatasan ke wilayah pusat desa/kecamatan/kabupaten terhambat. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya geliat ekonomi dan mobilitas masyarakat

Bab 5

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT

perbatasan sehingga taraf hidup mereka mengalami stagnasi pada keadaan prasejahtera.



Seorang anggota Satgas 743/Psy sedang berbincang-bincang dengan penduduk perbatasan yang kondisi sosial ekonominya masih sederhana dan perlu ditingkatkan. (Dokumen Satgas 743/Psy Tahun 2010)

Sarana telekomunikasi lewat telephon juga sangat minim dan internet yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Kementerian Pendidikan Nasional di pelosok pedesaan banyak yang sudah tidak berfungsi.²²⁾ Satu-satunya sarana komunikasi adalah melalui telephon seluler. Akan tetapi sinyal yang dimiliki oleh Indonesia kalah kuat dengan yang dimiliki oleh perusahaan telekomunikasi milik RDTL. Seperti misalnya di wilayah perbatasan Napan Bawah, kecamatan Bekomi Utara, Kabupaten TTU, apabila menggunakan telephon seluler di wilayah dekat dengan perbatasan tersebut tarifnya akan mengikuti tarif luar negeri (RDTL) yang beayanya lebih mahal apabila menggunakan tarif dalam negeri dan bahkan dikatakan sangat mahal. Jika kita menggunakan telephon seluler beayanya mencapai Rp. 1.000,00 dalam satu detik. Sedangkan untuk SMS beaya mencapai Rp. 3.000,00/SMS. Hal itu tentu saja sangat merugikan masyarakat sekitar

22) Wawancara simultan dengan masyarakat setempat, Leonardus Lewu, Getrudis Eko, Ermalinda Suni, Siprianus Sikki, Yacobus Boik di Napan, Kec. Bekomi Utara, Kab. TTU tanggal 8 Juni 2011.

perbatasan dan juga anggota aparat keamanan dan TNI/TNI AD yang bertugas di wilayah tersebut. Untuk menghindari tarif luar negeri (RDTL) tersebut maka kalau mau menggunakan telepon seluler harus menjauh sekitar 2 km dari wilayah perbatasan.²³⁾

Disamping itu, kerawanan dibidang ekonomi, sosial dan budaya lainnya yang perlu diwaspadai adalah adanya kecemburuan sosial dari penduduk lokal terhadap fasilitas yang diberikan kepada para pengungsi Timtim. Fasilitas yang diberikan kepada para pengungsi umumnya dari mulai perumahan, pembukaan lahan usaha, sarana air bersih, sampai kepada sertifikat hak milik lahan, merupakan perlakuan yang dirasakan sangat tidak adil dibandingkan penduduk lokal, sehingga tidak jarang dapat menyulut konflik horizontal dan menghambat proses pembaruan dan pembangunan.

Dengan dimodali oleh para cukong, masyarakat pelintas batas sering diperalat sebagai sarana untuk membawa barang selundupan kewilayah Timor Leste dengan harga jual yang lebih mahal. Kondisi ini memicu terjadinya kesenjangan ekonomi dikalangan masyarakat bawah.

²³⁾ Wawancara simultan dengan Satgas Pamtas, Letkol Inf. Ricky D. Lumintang, Myr. Inf. Slamet, Kapten Inf. Gede Dekha, dan Letda Inf. La Ode Sadiran, yang dibenarkan oleh penduduk setempat di Napan, Bekomi Utara, Kab. TTU tanggal 10 - 11 Juni 2011.

Bab 5

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT



Masyarakat daerah perbatasan tengah melaksanakan acara adat dengan menyembelih Babi sebagai salah satu bentuk rasa syukur pada Tuhan YME.
(Sumber Kodim TTU Tahun 2004)

Adanya kesan terjadinya eksploitasi sumber kekayaan alam oleh sekelompok suku dan investor tertentu tanpa memperhatikan masyarakat lokal, sehingga belum seluruh masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya.

Panjangnya wilayah perbatasan darat dan ber-topografi pegunungan serta rintangan alam lainnya menyebabkan lokasi-lokasi masyarakat lokal terpencar dan sulitnya memasarkan hasil pertanian mereka. Akibatnya harga jual produksi transmigran rendah dan kebutuhan sehari-hari menjadi mahal. Kondisi itu menyebabkan program pembangunan pemerintah kurang tersentuh masyarakat di daerah perbatasan.

Adanya proses degradasi lingkungan akibat peladangan liar dan pembakaran hutan dengan indikasi terjadinya degradasi lahan dan tidak dimanfaatkannya lahan usaha

secara efisien, sehingga mengakibatkan banyaknya lahan yang terlantar di beberapa lokasi pemukiman pengungsi eks Timtim.

E. Satgas Pamtas

Wujud perhatian dari pemerintah untuk wilayah perbatasan adalah perhatian sektor pertahanan. Perhatian tersebut antara lain melalui gelar kekuatan TNI yang ada di sepanjang garis perbatasan, serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan dalam bingkai NKRI.



Satgas Pamtas TNI AD sedang melaksanakan kegiatan di pos perbatasan darat RI-RDTL. (Dokumen Praja Raksaka, edisi khusus 2010)

Adapun tugas yang diemban oleh jajaran Angkatan Darat di perbatasan adalah: Memeriksa setiap warga yang masuk ke wilayah Indonesia, Mendata para pendatang untuk ditempatkan di tempat penampungan yang telah disediakan oleh instansi terkait, Membantu pembangunan tempat hunian atau penampungan sementara, Membantu penyaluran jatah hidup dari instansi terkait

Bab 5

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT

untuk diserahkan kepada para pendatang, Mendata para milisi Tintim.

Pada saat situasi negara RDTL sudah mulai kondusif maka banyak penduduk asli RDTL yang hendak kembali pulang ke tanah airnya. Untuk itu petugas keamanan yang ada di wilayah perbatasan membantu untuk pengurusan repatriasi dan menyediakan alat transportasi.



Truk- truk yang disiapkan oleh aparat TNI AD di pintu perbatasan Wini dan Oepuli Kab TTU untuk mengangkut rombongan repatriasi ke Negara RDTL pada awal tahun 2004.
(Dokumen Kodim TTU Tahun 2004)

Untuk masalah pengurusan repatriasi di sepanjang wilayah perbatasan pengurusannya hanya dilakukan di Makodim Belu setelah mendapat persetujuan dari LSM yang mengurus repatriasi. Masalah transportasi disiapkan oleh aparat Kodim setempat (Kodim Belu dan TTU) melalui koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Imigrasi, dan Kepolisian. Yang mengurus repatriasi bukan saja dari masyarakat biasa

tetapi ada anggota aparat, militer dan PNS yang ingin kembali ke RDTL.

Setelah situasi dan kondisi wilayah di sepanjang perbatasan membaik, maka tugas keamanan wilayah di sepanjang perbatasan dengan RDTL yang semula dilaksanakan oleh satgas Yonif dari Kodam dan Kostrad yang di-BKO-kan ke Pangdam Udayana, selanjutnya tugas tersebut menjadi tugas satuan organik Kodam IX/Udy, dan sejak tahun 2004-2005 secara bertahap mulai dibangun Pos Penjaga Perbatasan yang berjumlah 38 Pos.

F. Tugas Pokok

Setelah Timtim lepas dari NKRI tahun 1999 dan menjadi negara yang merdeka terjadi eksodus besar-besaran ke wilayah Indonesia karena situasi di Timtim pada saat itu sangat membahayakan bagi sebagian penduduk yang prointegrasi. Pada saat itulah organik Kodam IX/Udy khususnya aparat teritorial dan satuan tugas TNI Angkatan Darat di sepanjang wilayah perbatasan seperti Kodim TTU dan Kodim Atambua diberi tugas untuk mengamankan wilayah dan menjaga ketertiban masyarakat.

Tugas pokok Satgas Pamtas TNI AD di wilayah perbatasan RI-RDTL meliputi kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran perbatasan (lintas batas) di perbatasan RI-RDTL, mencegah terjadinya penyelundupan dan pasar gelap di sepanjang perbatasan, mengadakan koordinasi/kerjasama tentang pengamanan perbatasan dengan UPF (*Unidade Patrolhamento Forientra*) /PNTL untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman, mensosialisasikan patok-patok batas Negara yang telah disepakati dan mengawasi daerah yang masih bermasalah (status quo), membantu instansi terkait (Polri, Bea Cukai dan Imigrasi) dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan, melaksanakan binter di wilayah perbatasan, mencegah dan mengawasi wilayah perbatasan agar tidak

Bab 5

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT

digunakan sebagai basis perlawanan oleh pemberontak Timor Leste serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengamanan perbatasan darat RI-RDTL.

G. Dislokasi

Setelah situasi dan kondisi wilayah di sepanjang perbatasan membaik, maka tugas keamanan wilayah di sepanjang perbatasan RI dengan RDTL diserahkan kepada komando daerah setempat, yaitu Kodam IX/Udy dan pada tahun 2004-2005 secara bertahap mulailah dibangun Pos Penjaga Perbatasan yang berjumlah 38 Pos dan merupakan bangunan permanen dan semi permanen. Adapun pos-pos perbatasan yang dibangun yang sekaligus merupakan dislokasi satgas pamtas terdiri dari pos dengan bangunan permanen dan bangunan semi permanen, sebagai berikut :

Bangunan Pos Permanen

Mako Satuan Tugas Pamtas RI-RDTL menggunakan bangunan permanen yang berada di Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, sedangkan Perwakilan Satgas dan Pos-pos Kipur 1-5 berada di Kabupaten TTU menggunakan bangunan permanen milik Kodim 1618/TTU. Dislokasi bangunan pos Satgas Pamtas permanen lainnya adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. PLB Koki Motamasin | (JP-F/wilayah Kab.Belu). |
| 2. PPP Haslot | (Wilayah Kab.Belu). |
| 3. PPP Auren | (Wilayah Kab.Belu). |
| 4. PPP Fatuha | (Wilayah Kab.Belu). |
| 5. PPP Nanano | (Wilayah Kab.Belu). |
| 6. PPP Laktutus | (JP-E/wilayah Kab.Belu). |
| 7. PPP Lakmars | (JP-D/wilayah Kab.Belu). |
| 8. PPP Koki Delomil | (JP-M/wilayahKab.Belu). |



Markas Komando Pengamanan Perbatasan RI-RDTL di UMANEN-ATAMBUA BARAT (Dokumen Diajarahad Thn 2011)

- | | | |
|-----|------------------|-------------------------|
| 9. | PPP Fohuk | (Wilayah Kab.Belu). |
| 10. | PPP Lokeu | (Wilayah Kab.Belu). |
| 11. | PPP Motaain | (Wilayah Kab.Belu). |
| 12. | PPP Koki Silawan | (Wilayah Kab.Belu). |
| 13. | PPP Asumanu | (Wilayah Kab.Belu). |
| 14. | PPP Nunura | (Wilayah Kab.Belu). |
| 15. | PPP Salore | (Wilayah Kab. Belu). |
| 16. | PPP Asulait | (Wilayah Kab. Belu). |
| 17. | PLB Koki Wini | (JP-1/wilayah Kab.TTU). |
| 18. | PLB Napan Bwh | (JP-2/wilayah Kab.TTU). |
| 19. | PPP Baen | (Wilayah Kab.TTU). |

Bab 5

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT



Pos Satgas Pamtas di daerah WINI yang berjarak 75 meter dari garis batas Negara RI-RDTL (Dokumen Disjarahad Thn 2011)

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 20. PPP Inbate | (Wilayah Kab.TTU). |
| 21. PPP Haumeniana | (JP-3/wilayah Kab.TTU). |
| 22. PPP Nino | (Wilayah Kab. TTU). |
| 23. PPP Ninulat | (Wilayah Kab. TTU). |
| 24. PPP Koki Oepoli | (JP-5/wilayahKabKupang). |
| 25. PPP Manusasi | (Wilayah Kab. TTU). |
| 26. PPP Olbinose | (Wilayah Kab.TTU). |
| 27. PPP Aplal | (JP-4/wilayah Kab.TTU). |
| 28. PPP Oepoli Pantai | (Wilayah Kab.Kupang). |
| 29. PPP Oepoli Sungai | (Wilayah Kab. Kupang). |

Bangunan Pos Semi Permanen

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. PPP Ailala | (Wilayah Kab.Belu). |
| 2. PPP Kewar | (Wilayah Kab.Belu). |
| 3. PPP Fohululik | (Wilayah Kab.Belu). |
| 4. PPP Fatubesi Atas | (Wilayah Kab.Belu). |
| 5. PPP Dafala | (Wilayah Kab.Belu). |
| 6. PPP Mahen | (Wilayah Kab.Belu). |
| 7. PPP Maubusa | (Wilayah Kab.Belu). |



Pada awalnya kondisi pos Satga Pamtas RI-RDTL sangat sederhana (1999), selanjutnya seiring pergantian waktu pos dibenahi menjadi semi permanen dan akhirnya permanen. (Dokumen Kodim TTU, 1999)

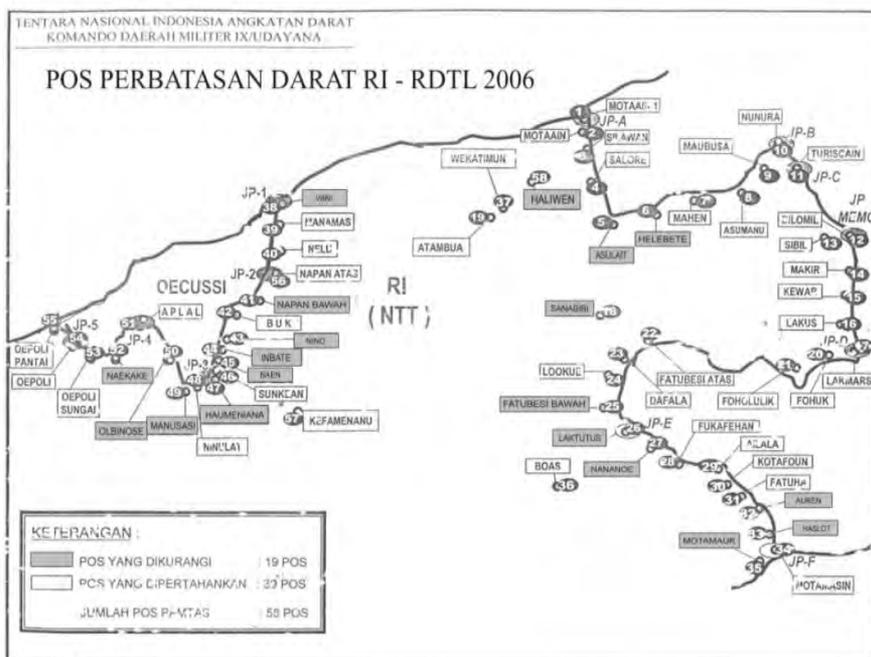
Di samping bangunan pos pamtas yang dibangun oleh TNI, terdapat bangunan pos pamtas lainnya yang dibangun oleh Departemen Pertahanan PLB Motaain 1 (JP-A/wilayah

Bab 5

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT

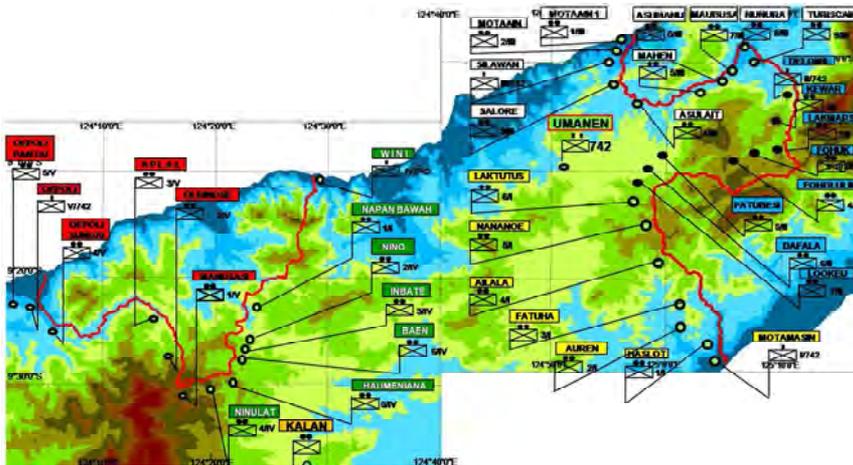
Kab.Belu), serta yang dibangun oleh Pemda Kab. Belu PPP Turiscain (JP-C/wilayah Kab.Belu).

Dislokasi Satgas Pamtas TNI-AD dari awal hingga saat ini tidak selalu sama, terdapat adanya pergeseran pos sesuai dengan tuntutan tugas yang diemban dilapangan. Sebagai perumpamaan dibawah ini dikemukakan skema dislokasi pos satgas pamtas tahun 2006 dan tahun 2011, untuk sekedar perbandingan.



Dislokasi pos Satgas Pamtas TNI-AD pada tahun 2006.
(Dokumen Pendam IX/Udy)

DISLOKASI PASUKAN YONIF 742/SWY



Dislokasi pos Satgas Pamtas TNI-AD pada tahun 2011.
(Dokumen Pendam IX/Udy)

Selain pos pamtas TNI-AD di wilayah perbatasan RI-RDTL juga terdapat pos *Unidade Patrulhamento Fronteira* (UPF) yang sebelumnya disebut *Border Patrol Unit* (BPU) merupakan satuan polisi penjaga perbatasan RDTL yang bertanggung jawab menjaga perbatasan dalam bimbingan komponen PBB (Military Training Advisers dan Police Training Advisers) dengan daerah tanggung jawab UPF sebagai berikut:

- Daerah perbatasan Kab. Belu-Distrik Bobonaro dan Distrik Kovalima. Seluruh JP (Junction Point) dari perbatasan Kab.

Bab 5

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT

Belu RI-RDTL telah diserahkan secara penuh dari UNPKF kepada UPF. Kekuatan personel UPF di 7 JP berjumlah 172 orang dan menempati 14 Pos, antara lain: Pos Batugade kekuatan 26 orang dipimpin Agent Guido P.D.C Vaz berhadapan dengan PLB Motaain 1 (JP-A). Pos Patu Belak /Kowa kekuatan 6 orang dipimpin Agent Alberto Mambares berhadapan dengan PPP Salore. Pos Leohitu kekuatan 6 orang dipimpin Agent Adao do Carmo berhadapan dengan PPP Asumanu. Pos Hunure kekuatan 15 orang dipimpin Agent Jose Nec Colo berhadapan dengan PPP Nunura (JP-B). Pos Tunubibi kekuatan 14 orang dipimpin Agent Flaviano Da Silva berhadapan dengan PPP Turiscain (JP-C). Pos Memo kekuatan 7 orang dipimpin Agent Agustino Adelino Mau Mali berhadapan dengan PPP Koki Dilomil (JP-MEMO). Pos Saburai/Boras kekuatan 15 orang dipimpin Agent Venancio Soares. Pos Alto Lebos kekuatan 12 orang dipimpin Agent Paul P D C Nunes berhadapan dengan PPP Lakmars (JP-D). Pos Lela kekuatan 15 orang dipimpin Agent Agustinho Afonso berhadapan dengan PPP Lakmars (JP-D). Pos Sub Distrik Fatululik kekuatan 11 orang dipimpin Agent Venansio Soares berhadapan dengan PPP Fohuk. Pos Foholulik kekuatan 10 orang dipimpin Agent Bernado De Sena berhadapan dengan PPP Ailala. Pos Uelalama kekuatan 6 orang dipimpin Agent Dominggus Masin berhadapan dengan PPP Fatuha. Pos Fatumean kekuatan 13 orang dipimpin Agent Adao Gusmao berhadapan dengan PPP Laktutus (JP-E). Pos Salele kekuatan 16 orang dipimpin Agent Simao Da Costa B berhadapan dengan PLB Motamasin (JP-F).

- Daerah perbatasan Kab. TTU dan Kab. Kupang-Distrik Oecussi. UPF telah melaksanakan operasi secara penuh di wilayah perbatasan Oecussi dengan menempatkan kekuatan 56 orang dan menempati 7 Pos, yaitu: Pos Pante Makasar/Sakato kekuatan 8 orang dipimpin Agent Jose Pinheiro berhadapan dengan PLB Wini (JP-1). Pos Oesilo kekuatan 9 orang dipimpin

Agent Rui Caerio berhadapan dengan PLB Napan Bawah (JP-2). Pos Pasabe kekuatan 10 orang dipimpin Agent Alberto Mambares berhadapan dengan PPP Haumeniana (JP-3). Pos Mahata kekuatan 7 orang dipimpin Agen Domingos Macin berhadapan dengan PPP Aplal (JP-4). Pos Citrana kekuatan 8 orang dipimpin Agent Antonio Tolo berhadapan dengan PPP Oepoli (JP-5). Pos Leolbatam kekuatan 7 orang dipimpin Agen Joao P Rosario. Pos Quibeselo kekuatan 7 orang dipimpin Agen Carlos Coa.

Adapun dislokasi tentara RDTL atau *Forca Frenti De Feza Timor Leste* (FFDTL) yang memulai betugas pada bulan April 2009 di daerah perbatasan RI-RDTL untuk memonitor dan membantu pendorongan logistik dalam mendukung pelaksanaan tugas UPF. Keberadaan FFDTL didaerah perbatasan juga berkaitan dengan akan ditariknya UN MLO. Adapun gelar FFDTL tersebut: 1 Peleton (35 orang) di Tilomar dipimpin oleh Lettu Taninti Marcel A, dan 1 Peleton (20 orang) di Tunubibi dipimpin oleh Lettu Mathius de Jesus.

H. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas Pamtas TNI AD di wilayah perbatasan RI-RDTL antara lain sebagai berikut:

- Mencegah terjadinya pelanggaran perbatasan (lintas batas) di sepanjang perbatasan darat RI-RDTL dimana anggota satgas pamtas secara rutin melaksanakan patroli disekitar wilayah pos yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.
- Mencegah penyelundupan dan pasar gelap di sepanjang perbatasan darat RI-RDTL, terutama yang diselundupkan melalui rute/ jalan tikus yang banyak terdapat diperbatasan di RI- RDTL.

Bab 5

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT



Satgas Pamtas tengah memeriksa kendaraan yang hendak memasuki wilayah RI-RDTL. (Dokumen Disjarahad Tahun 2011)



Anggota Satgas 743/Psy sedang melakukan patroli di wilayah perbatasan sungai yang ada di Oepoli Sungai, Kab. TTU. (Dokumen Dam IX/Udy, 2011)

Bab 5

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT

- Mencegah pergeseran/hilangnya patok batas di sepanjang perbatasan wilayah darat RI-RDTL.



Satgas Pamtas TNI AD tengah melaksanakan patroli patok perbatasan wilayah RI-RDLT. (Dokumen Praja Raksaka, edisi khusus 2010)

- Mengkoordinasikan dan kerjasama tentang pengamanan perbatasan dengan UPF dan menghindari terjadinya kesalah pahaman. Seperti melaksanakan pertemuan koordinasi (Border Meeting) antara satgas RI dengan aparat Komando UPF regional setiap 3 bulan sekali, tingkat Kompi/Distrik setipa 1 bulan sekali dan tingkat Pos setiap 2 minggu sekali, atau pertemuan koordinasi (Bordir Meeting) secara insidental sesuai perkembangan situasi di lapangan.



Kegiatan *Border Meeting* di wilayah perbatasan Bikomi Utara Kab. TTU pada bulan September 2000 antara RI yang diwakili oleh Dandim TTU dengan Kepala Polisi Perbatasan RDTL dan disaksikan oleh Komandan pasukan PBB setempat yang berasal dari Australia beserta stafnya.
(Dokumen Kodim TTU, 2000)

- Mensosialisasikan patok-patok batas Negara yang telah disepakati dan mengawasi daerah yang masih bermasalah (*status quo*). Seperti daerah yang belum mendapatka penyelesaian antara RI-RDTL, antara lain ada di tiga kabupaten, yaitu kabupaten Belu (Delomil/Memo), kabupaten TTU (Dijeal Sunan Oben Manusasi), dan kabupaten Kupang (Noelbesi/Citrana). Sedangkan daerah yang belum disurvei RI-RDTL hanya meliputi kabupaten TTU didaerah Subina, Pistana, Tubu Banat, dan Haumeniana.

Bab 5

KEADAAN WILAYAH DAN SATGAS PAMTAS DI NTT

- Membantu instansi terkait baik Polri, Bea Cukai, dan Karantina dalam penegakan hukum disepanjang perbatasan wilayah darat RI-RDTL.



Anggota Satgas 743/Psy di Pos Nunura yang berhasil menggagalkan penyelundupan BBM pada akhir tahun 2008
(Dokumen Satgas 743/Psy)

- Melaksanakan peberdayaan wilayah pertahanan disepanjang perbatasan wilayah darat RI-RDTL seperti membantu masyarakat dibidang pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Disamping itu juga membantu masyarakat dalam membangun beberapa sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara bergotong royong antara personel satgas pamtas dengan masyarakat yang ada di sekitar wilayah pos dimana satgas pamtas berada.



Seorang anggota Satgas sedang memberikan pendidikan tambahan terhadap siswa SD yang ada diperbatasan (Dokumen Satgas 743/Psy 2011)

- Melakukan pencegahan dan mengawasi wilayah perbatasan agar tidak digunakan sebagai basis perlawanan terhadap RDTL.

Amunisi yang berhasil diamankan oleh Satgas Yonif 743/Psy di wilayah Openuli Pantai pada tanggal 20 Februari 2011. (Dokumen Satgas 743/Psy)



I. Hasil Yang Dicapai

- **Mencegah Pelanggaran Lintas Batas Illegal**

Dengan keberadaan Satgas Pamtas TNI AD di wilayah perbatasan RI-RDTL telah berhasil menurunkan jumlah angka pelanggar lintas batas illegal, baik yang menyeberang dari wilayah RI ke RDTL maupun sebaliknya. Beberapa orang yang memaksakan melintas batas secara illegal melalui “jalur tikus” berhasil diamankan oleh Satgas Pamtas yang tengah melaksanakan kegiatan patroli.

Sebagai perumpamaan gambaran keberhasilan tersebut dapat dilihat pada data laporan Satgas Pamtas pada tahun 2008, yaitu sejak Januari hingga September, yang menyatakan : pada bulan Januari berhasil digagalkan pelintas batas illegal 10 orang, bulan Februari 18 orang, bulan Maret 7 orang, bulan April 14 orang, bulan Mei 1 orang, bulan Juni 5 orang, bulan Juli 62 orang, bulan Agustus 3 orang, dan bulan September 3 orang.

Disamping pelintas batas illegal, Satgas Pamtas juga berhasil mencatat beberapa kali pelintasan helicopter illegal dari pihak asing yang terbang rendah melewati perbatasan RI-RDTL untuk selanjutnya di laporkan ke komando atas.²⁴⁾

- **Mencegah Penyelundupan**

Keberadaan Satgas Pamtas TNI AD di perbatasan RI-RDTL, terutama melalui kegiatan patroli yang dilakukan secara berkala, telah mampu menurunkan terjadinya penyelundupan yang rentan terjadi di wilayah perbatasan RI-RDTL. penyelundupan

²⁴⁾ Sumber: Laporan Satgas Pamtas 743/Psy tahun 2008.

yang berhasil digagalkan tersebut terdiri dari penyelundupan beras, sofi, bensin, minyak tanah dan solar.

Dari laporan Satgas Pamtas 743/Psy dinyatakan bahwa pada periode 1 Januari s.d. 20 Oktober 2008 telah terjadi sebanyak 25 kali kasus penyelundupan (dari RI ke Timor Leste) yang berhasil digagalkan oleh Satgas Pamtas. Penyelundupan tersebut berupa 3874 liter minyak tanah, 2200 liter solar, 470 liter bensin, 20 kg beras dan 10 liter sofi.

Dengan silih bergantinya Satgas Pamtas RI-RDTL dari tahun ke tahun, maka begitu banyak penyelundupan yang telah berhasil digagalkan oleh Satgas Pamtas selama ini. Namun data keberhasilan yang dikemukakan disini hanya sebagai sampel atau perumpamaan saja, bahwa keberadaan Satgas Pamtas di wilayah perbatasan memiliki andil dalam menurunkan angka penyelundupan di perbatasan RI-RDTL.

- **Menerima Penyerahan Senjata, Munisi dan Bahan Peledak**

Melalui penggalangan atau pendekatan yang penuh simpatik dilakukan oleh Satgas Pamtas TNI AD terhadap penduduk yang bermukim di wilayah perbatasan RI-RDTL, maka secara sukarela kemudian masyarakat tergerak hatinya untuk menyerahkan senjata, munisi dan bahan peledak yang selama ini disimpan kepada aparat Satgas Pamtas.

Dalam laporan Satgas Pamtas 743/Psy tahun 2008 dikemukakan bahwa pada periode 1 Januari sampai dengan 20 Oktober 2008 Satgas Pamtas TNI AD telah menerima penyerahan senjata, munisi dan

bahan peledak dari masyarakat eks Timtim maupun masyarakat NTT sebanyak 31 kali penyerahan. yaitu berupa 14 pucuk senapan laras panjang rakitan, 22 pucuk pistol rakitan, 1016 butir munisi campuran, 2 pucuk SKS, 6 buah mortir 80, dan 6 buah granat.

Dengan adanya penyerahan senjata, munisi dan bahan peledak dari masyarakat ke aparat Satgas Pamtas tersebut turut membantu menciptakan rasa aman dan damai di tengah-tengah masyarakat wilayah perbatasan RI-RDTL, serta dapat menurunkan angka kriminalitas.

- **Membantu Instansi Terkait**

Guna menciptakan keamanan di wilayah perbatasan RI-RDTL Satgas Pamtas membantu instansi terkait lainnya, seperti Polri, Bea Cukai dan Karantina dalam penegakan hukum di sepanjang wilayah perbatasan RI-RDTL. seperti dalam mengamankan orang asing yang memasuki wilayah RI dengan cara illegal, sehingga ditangkap, di karantina dan dideportasi.

Dalam laporan Satgas Pamtas Yonif 743/Psy tahun 2008 dilaporkan bahwa pada periode 1 Januari hingga 20 Oktober 2008 telah terjadi 20 kasus pendeportasian yang dilakukan oleh 13 orang WNI (deportasi dari RDTL ke RI), dan 39 orang WNTL (deportasi dari RI ke RSTL).

Potensi penyusupan secara illegal di wilayah perbatasan RI-RDTL yang selama ini cukup tinggi dilakukan baik oleh warga Negara RI maupun oleh warga Negara Timor Leste, dengan keberadaan Satgas Pamtas TNI AD dapat diminimalisir, meski sulit untuk dihapuskan sama sekali.

- **Mengamankan Patok Batas Negara**

Agar patok batas Negara yang sudah disepakati kedua Negara bertetangga tidak mengalami pergeseran dan perpindahan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, maka secara berkala Satgas Pamtas mengeluarkan patroli untuk guna melakukan pengecekan. Dengan adanya patrol pengecekan patok batas Negara tersebut maka keberadaan patot tetap aman pada posisinya.

Untuk wilayah perbatasan RI-RDTL memang belum semua patok batas yang disepakati, masih terdapat di beberapa batas wilayah yang masih dalam status quo sehingga memerlukan pengawasan dan penjagaan oleh Satgas Pamtas TNI AD.

- **Membantu Pemda Dalam Pemberdayaan Wilayah**

Walau sifatnya terbatas, personel Satgas Pamtas turut serta membantu Pemda dalam pemberdayaan wilayah yang ada di sekitar Pos Pamtas berada. Antara lain dengan membantu masyarakat dalam bidang kesehatan dan pendidikan sebatas yang dapat disumbangkan oleh Satgas Pamtas. Disamping itu juga secara bersama-sama dengan masyarakat sekitar pos Pamtas melaksanakan kegiatan karya bakti atau gotong royong dalam mengerjakan dan memelihara sarana dan prasarana umum, sehingga keberadaan Satgas Pamtas di tengah-tengah masyarakat wilayah perbatasan dapat dirasakan manfaat positifnya secara langsung.



BAB VI

Pengamanan Pulau-Pulau Terluar



Bab 6

PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR

Disamping pengamanan perbatasan darat Indonesia-PNG di pulau Papua, Indonesia-Malaysia di pulau Kalimantan, dan perbatasan Indonesia-Timor Leste di pulau Timor, TNI AD juga menempatkan prajuritnya di pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan Negara lain, terutama dalam rangka melakukan kegiatan pemantauan koordinasi dan melaporkan setiap perkembangan situasi.



Pulau Rote di Wilayah Kodam IX/Udayana, salah satu pulau terluar perbatasan Indonesia-Australia yang tugas pengamanannya dilaksanakan oleh prajurit TNI AD. (Dokumen Kodam IX/Udy, 2012)

Dari 92 pulau terluar (lihat lampiran) yang ada sesuai PP No 78 tahun 2005 yang diamankan 12 pulau, pengamanannya dilaksanakan oleh satuan Kodam dan TNI AL (Marinir dengan status BKO Kodam), yaitu : dibawah Kodam IM terdapat pulau

Rondo yang diamankan oleh 34 prajurit Marinir, dibawah Kodam I/BB terdapat pulau Berhala yang diamankan 34 prajurit Marinir, pulau Sekatung yang diamankan 34 prajurit Yonif 132, dan pulau Nipah diamankan oleh 90 prajurit Marinir. Dibawah Kodam VII/Wrb terdapat pulau Mianggas, Marore, dan Marapit yang masing-masing diamankan 34 prajurit Yonif 712. Dibawah Kodam IX/Udy terdapat pulau Dana (kepulauan Rote) yang diamankan 34 prajurit Marinir dan pulau Batek yang diamankan 34 prajurit Yonif 744. Di bawah Kodam XVII/Cen terdapat pulau Fani, Brasi, dan Fanildo yang masing-masingnya diamankan oleh 34 prajurit Marinir.²⁵⁾

Saat ini sebagian besar pulau-pulau terluar belum terkelola dengan baik sehingga memiliki potensi konflik yang dapat digunakan untuk kegiatan illegal/terorisme oleh Negara lain serta dikhawatirkan dalam jangka panjang akan dapat berdampak pada keutuhan kedaulatan wilayah Negara. Untuk pengelolaan pulau-pulau terluar merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, sementara TNI AD, dalam hal ini Kodam hanya mengelola bidang pengamanannya yang merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah sehingga masih diperlukan adanya kejelasan kewenangan Kodam dalam pengelolaan pulau terluar, terutama untuk menghindari kesalahan persepsi antara pemerintah daerah dengan Kodam.

Adapun nama-nama pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 (Sembilan puluh dua) pulau tersebut adalah sbb. :

1. P Sentut, di Kepulauan Riau.
2. P Tokong Malang Biru, di Kepulauan Riau.
3. P Damar, di Kepulauan Riau.
4. P Mangkai, di Kepulauan Riau.

²⁵⁾ Data Siapsat Sopsad, 2011

Bab 6

PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR

5. P Tokong Nanas, di Kepulauan Riau.
6. P Tokong Berlayar, di Kepulauan Riau.
7. P Tokong Boro, di Kepulauan Riau.
8. P Seimun, di Kepulauan Riau.
9. P Sebetul, di Kepulauan Riau.
10. P Sekatung, di Kepulauan Riau.
11. P Senua, di Kepulauan Riau.
12. P Subi Kecil, di Kepulauan Riau.
13. P Kepala, di Kepulauan Riau.
14. P Sebatik, di Kalimantan Timur.
15. P Gosong Makasar, di Kalimantan Timur.
16. P Maratua, di Kalimantan Timur.
17. P Sabit, di Kalimantan Timur.
18. P Lingiang, di Sulawesi Tengah.
19. P Salando, di Sulawesi Tengah.
20. P Dolangan, di Sulawesi Tengah.
21. P Bangkit, di Sulawesi Utara.
22. P Menterawu, di Sulawesi Utara.
23. P Makalehi, di Sulawesi Utara.
24. P Kawalesu, di Sulawesi Utara.
25. P Kawio, di Sulawesi Utara.
26. P Marore, di Sulawesi Utara.
27. P Batu Bawaikang, di Sulawesi Utara.
28. P Miangas, di Sulawesi Utara.
29. P Marimpit, di Sulawesi Utara.
30. P Intata, di Sulawesi Utara.
31. P Kakarutan, di Sulawesi Utara.
32. P Jiew, di Maluku Utara.
33. P Budd, di Papua.
34. P Fani, di Papua.

35. P Miossu, di Papua.
36. P Fanildo, di Papua.
37. P Bras, di Papua.
38. P Bepondi, di Papua.
39. P Liki, di Papua.
40. P Kolepon, di Papua.
41. P Laag, di Papua.
42. P Ararkula, di Maluku.
43. P Karaweira, di Maluku.
44. P Panambulai, di Maluku.
45. P Kultubai Utara, di Maluku.
46. P Kultubai Selatan, di Maluku.
47. P Karang, di Maluku.
48. P Enu, di Maluku.
49. P Batu Goyang, di Maluku.
50. P Larat, di Maluku.
51. P Asutubun, di Maluku.
52. P Selaru, di Maluku.
53. P Batarkusu, di Maluku.
54. P Masela, di Maluku.
55. P Meatimiarang, di Maluku.
56. P Leti, di Maluku.
57. P Kisar, di Maluku.
58. P Wetar, di Maluku.
59. P Liran, di Maluku.
60. P Alor, di Nusa Tenggara Timur.
61. P Batek, di Nusa Tenggara Timur.
62. P Dana, di Nusa Tenggara Timur.
63. P Dana, di Nusa Tenggara Timur.
64. P Mengudu, di Nusa Tenggara Timur.

Bab 6

PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR

65. P Sophialouisa, di Nusa Tenggara Timur.
66. P Barung, di Jawa Timur.
67. P Sekel, di Jawa Timur.
68. P Panehan, di Jawa Timur.
69. P Nusa Kambangan, di Jawa Tengah.
70. P Manuk, di Jawa Barat.
71. P Deli, di Banten.
72. P Batu Kecil, di Lampung.
73. P Enggano, di Bengkulu.
74. P Mega, di Bengkulu.
75. P Sibarubaru, di Sumatera Barat.
76. P Sinyaunyau, di Sumatera Barat.
77. P Simuk, di Sumatera Utara.
78. P Wunga, di Sumatera Utara.
79. P Simeulucut, di Nangroe Aceh Darusalam.
80. P Salaut Besar, di Nangroe Aceh Darusalam.
81. P Raya, di Nangroe Aceh Darusalam.
82. P Rusa, di Nangroe Aceh Darusalam.
83. P Benggala, di Nangroe Aceh Darusalam.
84. P Rondo, di Nangroe Aceh Darusalam.
85. P Berhala, di Sumatera Utara.
86. P Batu Mandi, di Kepulauan Riau.
87. P Iyu Kecil, di Kepulauan Riau.
88. P Karimun Kecil, di Kepulauan Riau.
89. P Nipa, di Kepulauan Riau.
90. P Palampong, di Kepulauan Riau.
91. P Batu Barhanti, di Kepulauan Riau.
92. P Nongsa, di Kepulauan Riau.

Disamping Negara tetangga yang berbatasan darat dengan Indonesia (Papua New Guinea, Malaysia, dan Timor Leste) terdapat Negara-negara tetangga yang berbatasan laut dengan Republik Indonesia, yang terdiri atas 10 (sepuluh) Negara, yakni sbb. :

1. Malaysia
2. Singapore
3. Philipina
4. India
5. Thailand
6. Vietnam
7. Palau
8. Australia
9. Timor Leste
10. Papua New Guinea

Pulau-pulau terluar yang berbatasan laut dengan kesepuluh Negara tetangga tersebut disamping pengamanannya dipercayakan kepada prajurit Marinir TNI AL, juga dipercayakan kepada Prajurit Yonif TNI AD dibawah kendali Kodam yang wilayahnya mencakup pulau-pulau terluar tersebut.

Peranan Kodam sebagai Kotama Operasi merupakan alat pertahanan Negara, yang bertugas menegakan kedaulatan Negara dan menjaga keutuhan serta mengamankan seluruh wilayah perbatasan darat NKRI yang syarat dengan potensi konflik dan timbulnya berbagai permasalahan perbatasan.

Bab 6

PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR



Satgas Yonif 715 Tengah Melaksanakan Tugas Pamtas di pulau terluar perbatasan RI-Fhilipina, (Dok Yonif 712, 2011)

Oleh kerana itu Kodam dalam pengamanan perbatasan darat berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap bentuk ancaman kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, serta pemulih untuk mengembalikan kondisi keamanan Negara.

Adapun pulau terluar yang mempunyai perbatasan dengan Negara lain, yang tugas pengamanannya dipercayakan kepada prajurit TNI AD, sebagai berikut²⁶⁾ :

1. Pamtas di Wilayah Kodam I/BB

Tugas pengamanan Pulau terluar yang menjadi tugas prajurit TNI AD di wilayah Kodam I/BB terdiri dari :

- a. P. Natuna merupakan wilayah kabupaten baru yang berpenghuni cukup padat dan berbatasan dengan Negara Vietnam, untuk pembinaan wilayah dan pengamanan perbatasan di pulau terluar tersebut Kodam I/BB menempatkan 1 Kodim dan 2 Kompi senapan untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang tak diinginkan.
- b. P. Karimun Kecil yang berbatasan dengan Malaysia, untuk mengantisipasi ancaman didaerah tersebut ditempatkan pos pengamanan dengan kekuatan 17 personel.
- c. P. Seimun yang berbatasan dengan Vietnam, untuk mengantisipasi ancaman melalui pulau tersebut ditempatkan pos pengamanan dengan kekuatan 17 personel.

2. Pamtas di Wilayah Kodam VI/Tpr

Tugas pengamanan Pulau terluar yang menjadi tugas prajurit TNI AD di wilayah Kodam VI/Tpr terdiri dari :

- a. P. Mertua yang dihuni penduduk 2.760 orang, terdapat 1 kecamatan, untuk mengantisipasi ancaman melalui pulau tersebut Kodam VI/Tpr menempatkan Babinsa (2 orang), Pos AL (5 orang), Pospam TNI AD (5 orang), diperkuat pos pengamanan 37 orang (1 Ton senapan Yonif TNI AD),

²⁶⁾ Lihat buku petunjuk tentang pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan darat, 30 November 2009, hal 75.

Bab 6

PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR

Termasuk dalam rangka pembinaan wilayah dan pengamanan perbatasan dengan Malaysia.

- b. P. Sebatik yang dihuni penduduk 29.404 orang, terdapat 1 kecamatan, untuk mengantisipasi ancaman di pulau tersebut ditempatkan Pos Koramil (4 orang), Pos AL (3 orang), Pospam TNI AD (5 orang), Polsek (15 orang) serta diperkuat Satgas Marinir 130 orang dan 37 orang (1 Ton Senapan Yonif TNI AD) yang bertugas melakukan pembinaan wilayah dan pengamanan perbatasan dengan Malaysia.



Satgas Pamtas disamping mengadakan patroli menyisir pantai pulau terluar dengan menggunakan perahu karet, juga melaksanakan kegiatan Dorlog lewat laut.
(Dok Yonif 712, 2011)

3. Pamtas di Wilayah Kodam VII/Wrb

Tugas pengamanan Pulau terluar yang menjadi tugas prajurit TNI AD di wilayah Kodam VII/Wrb terdiri dari :

- a. P. Marore, pada koordinat 06 44' 14" U-125 28' 42" T, luas 3,12 Km, lokasi di laut Sulawesi, wilayah Propinsi Sulut berbatasan dengan Fhilipina, dihuni penduduk 842 orang terdapat 1 kecamatan, untuk mengantisipasi ancaman di daeah tersebut ditempatkan pos Koramil (6 orang), Pos AL (3 orang), dan Pospam TNI AD (4 orang).



Pulau Marore. (Dokumen Yonif 712, 2012)

- b. P. Marampit pada kordinat 04 46' 18" U-127 08' 32" T, luas 12 km², lokasi di laut Sulawesi, berbatasan langsung dengan Philipina, di huni penduduk 1.436 orang, untuk mengantisipasi ancaman di wilayah tersebut ditempatkan Babinsa (1 Orang) dan diperkuat 1 Ton Marinir (-) 20 orang.

Bab 6

PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR



Pulau Marimpit. (Dokumen Yonif 712, 2012)

4. Pamtas di Wilayah Kodam IX/Udayana

Tugas pengamanan Pulau terluar yang menjadi tugas prajurit TNI AD di wilayah Kodam IX/Udy terdiri dari :

- a. P. Mangadu berbatasan dengan Australia merupakan daerah yang telah dikembangkan sebagai daerah pariwisata dan dikelola oleh warga Negara asing (Australia) yang sekarang masih bermasalah, namun sampai saat ini belum ada penempatan pasukan pengamanan.
- b. P. Batek, pada koordinat 09 15' 33" S – 123 59' 15" T, luas 0,1 km² lokasi laut Sawu, wilayah Provisi NTT berbatasan dengan Timor Leste, tidak berpenduduk, tetapi sudah ada sarana Bantu Navigasi (SBN), namun belum operasional, sering dikunjungi oleh Aparat Pemerintah dan masyarakat Timor Leste, akan tetapi sampai saat ini belum ada penempatan pasukan untuk pengamanan di pulau tersebut.



Pulau Batek di Wilayah Kodam IX/Udayana,
(Dokumen Yonif 744, 2012)

5. Pamtas di Wilayah Kodam XVI/Ptm

Tugas pengamanan Pulau terluar yang menjadi tugas prajurit TNI AD di wilayah Kodam XVI/Ptm terdiri dari :

- a. P. Lirang berbatasan langsung dengan RDTL ber-penduduk 437 orang, dengan 1 kecamatan, di pulau tersebut ditempatkan 1 Koramil, 1 orang Babinsa, 1 Pos AL, serta 1 Ton Senapan Yonif TNI AD (37 orang). yang bertugas guna mengantisipasi ancaman melalui pulau tersebut.
- b. P. Wetar berbatasan langsung dengan RDTL ber-penduduk 749 orang, dengan 1 Kecamatan, di pulau tersebut ditempatkan 1 Koramil (8 orang), 1 Pos AL, serta 1 Ton Senapan Yonif TNI AD (37 orang). Yang bertugas guna mengantisipasi ancaman melalui pulau tersebut.
- c. P. Kisar berbatasan langsung dengan RDTL berpenduduk 504 orang, 1 Kecamatan, di pulau tersebut ditempatkan 1

Bab 6

PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR

Koramil (13 orang), Pos AL, serta 1 Ton Senapan Yonif TNI AD (37 orang). Yang bertugas guna mengantisipasi ancaman melalui pulau tersebut.

6. Pamtas di Wilayah Kodam XVII/Cen

Tugas pengamanan Pulau terluar yang menjadi tugas prajurit TNI AD di wilayah Kodam XVII/Cen terdiri dari :

- a. P. Fani pada koordinat 01 05' 20" U - 131 15' 35" T , luas 9 km², lokasi di samudra Pasifik, wilayah Provinsi Papua berbatasan langsung dengan pulau berpenduduk 30 orang, untuk mengantisipasi ancaman melalui pulau tersebut ditempatkan 2 regu senapan Yonif TNI AD (17 orang).
- b. P. Brass (Pulau-Pulau Mapia). Pada Koordinat 00 55' 57" U - 134 20'30" T, luas 3,375 Km², lokasi di Samudra Pasifik, wilayah Provinsi Papua berbatasan langsung dengan Negara Palau, berpenduduk 58 orang, untuk mengantisipasi ancaman melalui pulau tersebut ditempatkan 2 regu senapan Yonif TNI AD (17 orang).

Disamping tugas perbatasan pulau-pulau terluar oleh TNI AD, pengamanan pulau-pulau terluar yang belum berpenghuni lainnya dilaksanakan oleh TNI AL dengan Menggelar satuan Marinir yang melibatkan sejumlah 220 orang personel. Adapun pulau-pulau terluar tersebut terdiri dari pulau Rondo di wilayah Provinsi NAD yang berbatasan dengan India dan Thailand, pulau Berhala di wilayah Provinsi Sumut yang berbatasan dengan Malaysia, pulau Nipah di wilayah Provinsi Riau yang berbatasan dengan Singapore, pulau Sekatung di wilayah Provinsi Riau yang berbatasan dengan Vietnam dan Cina, pulau Mangkai, pulau Subi Kecil, dan pulau Kepala yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Pulau Marimpit, pulau Nianas di wilayah Sulawesi yang berbatasan

dengan Filipina. Pulau Dana dan pulau Sabu di wilayah NTT yang berbatasan dengan Australia.

Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas Pamtas TNI AD di Pulau-pulau terluar, terutama berkaitan dengan tugas pengamanan pulau dalam rangka mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin terjadi melalui pulau tersebut.

Ancaman yang diperkirakan akan timbul di perbatasan Selat Malaka umpamanya, terjadinya kegiatan ilegal seperti perampokan, imigran gelap, penyelundupan sembako, TKI gelap, BBM, pencurian kekayaan laut, penyelundupan senjata api, penyelundupan narkoba, penyelundupan barang-barang elektronik, dan benturan antara kedua nelayan antar Negara.



Satgas Pamtas tengah mengawasi aktivitas penduduk di sebuah pelabuhan kecil pada salah satu pulau terluar. (Dok Yonif 712, 2011)

Bab 6

PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR

Dari berbagai aneka kerawanan di berbagai pulau-pulau terluar tersebut, maka satuan yang melaksanakan tugas Pamtas pada pulau-pulau terluar tersebut melaksanakan kegiatan patrol keliling pulau. Disamping itu kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh prajurit Satgas Pamtas dalam mengisi waktu luang, adalah dengan melaksanakan kegiatan olah raga bersama, melaksanakan pembersihan di sekitar pulau, melaksanakan kegiatan agama, dan juga melaksanakan Darlog pendistribusian Dukops yang dilaksanakan sebulan sekali.



Satgas Pamtas pulau terluar tengah melaksanakan kegiatan patroli pengamanan pulau.
(Dok Yonif 712, 2011)

Satuan TNI AD yang bertugas melaksanakan kegiatan Pamtas di pulau-pulau terluar tersebut terdiri dari personel Yonif Kodam yang kedudukannya berdekatan dengan pulau-pulau terluar tersebut, seperti dari Yonif 134 untuk pulau-pulau terluar

Peranan TNI AD

dalam Pengamanan Perbatasan NKRI

di wilayah Sumatera, Yonif 712 untuk pulau-pulau terluar di wilayah Sulawesi Utara, dan Yonif 744 untuk pulau-pulau terluar di wilayah Nusa Tenggara Timur.



BAB VII

Penutup



Dari berbagai uraian yang tercakup dalam buku ini, dapat dipahami bahwa tugas yang diemban oleh prajurit TNI AD dalam mengamankan wilayah perbatasan, terutama perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL tidaklah ringan karena wilayah perbatasan tersebut jauh letaknya dari ibu kota Negara sehingga seringkali tak terpantau dan terabaikan. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah perbatasan rentan dan rawan dari segi keamanan, dan berpotensi terjadinya konflik diantara Negara yang berbatasan bila segala sesuatunya tidak ditangani dengan bijak oleh pemerintah.

Dengan keberadaan Satgas Pamtas TNI AD di wilayah perbatasan, setidaknya keamanan di wilayah perbatasan dapat terjaga dengan baik, keluar masuknya barang-barang illegal dapat dihindari, begitu juga dengan kemungkinan bergesernya patok Negara yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dapat dicegah. Disamping itu pemberdayaan terhadap masyarakat di perbatasan yang dalam berbagai hal yang selama ini sangat tertinggal dibanding daerah lainnya dapat dibantu oleh personel Satgas Pamtas.

Disadari, buku ini jauh dari sempurna, namun sedikit banyaknya diharapkan dapat memberikan sekilas gambaran tentang tugas yang diemban oleh prajurit TNI AD dalam mengamankan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Selanjutnya kepada prajurit TNI AD dengan keberadaan buku ini diharapkan dapat memahami kondisi dan situasi daerah perbatasan sehingga memiliki bekal pengetahuan awal manakala suatu saat kelak memperoleh kepercayaan negara untuk mengemban tugas selaku Satgas Pamtas.

Semoga keberadaan buku ini semakin menyadarkan kita semua betapa pentingnya keberadaan penugasan prajurit TNI

Peranan TNI AD

dalam Pengamanan Perbatasan NKRI

AD di wilayah perbatasan serta memahami betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan oleh prajurit TNI AD di wilayah perbatasan, terutama dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI agar tetap utuh selama-lamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dispenad, *Terwujudnya Peran TNI Dalam Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Yudhagama, Jakarta, 2010.
- DPR – RI *Dalam masa persidangan 1 Tahun sidang 2005-2006 Ke Provinsi Maluku Utara*, Tanggal 12-15 Oktober 2005.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia jilid 10*, PT. Delta Pamungkas, Jakarta, 2004.
- Ja' achmad, *Geografi Budaya Daerah Kalimantan Barat*, Depdikbud, Jakarta, 1997.
- Kodam VI/Mulawarman, *Buku Sejarah Kodam VI/Mulawarman, dari Manutung Waja Sampai Kaputing*, Dam VI/Mulawarman, Balikpapan, 2010.
- Korem 174/ATW, *Sejarah Satuan Korem 174/ ATW Kodam XVII/Cendrawasih*, Korem 174, Merauke, 2011.
- Kodam XVII/Cendrawasih, *Buku Sejarah Kodam XVII/Cendrawasih 1963-2010*, Kodam XVII/Cen, Jayapura, 2010.
- Kodam IX/Udayana, *Buku sejarah satuan-satuan Kodam IX/Udayana*, Bintaldam IX/Udayana, 2009.
- Komando Daerah Militer XVI/ Pattimura, *Analisa Daerah Operasi Wilayah Kodam XVI/ Pattimura 11*, Kodam XVI/PTM., Ambon, 2011.

- Mabesad, *Bujuklak Tentang Pedoman Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat*, Mabesad, Jakarta, 2009.
- Mabesad, *Bujuklak TNI Tentang Operasi Pengamanan Perbatasan*, Mabesad, Jakarta, 2007.
- Pemda Kab. Keerom, *Pokok-Pokok pengaturan Lintas Batas Tradisional RI-PNG*, Pemerintahan Kabupaten Keerom, 2009.
- Triana Wulandari dkk, *Sejarah Wilayah Perbatasan Entikong-Malaysia 1845-2009*, Gratama Publishing, Depok, 2009
- Team Bakosurtanal, *Atlas Tematik Provinsi Maluku*, CV. Regina, Bogor, 2008.
- Team Bakosurtanal, *Atlas Tematik Provinsi NTT*, CV. Regina, Bogor, 2008
- Yudhagama volume 30 No. 3 Sept 2010, *terwujudnya Peran TNI Dalam memperdayakan Pulau-Pulau Terluar Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Dinas Penerangan AD,Jkt 2010 Kunjungan kerja Komisi I .
- Zeni Dam XII/Tanjungpura, *Tanjungpura Berdjung*, Zidam XII/Tp., Pontianak, 1970.

INDEKS

A

Akp Dagia, 90;
Alor, 106, 108, 111, 150;
Antonius Herry, 88
Atambua Barat, 127, 128;
Australia, 107, 108, 110, 116, 152, 157, 160;

B

Babang, 65, 68, 84, 87, 90, 92, 94, 95, 96
Badau, 65, 68, 71, 93, 94, 95, 100,
Batek, 108, 109, 148, 150, 157;
Bauksit, 73;
Belanda, 13, 25, 31, 46, 49, 73;
Belu, 34, 98, 102, 106, 107, 110, 111, 114, 115, 117, 125, 127, 128,
130, 131, 132, 138;
Bengkayang, 63, 64, 68, 90, 92, 95, 96;
Brasi, 13, 148;
Bugis, 69;

E

Eko, 86;
Entikong, 65, 67, 68, 71, 75, 77, 84, 94, 95, 101;
Etnosentrisme budaya, 26

F

Fani, 13, 148, 150, 159;
Fanildo, 13, 148;
Filipina, 9;
Flores Timur, 106

G

Gerakan Separatis Papua Bersenjata, 27, 30, 31, 58;
Gerakan Separatis Papua Politik, 26, 27, 28, 30;
GPK, 25

H

Hutan Heterogen, 20
Illegal Logging, 48, 58, 70;
India, 9, 152, 159;
Infiltrasi, 3, 13, 37, 38, 49;

J

Jagoi Babang, 65, 84, 87, 90, 92, 94, 95, 96
Jawa, 17, 20, 69,;

K

Kalimantan Barat, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77,
79, 80, 81, 82, 83, 85, 99;
Kalimantan Timur, 63, 64, 67, 68, 76, 149;
Kamtibmas, 35
Kapuas Hulu, 63, 64, 68, 70, 77, 80, 100;
Kupang, 105, 106, 108, 109, 117, 129, 133, 138;
Kutai Barat, 63, 64;

L

Letda Inf Alfian Erwin, 90;
Letkol Inf Basri, 80;
Letkol Inf Chanlan Adilanan, 80;
Letkol Inf Gausudin Amin, 80;
Letkol Inf Makmur, 80;
Letkol Inf Tri Sakti, 80, 99
Letkol Inf Tri Saktiono, 80;
Letkol Inf Wim Mulyadi Purba, 80;
Lettu Inf Dedi Harnoto, 95;

M

Madura, 20, 69;
Makassar, 20, 69;
Malaysia, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 63, 64, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80,
81, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100,
102, 147, 152, 154, 155, 160, 163;
Malinau, 63, 64;

Maluku, 17, 149, 150;
Manggarai, 106;
Marinir, 12, 13, 147, 148, 152, 155, 156, 159;
Meridian Monument, 38, 46, 47, 57;

N

Ngada, 106;
Nunukan, 63, 64, 68;
Nusa Tenggara Timur, 4, 105, 106, 108, 111, 150, 151, 162;

O

Organisasi Papua Merdeka, 25, 26, 31, 34;

P

Papua, 4, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 58, 147, 149, 150, 152, 159;
Papua New Guinea, 4, 9, 56, 152;
Pepera, 25, 49;
Petrus Tamek, 88;
Pontianak, 70, 73, 100;
Pulau Dana, 12, 110, 148, 160;
P. Fani, 159

S

Sabah, 63, 73, 77;
Sambas, 63, 68, 70, 73, 77, 80, 88, 97, 98, 100;
Sanggau, 63, 68, 70, 77, 99;
Sarawak, 63, 65, 68, 71, 72, 98, 102;
Satgas Pamtas, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 76, 81, 86, 87, 90, 94, 95, 99, 124, 126, 127, 131, 134, 139, 141, 142, 143, 144;
Sekayam Raya, 95;
Seribu Sungai, 66;
Sertu Kardiman, 90;
Sertu Teguh Wahyono, 91;

Sikka, 106;
Singapore, 9, 152, 160;
Sintang, 63, 68, 70, 77, 98;
Suku Ambon, 20;
Suku Dayak, 69, 96;
Suku Malayu, 69;
Suku Melanesia, 20;
Sumba, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 144;
Sumba Barat, 106;
Sumba Timur, 106, 110;

T

TDM, 89, 92, 94, 97;
Thailand, 9, 152, 159;
Timor Leste, 105, 111, 113, 114, 115, 116, 122, 127, 134, 142, 143,
147, 152, 157, 158;
TNI AD, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 35, 36, 38, 39, 44, 47, 51, 52, 58, 59,
77, 80, 94, 97, 98, 122, 126, 134, 141, 142, 143, 144, 147,
148, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164;
TNI AL, 12, 143, 152, 159;
UNTEA, 25;

V

Vietnam, 9, 152, 154, 160;

W

Warsmol, 34;

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

A

- AD : Angkatan Darat
AL : Angkatan Laut

B

- BLK : Balai Latihan Kerja
BLT : Batas Laut Teritorial
BPU : *Border Patrol Unit*

F

- FFDTL : *Forca Frenti De Feza* Timor Leste

G

- GPK : Gerakan Pengacau Keamanan
GSP/P : Gerakan Saparatis Papua Politik
GSP/B : Gerakan Saparatis Papua Bersenjata

H

- HAM : Hak Azasi Manusia

J

- JP : *Juncion Point*

K

- KOREM : Komando Resimen Militer
KOLAKOPS : Komando pelaksana Operasi

L

- LN : Luar Negeri
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

M

- MM : Meredian Monument

N

- NTB : Nusa Tenggara Barat
NTT : Nusa Tenggara Timur
NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

O

OMP	: Operasi Militer Perang
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
OMSP	: Operasi Militer Selain Perang

P

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PNG	: Papua New Guinea
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PPI	: Pejuang Pro Integrasi
PEMDA	: Pemerintah Daerah
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
PAMTAS	: Pengamanan Perbatasan
PDRM	: Polisi Diraja Malaysia

R

RI	: Republik Indonesia
RDTL	: Republik Demokratik Timor Leste

S

SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SATGAS	: Satuan Tugas

T

TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TDM	: Tentara Direja Malaysia
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TPN	: Tentara Pembebasan Nasional
TTU	: Timor Tengah Utara
TTS	: Timor Tengah Selatan

U

UPF	: Unidade Patrolhamento Forientra
-----	-----------------------------------

W

WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia

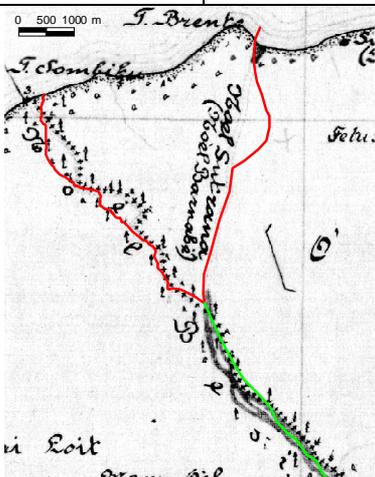
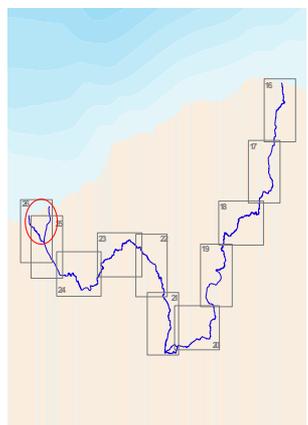
Z

ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif
-----	--------------------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

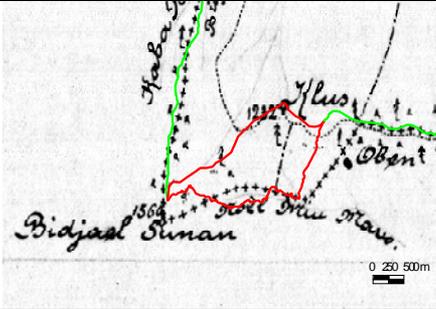
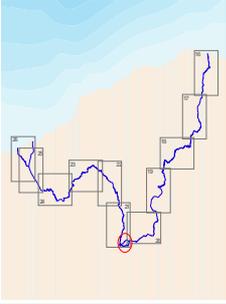
Tabel 1 :
Daerah-daerah yang masih menjadi sengketa
antara RI dengan RDTL.

(Sumber: Kodam IX/Udy.2011)

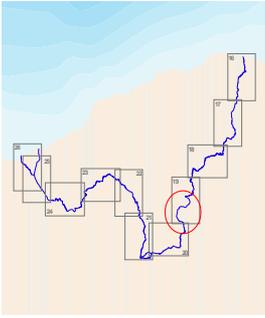
SEGMENTS	NOEL BESI	PANJANG atau LUAS:	1009 Hektar
PROBLEMS NATURE	Discrepancy between toponimy at the Treaty time and present toponimy		
			
REVIEW POSISI	<p><u>Posisi TL:</u> Posisi di Treaty jelas mengacu pada sungai yang sebelah barat; Azimut yang ada di Treaty untuk menentukan posisi muara juga jelas dan mengacu pada sungai sebelah barat; Nama Noel Besi diberikan untuk sungai yang sebelah barat dalam peta Treaty; Dokumen Oil Poli secara khusus menyebutkan bahwa batasnya mengikuti Nono-Tu-I-Nam; Semua peta menunjukkan batasnya sebagai garis yang diusulkan oleh TL dan tidak satu peta pun</p>		

	<p>ditemukan menunjukkan garis yang lain. Garis di Nono-Tu-I-Nam telah diterima sebagai garis batas antara Timor Portugis dan Indonesia dan antara Timor Portugis dan Belanda (batas provinsi antara NTT dan TimTim juga mengikuti garis TL). <u>Posisi RI:</u> Noel Besi yang ada di lapangan sekarang adalah sungai besar di sebelah timur delta. Penempatan nama geografis Noel Besi pada aliran yang kecil yang dikenal sebagai Sakotuinan adalah kesalahan toponimy. Nama Noel Besi jelas mengacu pada sungai besar bukan yang kecil yang kadang-kadang kering. Azimut diukur dari tempat yang salah. Ada kemungkinan bahwa peta yang ada diturunkan dari sumber yang tidak bisa dipercaya. <u>Komentar untuk posisi RI:</u> Posisi RI didasarkan hanya pada fakta bahwa nama Noel Besi saat ini dipakai tidak seperti pada Treaty. Tidak memperhatikan bahwa azimut yang dijelaskan dalam teks Treaty harus diukur di lapangan sehingga dengan demikian tidak ada lagi keraguan. Tidak mempertimbangkan dokumen Oil Poli.</p>
<p>PEMBAHASAN & REKOMENDASI 9 SEPTEMBER 2004</p>	<p>Beberapa hal yang melemahkan posisi Indonesia: Peta Portugis skala 1:50.000 menamakan kedua sungai dengan “Noel Besi”, Peta-peta provinsi Indonesia lama, baik terbitan Pemerintah maupun swasta yang ada di pasaran menunjuk garis batas pada sungai yang kiri (barat). <u>Rekomendasi:</u> Bertahan atau dibagi dua.</p>
<p>PEMBAHASAN & REKOMENDASI 1 OKTOBER 2004</p>	<p><i>POSISI 1: BERTAHAN</i></p> <p>Setelah melihat keterangan yang terdapat di dalam dokumen Oil Poli 1916, maka dapat digiring bahwa posisi sungai Noel Besi adalah yang berada di sebelah timur (kanan). Dasar penentuan statement tersebut di atas di antaranya tidak memungkinkan point Bokos ada di dua tempat (lihat dokumen Oil Poli n.41& 42)</p>

	<p>Posisi pengukuran azimuth berada di percabangan. Dan konteks “can be sighted” di dalam treaty memerlukan suatu pengkajian lebih dalam.</p> <p>“Kelemahan” yg mungkin ada untuk argumentasi azimuth:</p> <p>Titik di pantai lebih labil untuk menjadi titik awal pengukuran azimuth</p> <p>Maka mungkin diambil percabangan Bokos sebagai titik awal pengukuran.</p> <p><i>POSISI 2: BAGI DUA</i></p> <p>Treaty 1904 masih berlaku</p> <p>Di Treaty berlaku talweg, tapi talweg yang mana? (talweg kenyataan berubah-ubah)</p> <p>Ada kesepakatan bahwa <u>river island</u> sebagai river bed (dok .../TOR.....)</p> <p>Mengacu peta Portugis skala 1:50.000 (1963), dengan demikian logis bahwa tepi barat sungai Noel Besi yg ke kiri dan tepi timur sungai Noel Besi yg ke kanan merupakan dua tepi sebuah sungai yang besar</p> <p>Selanjutnya dapat direkomendasikan mengambil garis tengah (median) dari kedua tepi sebagai solusi dengan semangat persahabatan</p> <p>Selanjutnya, jika sebuah sungai Noel Besi yg besar ini dijadikan titik awal pengukuran azimuth, logis jika digunakan salah satu titik di ujung tepi kiri dari sebuah sungai besar tersebut sebagaimana yg sudah terjadi.</p> <p>Konsep talweg jaman dulu adalah agar masyarakat kedua pihak bisa menggunakan air tersebut, sementara isu azimuth tidak memberikan asas manfaat bersama sebagaimana ada dalam konsep thalweg</p>
--	--

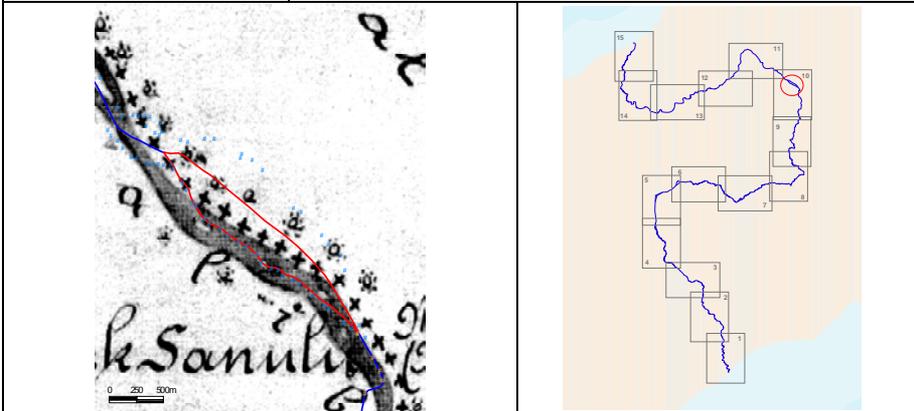
SEGMENTS	Manusasi (Bijael Sunan – Oben)	PANJANG atau LUAS:	141 Hektar
PROBLEMS NATURE	RI is not following the Treaty 1904 but different criteria.		
			
REVIEW POSISI	<p>Posisi TL: Proposal Timor-Leste mengikuti deskripsi Treaty yang sudah jelas. Perbedaan antara kedua proposal didasarkan pada fakta bahwa proposal RI tidak mengikuti Treaty 1904, melainkan klaim lahan dengan dasar yang berbeda.</p> <p>Posisi RI: Indonesia berpendapat bahwa penting dan wajib untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak ulayat dan hukum adat dari masyarakat yang tinggal di sepanjang perbatasan dalam menyelesaikan masalah delineasi batas. Indonesia juga mengusulkan agar kedua pihak menyetujui bahwa masyarakat lokal kedua pihak bertemu dan berdiskusi.</p>		
PEMBAHASAN & REKOMENDASI 9 SEPTEMBER 2004	<p>Kelemahan posisi Indonesia: Overlay dengan peta Treaty menunjukkan bahwa batasnya adalah garis yang selatan (bawah), selain itu juga di lapangan pada garis tersebut ada pilar ex batas provinsi.</p> <p>Rekomendasi: Dengan argumentasi yang lemah maka kemungkinan batasnya adalah garis yang selatan (bawah), dengan usulan “kompensasi” berupa diperbolehkan</p>		

	menggunakan lahan “sengketa” untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia.
PEMBAHASAN & REKOMENDASI 1 OKTOBER 2004	<p>Mengingat kondisi pemahaman dan klaim yang ada di pihak Pemda, maka perlu adanya sosialisasi yang jauh lebih mendalam tentang kondisi batas yang sebenarnya.</p> <p>Masih berlaku usulan kompensasi terhadap penggunaan lahan yang pada saat ini dikelola penduduk RI. Hal ini mengingat bahwa mengedepankan masalah Communal Rights sbagai dasar, kurang kuat di dalam perundingan.</p> <p>Usulan mengenai penerimaan proposal TL dengan kompensasi penggunaan lahan, akan disampaikan di dalam forum JBC. TSC-BDR adalah lembaga teknis.</p> <p>JBC national Indonesia akan memutuskan untuk propose masalah kompensasi ini dalam bentuk agreement bilateral.</p>

SEGMENTS	SUBINA	PANJANG atau LUAS:	12 Kilometer
PROBLEMS NATURE	Local NTT population didn't allow the joint survey team to work in this area. The available information is not considered sufficient by both sides to the formulation of either agreed or alternative lines.		
			
REVIEW POSISI	<u>Posisi TL:</u> <u>Posisi RI:</u> <u>Komentar untuk posisi RI:</u>		

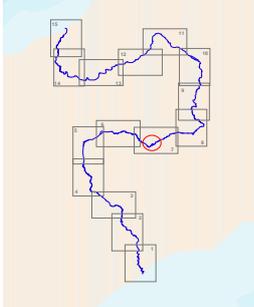
PEMBAHASAN & REKOMENDASI 9 SEPTEMBER 2004	Secara teknis tidak ada masalah karena hasil pengkajian kedua tim atas Treaty 1904 adalah sama. <u>Rekomendasi:</u> Diselesaikan secara sosialisasi.
PEMBAHASAN & REKOMENDASI 1 OKTOBER 2004	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi secara internal menyeluruh. - Memerlukan <i>joint survey</i> lebih lanjut.

SEGMENTS	Dilumil/Memo	PANJANG atau LUAS:	37 Hektar
PROBLEMS NATURE	Lack of detail in the Treaty map. River flow changed recently by human intervention.		



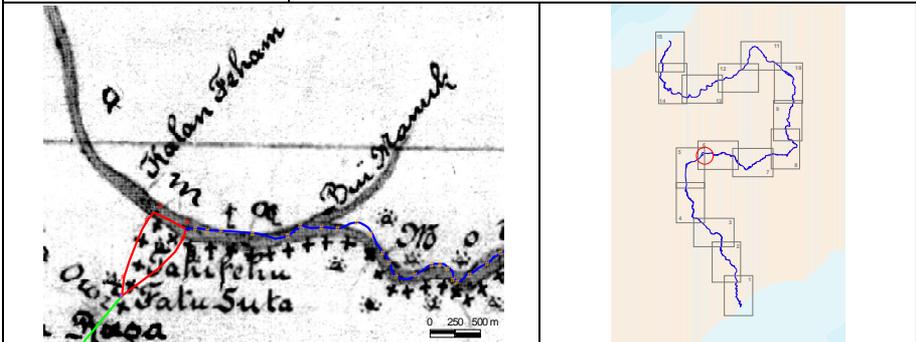
REVIEW POSISI	<u>Posisi TL:</u> Pulau ini sudah dipakai bercocok tanam oleh masyarakat TL selama bertahun-tahun. Keadaan di mana dataran (dasar) sungai sudah dipakai oleh masyarakat lokal harus dipertimbangkan terpisah dari keadaan lahan yang tidak digunakan (lihat Joint Technical Specifications presented at 1 st JBC meeting). Peta Portugis skala 1/50.000 menunjukkan bahwa pulau tersebut milik Portugis. Tidak ada bukti lain bahwa pulau tersebut dibagi atau dikelola oleh Belanda atau Indonesia. <u>Posisi RI:</u> Informasi lokal mengindikasikan bahwa pulau
----------------------	--

	<p>ini ditanami oleh masyarakat kedua pihak. Perbedaan interpretasi tepi sungai. Garis median digunakan untuk menentukan garis batas di dataran (dasar) Malibaca, tanpa memperhatikan keberadaan pulau tersebut (lihat Joint Technical Specifications presented at 1st JBC meeting). <u>Komentar untuk posisi RI:</u> Pulau ini tidak bisa dipertimbangkan sebagai pulau yang “temporer” atau tidak ada karena sudah digunakan untuk keperluan pertanian. Hal ini menjadi satu kasus kesepakatan tersendiri jika tidak memperhatikan keberadaan pulau yang permanen.</p>
<p>PEMBAHASAN & REKOMENDASI 9 SEPTEMBER 2004</p>	<p>Kedua tim telah mengukur secara bersama kedua river bank, dengan maksud untuk dapat menghitung garis median; selain itu juga sudah ada pilar ex batas provinsi (pilar P011) tepat berada di garis median. <u>Rekomendasi:</u> Buat garis median sebagai batas.</p>
<p>PEMBAHASAN & REKOMENDASI 1 OKTOBER 2004</p>	<p>Perlu dicari dokumen yang memberi gambaran bahwa pihak TL memang tidak bermasalah dengan konsep median line. Mengingat bahwa kedua pihak telah melakukan pengukuran tepi sungai dengan tujuan mengukur median. Tentunya klausul tentang hal ini ada sebelum dilaksanakan survey. Posisi Indonesia akan bertahan dengan “median line”</p>

SEGMENTS	Mota Tiborok	PANJANG atau LUAS:	15 Hektar
PROBLEMS NATURE	Discrepancy between present toponimy and Treaty toponimy.		
			
REVIEW POSISI	<p><u>Posisi TL:</u> Nama Mota Tiborok dalam peta Treaty tidak berkaitan dengan sungai yang diidentifikasi saat ini. Bentuk garis batas yang tampak di peta Treaty menyerupai bentuk alternatif TL, yang juga didukung oleh peta Portugis skala 1/50.000. Lokasi sebuah pilar tua NE di Dato Miet dekat dengan sumber mata air sungai yang ada di peta, jadi menguatkan bahwa ini adalah aliran/sungai yang harus diikuti menghubungkan Mota Tiborok dengan puncak Dato Miet.</p> <p><u>Posisi RI:</u> <i>Mota ditemukan dan diidentifikasi di lapangan dan juga disetujui oleh kedua pihak, sebagaimana ditunjukkan oleh masyarakat lokal kedua pihak.</i></p> <p>Sumber Mota Tafara diidentifikasi sebagai titik temu Mota Tiborok dengan Mota Materan.</p> <p><u>Komentar untuk posisi RI:</u> Posisi RI tidak mempertimbangkan acuan pada pilar tua NE di Dato Miet (dokumen Mota Talas) dan semua peta-peta yang ada.</p>		
PEMBAHASAN & REKOMENDASI 9 SEPTEMBER 2004	<p>Jika melihat overlay dengan peta Treaty 1904, maka posisi Indonesia lemah.</p> <p><u>Rekomendasi:</u> Ambil titik tengah dan dibagi dua.</p>		

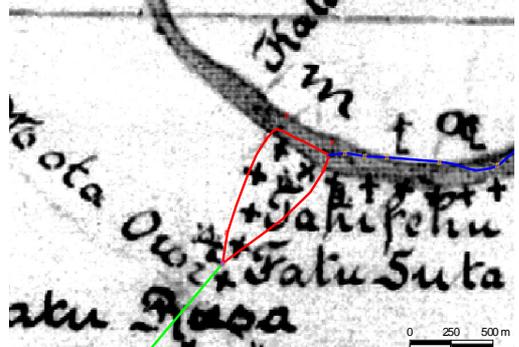
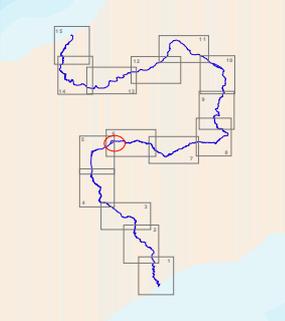
<p>PEMBAHASAN & REKOMENDASI 1 OKTOBER 2004</p>	<p><i>TL's position based on what????</i> (Patut dipertanyakan tentang penarikan garis mengikuti alur sungai yang di dalam treaty sendiri tidak disebutkan. Dan selain itu kenapa berhenti di titik tersebut (lihat peta) lalu baru naik ke titik selanjutnya.)</p> <p><i>TL's position always uses the treaty map. We have to prove that there are so many errors in the treaty map.</i></p> <p>Untuk itu posisi RI akan tetap bertahan dengan meminta penjelasan posisi TL. Apabila harus berkompromi maka baru akan menekan dengan proposal "median line"</p>
---	--

<p>SEGMENTS</p>	<p>Kalan Fehan</p>	<p>PANJANG atau LUAS:</p>	<p>20 Hektar (ber-sama Tahi Fehu)</p>
<p>PROBLEMS NATURE</p>	<p>There is no consensus on the identification of a small river named Kalan-Fehan.</p>		



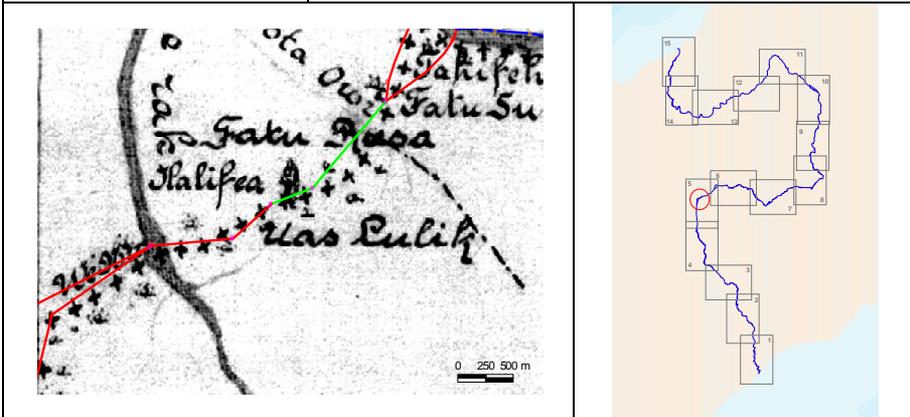
<p>REVIEW POSISI</p>	<p><u>Posisi TL:</u> Lokasi yang diusulkan oleh TL untuk titik belok dari Mota Baucama ke tahi Fehu dekat dengan lokasi yang diidentifikasi di peta Treaty. Posisi tersebut konsisten dengan yang ditunjukkan di peta-peta lainnya. Sungai yang diidentifikasi sebagai Kalan Fehan</p>
-----------------------------	---

	<p>oleh masyarakat lokal TL ada di tempatnya.</p> <p><u>Posisi RI:</u> Masyarakat lokal Indonesia menjelaskan bahwa Kalan Fehan bukanlah sungai melainkan daerah dataran yang ditumbuhi tumbuhan gelagah berada di titik temu sungai Boelean dan sungai Mauruklot ke sungai Malibaca. Indonesia memerlukan studi lebih lanjut tentang lokasi yang sebenarnya untuk Kalan Fehan.</p> <p><u>Komentar untuk posisi RI:</u> Posisi RI tidak memperhatikan peta Treaty atau peta lainnya.</p>
PEMBAHASAN & REKOMENDASI 9 SEPTEMBER 2004	<p>Informasi dari local people bervariasi dan tidak konsisten.</p> <p><u>Rekomendasi:</u> Bertahan dengan posisi.</p>
PEMBAHASAN & REKOMENDASI 1 OKTOBER 2004	<p>Perlu disiapkan jawaban terhadap argumentasi yang selalu digunakan oleh Prof Matos bahwa terdapat pilar di wilayah yang diklaim TL.</p> <p>Akan coba dipelajari lebih lanjut tentang dokumen yang digunakan pihak TL untuk melandasi klaim-nya. Untuk itu lebih lanjut akan diusahakan untuk mengeluarkan dokumen tersebut dari interim report yang sudah ada. Hal ini atas dasar, adanya gambaran bahwa dokumen tersebut berasal dari dokumen unilateral portugis.</p> <p>Bertahan dengan posisi.</p>

SEGMENTS	Tahi Fehu	PANJANG atau LUAS:
PROBLEMS NATURE	No consensus on the identification of the position.	
		
REVIEW POSISI	<p><u>Posisi TL:</u> Opsi TL diberikan dimana masyarakat lokal melaporkan adanya pilar batas sebelumnya; titiknya berada di punggung antara puncak-puncak (sebagaimana diacu di Treaty).</p> <p><u>Posisi RI:</u> <i>Masyarakat kedua pihak menunjukkan bahwa Tahi Fehu adalah gunung tertinggi di daerah itu; definisi "passing through" dalam Treaty harus diartikan dengan jelas di lapangan dengan menemukan puncak gunungnya;</i></p> <p><i>Kedua tim survei tidak menemukan pilar-pilar tua di la daerah tersebut;</i></p> <p>Indonesia memerlukan studi lebih lanjut tentang interpretasi atas dokumen pendukung yang tertulis dalam bahasa Peranis.</p> <p><u>Komentar untuk posisi RI:</u> Posisi RI mempertimbangkan batas yang melalui (passing through) puncak Tahi Fehu dimana dokumen referensi jelas menyatakan bahwa garisnya melalui punggung di antara puncak-puncak.</p>	
PEMBAHASAN & REKOMENDASI 9 SEPTEMBER 2004	<p>Interpretasi atas puncak Tahi Fehu berbeda. <u>Rekomendasi:</u> Bertahan dengan posisi.</p>	

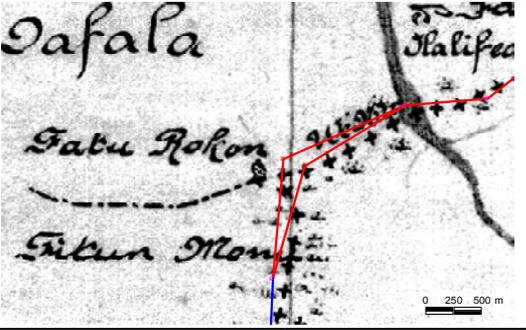
PEMBAHASAN & REKOMENDASI 1 OKTOBER 2004	Bertahan dengan posisi.
---	-------------------------

SEGMENTS	Uas Lulik	PANJANG atau LUAS:
PROBLEMS NATURE	Discrepancy between present toponimy and Treaty toponimy.	



REVIEW POSISI	<p><u>Posisi TL:</u> Peta Treaty menunjukkan bahwa Uas Lulik sesuai dengan proposal TL. Garis di peta Treaty sesuai dengan interpretasi TL. Tempat yang saat ini diidentifikasi sebagai Uas Lulik menghasilkan garis batas yang tidak logis. Dalam dialek lokal Tetum Teric, arti Abad Lulik dan Uas Lulik mirip (Lulik=suci; Uas=pohon; Abad=pohon kelapa).</p> <p><u>Posisi RI:</u> Masyarakat lokal kedua pihak mengidentifikasi toponimi Treaty Uas Lulik sebagai Abad Lulik. Sementara toponimi saat ini untuk Uas Lulik berlokasi sekitar 6 kilometer selatan Abad Lulik. <u>Komentar untk posisi RI:</u></p>
----------------------	--

	Posisi RI tidak mengambil garis di peta Treaty atau peta-peta lainnya.
PEMBAHASAN & REKOMENDASI 9 SEPTEMBER 2004	Peta-peta lama (Portugis dan Belanda) menunjukkan posisi Uas Lulik di jalur batas, sementara di lapangan ditemukan nama Abad Lulik. <u>Rekomendasi:</u> Mengikuti batas sesuai Treaty 1904, tetapi mengusulkan untuk merubah toponimi di Treaty dari uas Lulik menjadi Abad Lulik.
PEMBAHASAN & REKOMENDASI 1 OKTOBER 2004	Sesuai dengan hasil pertemuan sebelumnya (9 September 2004).

SEGMENTS	Fatu Rocon	PANJANG atau LUAS:	19 Hektar
PROBLEMS NATURE	The “big-stone” mentioned in the Treaty is not there anymore. The NTT locals didn’t allow the Joint Team to do the survey of the position pointed by TL locals.		
			
REVIEW POSISI	Posisi TL: Posisi TL adalah tempat yang tepat yang dekat dengan titik tengah antara 2 titik yang disurvei. Kemungkinan ini perlu dievaluasi di		

	<p>lapangan. Sesuai dengan informasi terkini, disayangkan bahwa tidak mungkin dilakukan survei untuk lokasi tersebut. <u>Posisi RI:</u> Posisi Indonesia adalah bahwa garis batasnya melalui alternatif yang sebelah timur Fatu Rocon. <u>Komentar untuk posisi RI:</u></p>
<p>PEMBAHASAN & REKOMENDASI 9 SEPTEMBER 2004</p>	<p>Kedua tim teknis telah mengukur titik-titik hasil interpretasi masing-masing. <u>Rekomendasi:</u> Bertahan, atau mengukur titik tengah dari dua titik yang berbeda.</p>
<p>PEMBAHASAN & REKOMENDASI 1 OKTOBER 2004</p>	<p>terjadi inkonsistensi posisi TL terhadap patern treaty map. Secara informal, TL menginginkan "median line" Sesuai dengan pertemuan selanjutnya. Bertahan, lalu apabila berkompromi dengan posisi median.</p>

(Sumber: Kodam IX/Udy, 2011)

Lampiran 2 :
DAFTAR PULAU-PULAU TERLUAR

NO	NAMA PULAU	PERAIRAN, KOORDINAT TITIK TERLUAR (LINTANG, BUJUR)	TITIK DASAR DAN PETUNJUK JENIS GARIS PANGKAL	PROVINSI
1	2	3	4	5
1.	P. SENTUT	SELAT SINGAPURA 01°02'52" U 104°49'50" T	TD.001A TR.001A Jarak TD.001A TD.022=88.06 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU
2.	P. TOKONG MALANG BIRU	LAUT NATUNA 02°18'00" U 105°35'47" T	TD.002 TR.002 Jarak TD.002-TD.023=29.50 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU
3.	P. DAMAR	LAUT NATUNA 02°44'29" U 105°22'46" T	TD.023 TR.023 Jarak TD.023-TD.024=24.34 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU
4.	P. MANGKAI	LAUT NATUNA 03°05'32" U 105°35'00" T	TD.024 TR.024 Jarak TD.024-TD.025=26.28 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU
5.	P. TOKONG NANAS	LAUT NATUNA 03°19'52" U 105°57'04" T	TD.025 TR.025 Jarak TD.025-TD.026=20.35 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU
6.	P. TOKONG BELAYAR	LAUT NATUNA 03°27'04" U 106°16'08" T	TD.026 TR.026 Jarak TD.026-TD.028=70.03 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU
7.	P.TOKONGBORO	LAUT NATUNA 04°04'01" U 107°26'09" T	TD.028 TR.028 Jarak TD.028-TD.029=32.06 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU
8.	P. SEMIUN	LAUT NATUNA 04°31'09" U 107°43'17" T	TD.029 TR.029 Jarak TD.029-TD.030A=15.76 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU
9.	P. SEBETUL	LAUT CINA SELATAN 04°42'25" U 107°54'20" T	TD.030A TR.030A Jarak TD.030A-TD.030B=8.18nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU

1	2	3	4	5
10.	P. SEKATUNG	LAUT CINA SELATAN 04°47'45" U 108°01'19" T	TD.030B TR.030A Antara TD.030B-TD.030D nm Garis Pangkal Biasa Dan TD.030D TR.030 Jarak TD.030D-TD.031=52.58 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU
11.	P. SENUA	LAUT CINA SELATAN 04°00'48" U 108°25'04" T	TD.031 TR.031 Jarak TD.031-TD.032=66.03 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU
12.	P. SUBI KECIL	LAUT NATUNA 03°01'51" U 108°54'52" T	TD.032 TR.032 Jarak TD.032-TD.033=27.67 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU
13.	P. KEPALA	LAUT NATUNA 02°38'43" U 109°10'04" T	TD.033 TR.033 Jarak TD.033-TD.035=44.10 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU
14.	P. SEBATIK	SELAT MAKASAR 04°10'00" U 117°54'00" T	CTD. 036 CTR. 036	KALIMANTAN TIMUR
15.	P. GOSONG MAKASAR	LAUT SULAWESI 03°59'25" U 117°57'42" T	CTD. 026E CTR. 036E	KALIMANTAN TIMUR
16.	P. MARATUA	LAUT SULAWESI 02°15'12" U 118°38'41" T	TD.039 TR.039 Jarak TD.039-TD.040=36.95 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KALIMANTAN TIMUR
17.	P. SAMBIT	LAUT SULAWESI 01°46'53" U 119°02'26" T	TD.040 TR.040 Jarak TD.040-TD.043=84.61 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KALIMANTAN TIMUR
18.	P. LINGIANG	SELAT MAKASAR 00°59'55" U 120°12'50" T	TD.043 TR.043 Jarak TD.043-TD.044=40.21 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	SULAWESI TENGAH
19.	P. SALANDO	LAUT SULAWESI 01°20'16" U 120°47'31" T	TD.044 TR.044 Jarak TD.044-TD.044A=6.05 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	SULAWESI TENGAH

1	2	3	4	5
20.	P. DOLANGAN	LAUT SULAWESI 01°22'40" U 120°53'04" T	TD.044A TR.044A TD.044B Antara TD.044A-TD.044B=6.05 nm Garis Pangkal Biasa	SULAWESI TENGAH
21.	P. BANGKIT	LAUT SULAWESI 01°02'52" U 123°06'45" T	TD.044B TR.044A Antara TD.044B-TD.045=33.70 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	SULAWESI UTARA
22.	P. MANTERAWU	LAUT SULAWESI 01°45'47" U 124°43'51" T	TD.04B TR.049A Jarak TD.049A-TD.051A=63.82 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	SULAWESI UTARA
23.	P. MAKALEHI	LAUT SULAWESI 02°44'15" U 125°09'28" T	TD.051A TR.051 Jarak TD.051A-TD.053A=90.35 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	SULAWESI UTARA
24.	P. KAWALUSU	LAUT SULAWESI 04°14'06" U 125°18'59" T	TD.053A TR.053 Jarak TD.053A-TD.054=27.01 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	SULAWESI UTARA
25.	P. KAWIO	LAUT MINDANAU 04°40'16" U 125°25'41" T	TD.054 TR.054 Jarak TD.054-TD.055=4.98 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	SULAWESI UTARA
26.	P. MARORE	LAUT SULAWESI 04°44'14" U 125°28'42" T	TD.055 TR.055 Antara TD.055-TD.055A Garis Pangkal Biasa Dan TD.055A TR.055 Jarak TD.055A-TD.055B=0.5 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	SULAWESI UTARA
27.	P. BATU BAWAIKANG	LAUT SULAWESI 04°44'46" U 125°29'24" T	TD.055B TR.055 Jarak TD.055B-TD.056=81.75 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	SULAWESI UTARA
28.	P. MIANGAS	LAUT SULAWESI 05°34'02" U 126°34'54" T	TD.056 TR.056 Antara TD.056-TD.056A Garis Pangkal Biasa Dan TD.056A TR.056 Jarak TD.056A-TD.057A=57.91 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	SULAWESI UTARA

1	2	3	4	5
29.	P. MARAMPIT	LAUT SULAWESI 04°46'18" U 127°08'32" T	TD.057A TR.058 Antara TD.057A-TD.057 Garis Pangkal Biasa Dan TD.057 TR.059 Jarak TD.057-TD.058=7.10 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	SULAWESI UTARA
30.	P. INTATA	LAUT SULAWESI 04°38'38" U 127°09'49" T	TD.058A TR.058A Antara TD.058A-TD.058 Garis Pangkal Biasa	SULAWESI UTARA
31.	P. KAKARUTAN	SAMUDERA PASIFIK 04°37'36" U 127°09'53" T	TD.058 TR.058 Jarak TD.058-TD.059=55.63 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	SULAWESI UTARA
32.	P. JIEW	LAUT HALMAHERA 00°43'39" U 129°08'30" T	TD.063 TR.063 Jarak TD.063-TD.065=96.05 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	MALUKU UTARA
33.	P. BUDD	SAMUDERA PASIFIK 00°32'08" U 130°43'52" T	TD.065 TR.065 Jarak TD.065-TD.066=45.91 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	PAPUA
34.	P. FANI	SAMUDERA PASIFIK 00°04'28" U 131°16'49" T	TD.066 TR.066 Antara TD.066-TD.066A Garis Pangkal Biasa Dan TD.066A TR.066 Jarak TD.066A-TD.070=99.81 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	PAPUA
35.	P. MIOSSU	SAMUDERA PASIFIK 00°20'16" S 132°09'34" T	TD.070 TR.070 Jarak TD.070-TD.070A=15.17 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	PAPUA
36.	P. FANILDO	SAMUDERA PASIFIK 00°56'22" U 134°17'44" T	TD.072 TR.072 Antara TD.072-TD.072A Garis Pangkal Biasa	PAPUA
37.	P. BRAS	SAMUDERA PASIFIK 00°55'57" U 134°20'30" T	TD.072 TR.072 Antara TD.072A-TD.074A=97.28 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	PAPUA
38.	P. BEPONDI	SAMUDERA PASIFIK 00°23'38" S 135°16'27" T	TD.074 TR.074 Antara TD.074-TD.076B=39.41 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	PAPUA

1	2	3	4	5
39.	P. LIKI	SAMUDERA PASIFIK 01°34'26" S 138°42'57" T	TD.079 TR.079 Jarak TD.079-TD.080=97.06 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	PAPUA
40.	P. KOLEPON	LAUT ARU 08°12'49" S 137°41'24" T	TD.088E TR.088 Jarak TD.088E-TD.088F=25.15 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	PAPUA
41.	P. LAAG	LAUT ARU 05°23'14" S 137°43'07" T	TD.092 TR.092 Jarak TD.092-TD.093=64.15 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	PAPUA
42.	P. ARARKULA	LAUT ARU 05°35'42" S 134°49'05" T	TD.079 TR.097 Jarak TD.097A-TD.098=25.02 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	MALUKU
43.	P. KARAWEIRA	LAUT ARU 06°00'09" S 134°54'26" T	TD.098 TR.098 Jarak TD.098-TD.099=19.29 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	MALUKU
44.	P. PANAMBULAI	LAUT ARU 06°19'26" S 134°54'53" T	TD.099 TR.099 Jarak TD.099-TD.099A=19.95 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	MALUKU
45.	P. KULTUBAI UTARA	LAUT ARU 06°38'50" S 134°50'12" T	TD.099A TR.099 Jarak TD.099A-TD.100=11.45 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	MALUKU
46.	P. KULTUBAI SELATAN	LAUT ARU 06°49'54" S 134°47'14" T	TD.100 TR.100 Jarak TD.100-TD.100A=12.62 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	MALUKU
47.	P. KARANG	LAUT ARU 07°01'08" S 134°41'26" T	TD.100A TR.100A Antara TD.100A-TD.100B Garis Pangkal Biasa Dan TD.100B TR.100B Jarak TD.100B-TD.101=10.25 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	MALUKU
48.	P. ENU	LAUT ARAFURU 07°06'14" S 134°31'19" T	TD.101A TR.101B Antara TD.101-TD.101A Garis Pangkal Biasa Dan TD.101A TR.100B Jarak TD.101A-TD.102=18.54 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	MALUKU

1	2	3	4	5
49.	P. BATU GOYANG	LAUT ARU 07°57'01" S 134°11'38" T	TD.102 Jarak TD.102-TD.103=98.34 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	MALUKU
50.	P. LARAT	LAUT ARU 07°14'26" S 131°58'49" T	TD.104 TR.104 Jarak TD.104-TD.105B=29.55 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	MALUKU
51.	P. ASUTUBUN	LAUT TIMOR 08°03'07" S 131°18'02" T	TD.105 TR.105 Jarak TD.105-TD.105C Garis Pangkal Lurus Kepulauan Dan TD.105C TR.105 Jarak TD.105C-TD.106C Garis Pangkal Lurus Kepulauan	MALUKU
52.	P. SELARU	LAUT TIMOR 08°10'17" S 131°07'31" T	TD.106 TR.106A Jarak TD.106-TD.106A Garis Pangkal Lurus Kepulauan	MALUKU
53.	P. BATARKUSU	LAUT TIMOR 08°20'30" S 130°49'16" T	TD.107 TR.107 Jarak TD.107-TD.107A=0.51 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	MALUKU
54.	P. MASELA	LAUT TIMOR 08°13'29" S 129°49'32" T	TD.108 TR.108 Jarak TD.108-TD.109=78.22 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	MALUKU
55.	P. MEATIMIARANG	LAUT TIMOR 08°21'09" S 128°30'52" T	TD.109 TR.109 Antara TD.109-TD.115 Timor-Timur	MALUKU
56.	P. LETI	LAUT TIMOR 08°14'20" S 127°37'50" T	CTD. 110 CTR. 110	MALUKU
57.	P. KISAR	SELAT WETAR 08°06'10" S 127°08'36" T	CTD. 111 CTR. 111	MALUKU
58.	P. WETAR	LAUT BANDA 07°56'50" S 126°28'10" T	CTD. 112 CTR. 112	MALUKU
59.	P. LIRAN	SELAT WETAR 08°03'50" S 125°44'00" T	CTD. 112A CTR. 112A	MALUKU

1	2	3	4	5
60.	P. ALOR	SELAT OMBAI 08°13'50" S 125°07'55" T	CTD. 113 CTR. 113	NUSA TENGGARA TIMUR
61.	P. BATEK	LAUT SAWU 09°15'30" S 123°59'30" T	TIDAK ADA	NUSA TENGGARA TIMUR
62.	P. DANA	SAMUDERA HINDIA 11°00'36" S 122°52'37" T	TD.121 TR.121 Jarak TD.121-TD.122=65.43 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	NUSA TENGGARA TIMUR
63.	P. DANA	SAMUDERA HINDIA 10°50'00" S 121°16'57" T	TD.123 TR.123 Antara TD.123-TD.123A Garis Pangkal Biasa Dan TD.123A TR.123 Jarak TD.123A-TD.124=57.55 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	NUSA TENGGARA TIMUR
64.	P. MANGUDU	SAMUDERA HINDIA 10°50'08" S 120°05'56" T	TD.125A TR.125 Antara TD.125-TD.125A Garis Pangkal Biasa Dan TD.125A TR.125 Jarak TD.125A-TD.128B=72.43 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	NUSA TENGGARA TIMUR
65.	P. SOPHALOUISA	SAMUDERA HINDIA 08°55'20" S 116°00'08" T	TD.131 TR.131 Jarak TD.131-TD.131=25.38 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	NUSA TENGGARA BARAT
66.	P. BARUNG	SAMUDERA HINDIA 08°30'30" S 113°17'37" T	TD.138 TR.138 Jarak TD.138-TD.139=94.26 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	JAWA TIMUR
67.	P. SEKEL	SAMUDERA HINDIA 08°24'24" S 111°42'31" T	TD.139 TR.139 Jarak TD.139-TD.139A=11.90 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	JAWA TIMUR
68.	P. PANEHAN	SAMUDERA HINDIA 08°22'17" S 111°30'41" T	TD.139 TR.139 Jarak TD.139A-TD.140=48.75 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	JAWA TIMUR
69.	P. NUSA KAMBANGAN	SAMUDERA HINDIA 07°47'05" S 109°02'34" T	TD.143A TR.143 Jarak TD.143-TD.144A=36.34 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	JAWA TENGAH

1	2	3	4	5
70	P. MANUK	SAMUDERA HINDIA 07°49'11" S 108°19'18" T	TD.144C TR 144 Jarak TD.144C-TD.144=1.38 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	JAWA BARAT
71	P. DELI	SAMUDERA HINDIA 07°01'00" S 105°31'25" T	TD.147 TR.147 Jarak TD.147-TD.148A=18.35 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	BANTEN
72	P. BATU KECIL	SAMUDERA HINDIA 05°53'45" S 104°26'26" T	TD.151 TR.151 Jarak TD.151-TD.152=50.33 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	LAMPUNG
73	P. ENGGANO	SAMUDERA HINDIA 05°31'13" S 102°16'00" T	TD.154 TR.154	BENGKULU
74	P. MEGA	SAMUDERA HINDIA 04°01'12" S 101°01'49" T	TD.156 TR.156 Jarak TD.156-TD.158=60.36 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	BENGKULU
75	P. SIBARUBARU	SAMUDERA HINDIA 03°17'48" S 100°19'47" T	TD.158 TR.158 Jarak TD.158-TD.159=33.96 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	SUMATERA BARAT
76	P. SINYAUNYAU	SAMUDERA HINDIA 01°51'58" S 99°04'34" T	TD.161 TR.161 Jarak TD.161-TD.161B=16.43 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	SUMATERA BARAT
77	P. SIMUK	SAMUDERA HINDIA 00°05'33" S 97°51'14" T	TD.164B TR.164 Antara TD.164B-TD.164 Garis Pangkal Biasa Dan TD.164 TR.164 Jarak TD.164-TD.167=89.23 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	SUMATERA UTARA
78	P. WUNGA	SAMUDERA HINDIA 01°12'47" U 97°04'48" T	TD.167 TR.167 Jarak TD.167-TD.168=11.59 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	SUMATERA UTARA
79	P. SIMEULUCUT	SAMUDERA HINDIA 02°31'47" U 95°55'05" T	TD.170 TR.170 Jarak TD.170-TD.171=40.87 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	NANGROE ACEH DARUSALAM

1	2	3	4	5
80.	P. SALAUT BESAR	SAMUDERA HINDIA 02°57'51" U 95°23'34" T	TD.171 TR.171 Antara TD.171-TD.171C Garis Pangkal Biasa Dan TD.174 TR.174 Jarak TD.171C-TD.174=113.61 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	NANGROE ACEH DARUSALAM
81.	P. RAYA	SAMUDERA HINDIA 04°52'33" U 95°21'46" T	TD.174 TR.174 Jarak TD.174-TD.175=25.87 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	NANGROE ACEH DARUSALAM
82.	P. RUSA	SAMUDERA HINDIA 05°16'34" U 95°12'07" T	TD.175 TR.175 Jarak TD.175-TD.176A=33.89 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	NANGROE ACEH DARUSALAM
83.	P. BENGGALA	SAMUDERA HINDIA 05°47'34" U 94°58'21" T	TD.176A TR.176A Jarak TD.176A-TD.177=18.88 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	NANGROE ACEH DARUSALAM
84.	P. RONDO	SAMUDERA HINDIA 06°04'30" U 95°06'45" T	TD.177 TR.177 Antara TD.177-TD.177A Garis Pangkal Biasa Dan TD.177 TR.177 Jarak TD.177A-TD.178=16.66 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	NANGROE ACEH DARUSALAM
85.	P. BERHALA	SELAT MALAKA 03°46'38" U 99°30'03" T	TD.184 TR.184 Jarak TD.184-TD.185=89.42 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	SUMATERA UTARA
86.	P. BATU MANDI	SELAT MALAKA 02°52'10" U 100°41'05" T	TD.185 TR.185 Jarak TD.185-TD.186=76.97 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU
87.	P. IYU KECIL	SELAT MALAKA 01°11'30" U 103°21'08" T	TD.188 TR.188 Jarak TD.188-TD.189=2.67 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU
88.	P. KARIMUN KECIL	SELAT MALAKA 01°09'59" U 103°23'20" T	TD.189 TR.189 Jarak TD.189-TD.190=15.87 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU

1	2	3	4	5
89.	P. NIPA	SELAT SINGAPURA 01°09'13" U 103°39'11" T	TD.190 TR.190 Antara TD.190-TD.190A Garis Pangkal Biasa Dan TD.190A TR.190 Jarak TD.190A-TD.191=3.00 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU
90.	P. PELAMPONG	SELAT SINGAPURA 01°07'44" U 103°41'58" T	TD.191 TR.191 Jarak TD.191-TD.191A=4.54 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU
91.	P. BATU BERHANTI	SELAT SINGAPURA 01°11'06" U 103°52'57" T	TD.191B TR.191B Jarak TD.192-TD.193=11.91 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU
92.	P. NONGSA	SELAT SINGAPURA 01°12'29" U 104°04'47" T	TD.193 TR.193 Jarak TD.193-TD.194=18.83 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	KEPULAUAN RIAU

(Sumber : Buku Petunjuk Pelaksanaan
Tentang Pedoman Pengamanan Wilayah Perbatasan, 2011, Hal 65-74)